

**MANAJEMEN PROGRAM PEMBERDAYAAN  
KELUARGA RENTAN DI DINAS SOSIAL  
KOTA CILEGON**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial pada Konsentrasi Manajemen Publik  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh:

**AMELIA RIZKY OCTARINA**

**NIM 6661112424**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**2016**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Amelia Rizky Octarina  
NIM : 6661112424  
Tempat tanggal lahir : Serang, 10 Oktober 1991  
Program studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan skripsi yang berjudul MANAJEMEN PROGRAM PEMBERDAYAAN KELUARGA RENTAN DI DINAS SOSIAL KOTA CILEGON adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, Februari 2016



Amelia Rizky Octarina

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Nama : Amelia Rizky Octarina  
NIM : 6661112424  
Judul Skripsi : MANAJEMEN PROGRAM PEMBERDAYAAN KELUARGA  
RENTAN DI DINAS SOSIAL KOTA CILEGON

Serang, Februari 2016

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan

Menyetujui,

Pembimbing I



**Titi Stiawati, S.Sos., M.Si**  
NIP. 197011252005012001

Pembimbing II



**Deden M Haris, S.Sos., M.Si**  
NIP. 197204072008121002

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si**  
NIP. 197108242005011002

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Amelia Rizky Octarina  
NIM : 6661112424  
Judul Skripsi : MANAJEMEN PROGRAM PEMBERDAYAAN KELUARGA  
RENTAN DI DINAS SOSIAL KOTA CILEGON

Telah Diuji di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang,  
tanggal 22 Februari 2016 dan dinyatakan LULUS.

Serang, Februari 2016

Ketua Penguji:  
(Riny Handayani, S.Sos., M.Si)  
NIP. 197601062006042007

Anggota:  
(Ima Maisaroh, S.Ag., M.Si)  
NIP. 197203112003122001

Anggota:  
(Titi Stiawati, S.Sos., M.Si)  
NIP. 197011252005012001



Mengetahui,



Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si  
NIP. 197108242005011002



Listyaningoh, S.Sos., M.Si  
NIP. 197603292003122001

*When the world says GIVE UP!  
Hope whispers TRY ONE MORE TIME..*

*Dengan rasa syukur Kepada ALLAH SWT,  
Skripsi ini ku persembahkan untuk anakku tersayang,  
Bumi Masahiro Agharr..  
Juga untuk Mama, Ayah di surga dan suamiku tercinta..*

## **ABSTRAK**

**Amelia Rizky Octarina. 2016. NIM. 6661112424. Manajemen Program Pemberdayaan Keluarga Rentan di Dinas Sosial Kota Cilegon. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I: Titi Stiawati, M.Si dan Pembimbing II: Deden M Haris, M.Si.**

Penelitian ini membahas mengenai Manajemen Program Pemberdayaan Keluarga Rentan di Dinas Sosial Kota Cilegon. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen program pemberdayaan keluarga rentan di Dinas Sosial Kota Cilegon. Penelitian ini adalah penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Penentuan informan menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data melakukan observasi dan wawancara langsung dan dokumentasi. Instrumen penelitian ialah peneliti sendiri. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi dan member check yang didasarkan dari teori fungsi manajemen Luther Gullick dalam Handyaningrat (2001) yang terdiri dari tujuh indikator yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, pengkoordinasian, pelaporan dan anggaran. Teknik analisis data menggunakan konsep dari Miles dan Hubberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen Program Pemberdayaan Keluarga Rentan di Dinas Sosial Kota Cilegon tidak optimal. rekomendasi peneliti yaitu Dinas Sosial Kota Cilegon membuat perencanaan seoptimal mungkin sehingga misi mensejahterakan masyarakat dapat terwujud, membuat struktur organisasi formal agar masing-masing pembagian pekerjaan dapat terlaksana dengan optimal, menambah jumlah pegawai dan melakukan pembinaan kerja kepada pegawai lebih dari satu kali dalam setahun karena pegawai kebanyakan bukan berlatarbelakang sosial dan pembinaan kepada keluarga rentan dilakukan sesering mungkin serta melakukan pengawasan rutin, membuat pembinaan teknologi untuk keluarga rentan dan juga bantuan yang diberikan dalam bentuk uang tunai.

**Kata Kunci: Keluarga Rentan, Manajemen, Pemberdayaan, Program**

## **ABSTRACT**

***Amelia Rizky Octarina. 2016. NIM. 6661112424. Vulnerable Family Empowerment Program Management in Social Service Cilegon. Department of Public Administration. Faculty of Social Science and Political Science. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 1<sup>st</sup> Advisor: Titi Stiawati, M.Si and 2<sup>nd</sup> Advisor: Deden M Haris, M.Si***

*This research is explain about Vulnerable Family Empowerment Program Management in Social Service Cilegon. The purpose of this research is to the describe how the Vulnerable Family Empowerment Program Management in Social Service Cilegon. This research is a descriptive qualitative. Determination of informans using purposive technique. Data collection technique are using interview, observation and documentation. The instrument research is researcher herself. The validation of data are using triangulation and member check and based on the theory of the process of administration and management from Luther Gullick in Handyaningrat (2001) which consists of seven indicators: planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting and budgeting. Data analysis technique is using methods from Miles and Hubberman. The conclusion of Vulnerable Family Empowerment Program Management in Social Service Cilegon is not optimal. The recomendation are Social Service should make the plans optimally so the mission of the public welfare can be realized, make a formal organizational stucture so each division can be accomplished optimally, recruite more employee and do the directing more than once a year because some employee are not social background and the do directing for vulnerable families as often as possible and also do the routine controling, then, do training technology to vulnerable families and providing cash assistance.*

***Keywords: Empowerment, Management, Program, Vulnerable Families***

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Dan atas berkat rahmat, karunia dan ridho-Nya pula penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Sosial pada konsentrasi Manajemen Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul "Manajemen Program Pemberdayaan Keluarga Rentan di Dinas Sosial Kota Cilegon". Hasil skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung peneliti secara moril dan materil. Maka dengan ketulusan hati, peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat., M.Pd, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Bapak Dr. Agus Sjafari, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Ibu Rahmawati, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Bapak Iman Mukhroman, S.Ikom., M.Ikom., Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos.,MSI., Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Ibu Listianingsih, S.Sos., M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Bapak Riswanda, S.Sos., M.PA., Ph.D., Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.



8. Ibu Arenawati S.Sos., M.Si., Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
9. Ibu Titi Stiawati S.Sos., M.Si., Dosen pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Bapak Deden M Haris S.Sos., M.Si., Dosen pembimbing II Skripsi yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Seluruh Dosen pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada peneliti selama masa perkuliahan.
12. Seluruh Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah banyak membantu dalam hal keperluan akademik dan administrasi.
13. Ibu Ida Kristiyanti, M.Si., Kasubag Program dan Evaluasi Dinas Sosial Kota Cilegon yang telah memberikan bantuan kepada peneliti dalam mencari data sesuai dengan yang peneliti butuhkan.
14. Bapak Suherman, SE., Kabid Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial yang telah banyak memberikan bantuan kepada peneliti dalam mencari data yang dibutuhkan.
15. Ibu Dra. Yuadhita Brotorini, MM., Kasi Pemberdayaan dan Lembaga Sosial yang sudah banyak memberikan bantuan dan informasi yang dibutuhkan kepada peneliti.
16. Mba Hikmawati, S.Si., yang sudah memberikan informasi dan membantu peneliti dalam mencari data-data yang dibutuhkan.
17. Bapak Sudirman, SE., Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Citangkil yang sudah meluangkan waktunya kepada peneliti dalam mencari data yang dibutuhkan.

18. Ibu Andis Sabariah, Ibu Erwin Yulianti dan Ibu Neneng yang telah meluangkan waktunya untuk peneliti dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.
19. Suamiku, anakku tersayang, kedua orangtua, kedua mertua, semua keluargaku yang tak lelah selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
20. Sahabat-sahabatku Indri depe, Indri Reni, Nisa, Vera, Ida, Ana, Cika, Jelita, Wida dan Nita yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini. serta kepada kawan-kawan seperjuangan, Non Reguler ANE angkatan 2011 yang telah mengajarkan banyak hal dan saling berbagi cerita semasa kuliah.
21. Sahabatku Irma Gummelli yang tak jenuh selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga dengan selesainya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan maka, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Serang, Februari 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS                        |         |
| LEMBAR PERSETUJUAN                                    |         |
| LEMBAR PENGESAHAN                                     |         |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN                                 |         |
| ABSTRAK   |         |
| <i>ABSTRACT</i>                                       |         |
| KATA PENGANTAR .....                                  | i       |
| DAFTAR ISI .....                                      | iv      |
| DAFTAR TABEL .....                                    | vii     |
| DAFTAR GAMBAR .....                                   | ix      |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                 | x       |
| <br>  |         |
| BAB 1 PENDAHULUAN .....                               | 1       |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                      | 1       |
| 1.2 Identifikasi Masalah .....                        | 16      |
| 1.3 Batasan Masalah .....                             | 17      |
| 1.3.1 Batasan Masalah .....                           | 17      |
| 1.3.2 Rumusan Masalah .....                           | 17      |
| 1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian .....                | 17      |
| 1.5 Manfaat Penelitian .....                          | 18      |
| 1.6 Sistematika Penulisan .....                       | 19      |
| <br>  |         |
| BAB II DESKRIPSI TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI |         |
| DASAR PENELITIAN .....                                | 25      |
| 2.1 Deskripsi Teori .....                             | 25      |
| 2.2 Teori Manajemen .....                             | 25      |
| 2.2.1 Definisi dan Konsep Manajemen .....             | 25      |
| 2.2.2 Proses atau Fungsi Manajemen .....              | 27      |

|  |           |
|--|-----------|
| 2.3 Teori Konsep Pemberdayaan .....                      | 34        |
| 2.3.1 Teori Konsep Pemberdayaan .....                    | 34        |
| 2.3.2 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat .....              | 38        |
| 2.3.3 Unsur-Unsur dan Indikator Pemberdayaan .....       | 42        |
| 2.3.4 Strategi Pemberdayaan .....                        | 45        |
| 2.3.5 Tujuan Pemberdayaan .....                          | 47        |
| 2.4 Tinjauan Konsep Kesejahteraan Sosial .....           | 49        |
| 2.4.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial .....              | 49        |
| 2.4.2 Fungsi Kesejahteraan Sosial .....                  | 50        |
| 2.5 Definisi dan Konsep Kemiskinan .....                 | 51        |
| 2.6 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ..... | 55        |
| 2.7 Penelitian Terdahulu .....                           | 59        |
| 2.8 Kerangka Berpikir .....                              | 64        |
| 2.9 Asumsi Dasar .....                                   | 67        |
| <br>   |           |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>               | <b>68</b> |
| 3.1 Metodologi Penelitian .....                          | 68        |
| 3.2 Variabel Penelitian .....                            | 69        |
| 3.2.1 Definisi Konsep .....                              | 69        |
| 3.2.2 Definisi Operasional .....                         | 70        |
| 3.3 Instrumen Penelitian .....                           | 70        |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data .....                        | 71        |
| 3.4.1 Wawancara Mendalam .....                           | 71        |
| 3.4.2 Pengamatan/Observasi .....                         | 72        |
| 3.4.3 Studi Dokumentasi .....                            | 73        |
| 3.5 Informan Penelitian .....                            | 73        |
| 3.6 Pedoman Wawancara .....                              | 75        |
| 3.7 Teknik Analisis Data .....                           | 77        |
| 3.8 Uji Kredibilitas Data .....                          | 78        |
| 3.8.1 Triangulasi .....                                  | 78        |
| 3.8.2 Member Check .....                                 | 79        |

|  |            |
|--|------------|
| 3.9 Tempat dan Waktu Penelitian .....  | 80         |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>   | <b>82</b>  |
| 4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....   | 82         |
| 4.1.1 Gambaran Umum Kota Cilegon .....   | 82         |
| 4.1.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Cilegon .....  | 85         |
| 4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Cilegon .....                                  | 85         |
| 4.1.4 Tugas Pokok Bidang-Bidang pada Dinas Sosial Kota Cilegon .                           | 88         |
| 4.1.5 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Cilegon .....  | 103        |
| 4.1.6 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....   | 104        |
| 4.1.7 Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kota Cilegon .....                               | 105        |
| 4.1.8 Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Cilegon .....                          | 107        |
| 4.2 Deskripsi Data .....   | 109        |
| 4.2.1 Deskripsi Data Penelitian .....  | 109        |
| 4.2.2 Deskripsi Informan .....   | 110        |
| 4.3 Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian .....   | 114        |
| 4.4 Pembahasan .....   | 152        |
| 4.4.1 Manajemen Program Pemberdayaan Keluarga Rentan di Dinas<br>Sosial Kota Cilegon ..... | 152        |
| <b>BAB V PENUTUP</b>   |            |
| 5.1 Kesimpulan .....   | 166        |
| 5.2 Saran .....  | 167        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>169</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>  |            |

## DAFTAR TABEL

|   | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten .....  | 2       |
| Tabel 1.2 Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Provinsi Banten dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 .....                        | 3       |
| Tabel 1.3 Perbandingan Jumlah Penduduk dengan Persentase Penduduk Miskin dan Persentase Keluarga Rentan berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten ..... | 4       |
| Tabel 1.4 Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (rupiah/kapita/bulan) Tahun 2014.....  | 5       |
| Tabel 1.5 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Cilegon Tahun 2014 .....   | 6       |
| Tabel 1.6 Jumlah Keluarga Rentan di Kota Cilegon Tahun 2014 .....   | 8       |
| Tabel 1.7 Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Cilegon Tahun 2014 .....  | 10      |
| Tabel 1.8 Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Cilegon Tahun 2014 .....  | 12      |
| Tabel 1.9 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Kota Cilegon dengan Keluarga Rentan .....  | 13      |
| Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti .....   | 62      |
| Tabel 3.1 Tabel Variabel Operasional .....  | 70      |
| Tabel 3.2 Tabel Informan .....  | 74      |
| Tabel 3.3 Pedoman Wawancara .....   | 76      |
| Tabel 3.4 Jadwal Penelitian .....   | 81      |
| Tabel 4.1 Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Cilegon .....   | 108     |
| Tabel 4.2 Deskripsi Informan .....  | 114     |
| Tabel 4.3 Program Pemberdayaan Sosial .....   | 120     |

|  |     |
|--|-----|
| Tabel 4.4 Pembahasan dan Hasil Analisis Data ..... | 161 |
|--|-----|

## DAFTAR GAMBAR

|  | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 2.1 Indikator Pemberdayaan .....  | 43      |
| Gambar 2.2 Alur Berpikir .....   | 66      |
| Gambar 4.1 Peta Kota Cilegon .....   | 84      |
| Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Cilegon .....   | 87      |
| Gambar 4.3 Perbandingan Keluarga Rentan yang Mendapat Program<br>Pemberdayaan dengan yang Belum Mendapat Program<br>Pemberdayaan ..... | 119     |



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Ijin Penelitian
2. Keterangan Informan
3. Member Check
4. Matriks Hasil Wawancara Sebelum Reduksi Data
5. Dokumentasi Foto
6. Dokumen Lain yang Relevan

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Pembangunan dilakukan secara menyeluruh yaitu pada semua aspek kehidupan masyarakat (politik, ekonomi, dan sosial budaya). Selain bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, pembangunan bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan.

Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang. Namun, demikian, secara luas kemiskinan juga kerap didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan: kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat (SMERU dalam Suharto, 2004: 134). Definisi kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar seperti ini diterapkan oleh Depsos, terutama dalam mendefinisikan fakir miskin. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002:3). Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok dalam definisi ini meliputi kebutuhan akan makanan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan.

Banten adalah salah satu provinsi di Pulau Jawa yang dahulunya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat namun telah terpisah dan menjadi provinsi sejak tahun 2000. Provinsi yang memiliki 4 kota, 4 kabupaten, 40 kecamatan, dan 248 desa/kelurahan. Provinsi yang baru berdiri selama 15 tahun ini juga memiliki masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat yang diakibatkan oleh faktor kemiskinan. Berikut tabel persentase penduduk miskin di Provinsi Banten menurut Kabupaten/Kota.

**Tabel 1.1**  
**Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2013**

| Kabupaten/Kota         | Persentase Penduduk Miskin |      |      |
|------------------------|----------------------------|------|------|
|                        | 2011                       | 2012 | 2013 |
| Pandeglang             | 11,4                       | 9,8  | 9,27 |
| Lebak                  | 10,38                      | 9,2  | 8,62 |
| Tangerang              | 7,18                       | 6,42 | 5,71 |
| Serang                 | 6,34                       | 5,63 | 5,28 |
| Kota Tangerang         | 6,88                       | 6,14 | 5,55 |
| Kota Cilegon           | 4,46                       | 3,98 | 3,81 |
| Kota Serang            | 7,03                       | 6,25 | 5,69 |
| Kota Tangerang Selatan | 1,67                       | 1,5  | 1,33 |
| Banten                 | 7,46                       | 6,26 | 5,71 |

*(Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2013)*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi banten dari tahun 2010-2013 berkurang. Persentase penduduk miskin tertinggi pada tahun 2013 berada pada Kabupaten Pandeglang yaitu sebesar 9,27%, kemudian diikuti oleh Kabupaten Lebak yaitu sebesar 8.62%. Persentase

penduduk miskin terendah berada di Kota Tangerang Selatan yaitu sebanyak 1,33% dan Kota Cilegon yaitu sebesar 3.81%.

Kemiskinan dapat menimbulkan berbagai permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Provinsi Banten didirikan pada tahun 2000 bersamaan dengan salah satu provinsi, yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun, apabila dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tingkat persentase penduduk miskin di Provinsi Banten lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut tabel perbandingannya:

**Tabel 1.2**

**Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Provinsi Banten dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013**

| <b>Provinsi</b>           | <b>Persentase Penduduk Miskin</b> | <b>Garis Kemiskinan</b> |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Banten                    | 5.89                              | 288.733                 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 5.25                              | 427.081                 |

*(Sumber: BPS Provinsi Banten dan BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013)*

Menurut Kementerian Sosial RI, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat dipenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan

tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana sosial. Berikut tabel perbandingan jumlah penduduk dengan persentase penduduk miskin dan keluarga rentan berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2014:

**Tabel 1.3**  
**Perbandingan Jumlah Penduduk dengan Persentase Penduduk Miskin dan Persentase Keluarga Rentan berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2014**

| <b>Kabupaten/Kota</b>  | <b>Jumlah Penduduk</b> | <b>Jumlah Penduduk Miskin</b> | <b>Keluarga Rentan</b> |
|------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Kab. Pandeglang        | 1.183.006              | 9.50                          | 4.41                   |
| Kab. Lebak             | 1.259.305              | 9.17                          | 4.58                   |
| Kab. Tangerang         | 3.264.776              | 5.26                          | 2.16                   |
| Kab. Serang            | 1.463.094              | 4.87                          | 2.01                   |
| Kota Tangerang         | 1.999.894              | 4.91                          | 0.81                   |
| Kota Cilegon           | 405.303                | 3.81                          | 1.36                   |
| Kota Serang            | 631.101                | 5.70                          | 1.12                   |
| Kota Tangerang Selatan | 1.492.999              | 1.68                          | 0.52                   |
| <b>Jumlah</b>          | <b>11.704.877</b>      | <b>44.90</b>                  | <b>16.98</b>           |

*(Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2014)*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah terbesar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan jenis keluarga rentan berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada tahun 2014 sebesar 16.98% dan persentase keluarga rentan tinggi berada di Kabupaten Lebak sebesar 4.58%. Kota

Cilegon memiliki jumlah keluarga rentan sebesar 1.36%. Apabila dilihat dari garis kemiskinan, Kota Cilegon memiliki garis kemiskinan terendah dibandingkan dengan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Berikut tabel garis kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (rupiah/kapita/bulan) tahun 2014:

**Tabel 1.4**

**Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten  
(rupiah/kapita/bulan) Tahun 2014**

| <b>Kabupaten/Kota</b>  | <b>Tahun 2014</b> |
|------------------------|-------------------|
| Kab. Pandeglang        | 230.364           |
| Kab. Lebak             | 214.047           |
| Kab. Tangerang         | 335.291           |
| Kab. Serang            | 218.862           |
| Kota Tangerang         | 398.513           |
| Kota Cilegon           | 295.100           |
| Kota Serang            | 236.039           |
| Kota Tangerang Selatan | 378.303           |
| <b>Provinsi Banten</b> | <b>288.733</b>    |

*(Sumber: Dinas Sosial Provinsi Banten, 2014)*

Kota Cilegon merupakan salah satu kota di Provinsi Banten yang merupakan pusat aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Kota Cilegon dahulunya merupakan bagian wilayah Kabupaten Serang, kemudian ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif. Kota Cilegon mengalami perkembangan yang cukup pesat, seperti berdirinya pabrik-pabrik, kantor-kantor, sarana transportasi, sarana pendidikan, sarana kesehatan, tempat hiburan dan yang lainnya sehingga banyak

orang yang menganggap kesejahteraan hidup di Kota Cilegon cukup tinggi. Namun pada kenyataannya masih banyak permasalahan sosial yang dihadapi di kota ini. Berikut ini adalah jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Cilegon pada tahun 2014:

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Cilegon**  
**Tahun 2014**

| <b>PMKS KOTA CILEGON TAHUN 2014</b> |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>PMKS</b>                         | <b>JUMLAH</b> |
| Anak Balita Terlantar               | 71            |
| Anak Berhadapan dengan Hukum        | 9             |
| Anak Jalanan                        | 34            |
| Anak Terlantar                      | 207           |
| Bekas Warga Binaan                  | 18            |
| Gelandangan                         | 42            |
| Keluarga Bermasalah Sosial Ekonomi  | 193           |
| Keluarga Rentan Sosial Ekonomi      | 1097          |
| Korban Penyalahgunaan NAPZA         | 15            |
| Korban Tindak Kekerasan             | 27            |
| Pengemis                            | 2             |
| Penyandang Cacat                    | 1244          |
| Tuna Susila                         | 40            |
| Usia Lanjut Telantar                | 686           |
| Wanita Rawan Sosial Ekonomi         | 1488          |
| <b>Total</b>                        | <b>5155</b>   |

*(Sumber : Dinas Sosial Kota Cilegon, 2014)*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Cilegon tahun 2014 sebanyak 5155. Wanita rawan sosial ekonomi adalah masalah PMKS yang tertinggi di Kota Cilegon, yaitu sebanyak 1488, yang diikuti oleh penyandang cacat sebanyak 1244 dan keluarga rentan sebanyak 1097.

Masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), khususnya keluarga rentan di Kota Cilegon merupakan jumlah terbanyak ketiga setelah wanita rawan sosial ekonomi dan penyandang cacat. Menurut Dinas Sosial Kota Cilegon keluarga rentan merupakan keluarga muda yang baru menikah (sampai dengan lima tahun usia pernikahan) yang mengalami masalah sosial dan ekonomi (penghasilan sekitar 10% di atas garis kemiskinan) sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Berikut ini jumlah keluarga rentan di Kota Cilegon per Kecamatan tahun 2014.



**Tabel 1.6**  
**Jumlah Keluarga Rentan di Kota Cilegon Tahun 2014**

| <b>Kecamatan</b> | <b>Jumlah</b> | <b>Persentase</b> |
|------------------|---------------|-------------------|
| Cibeber          | 583           | 54.03             |
| Cilegon          | 0             | 0                 |
| Citangkil        | 218           | 20.20             |
| Ciwandan         | 41            | 3.80              |
| Grogol           | 62            | 5.75              |
| Jombang          | 9             | 0.83              |
| Pulomerak        | 15            | 1.39              |
| Purwakarta       | 151           | 13.99             |
| <b>Jumlah</b>    | <b>1079</b>   | <b>100.00</b>     |

*(Sumber : Dinas Sosial Kota Cilegon, 2014)*

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah keluarga rentan terbanyak berada di Kecamatan Cibeber yaitu sebanyak 583 kepala keluarga rentan dan yang tidak memiliki permasalahan keluarga rentan adalah Kecamatan Cilegon. Jumlah keluarga rentan di Kota Cilegon sebanyak 1079, sedangkan menurut Dinas Sosial Kota Cilegon jumlah keluarga rentan yang sudah diberdayakan hanya 50 kepala keluarga atau sebesar 5% sedangkan yang belum mendapat pemberdayaan sebanyak 1029 kepala keluarga atau sebesar 95%.

Masalah yang sering dihadapi keluarga rentan adalah masalah sosial dan ekonomi karena mereka hanya berpenghasilan sekitar 10% di atas garis kemiskinan sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Garis

kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik merupakan penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Kemudian, menurut Badan Pusat Statistik Kota Cilegon tahun 2014 persentase penduduk miskin di Kota Cilegon sebesar 3.99% dengan garis kemiskinan 295.100 rupiah/kapita/bulan. Apabila keluarga rentan di Kota Cilegon hanya berpenghasilan sekitar 10% di atas garis kemiskinan, berarti dalam sebulan mereka hanya berpenghasilan sekitar Rp 324.610/bulan.

Dinas Sosial Kota Cilegon merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah. Dinas Sosial Kota Cilegon mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Salah satu tugas dari Dinas Sosial Kota Cilegon diantaranya melaksanakan pemberdayaan sosial demi menurunkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Target dan realisasi program dan kegiatan pemberdayaan sosial yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Cilegon, secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.7**  
**Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Cilegon**  
**Tahun 2014**

| <b>Indikator Sasaran / Capaian Program / Indikasi Kegiatan</b>                                |  |               | <b>Kinerja Indikator</b> |                   |
|---|--|---------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Nama</b>   | <b>Cara Pehitungan</b>   | <b>Satuan</b> | <b>Tahun 2013</b>        | <b>Tahun 2014</b> |
| Proporsi peningkatan PSKS aktif   |  | %             | 5                        | 7.63              |
|   | Jumlah penambahan PSKS   | Lembaga       | 7                        | 10                |
|   | Jumlah PSKS yang ada tahun sebelumnya  | Lembaga       | 131                      | 131               |
| Proporsi peningkatan TKSM aktif   |  | %             | 5                        | 0                 |
|   | Jumlah penambahan TKSM   | Orang         | 12                       | 0                 |
|   | Jumlah TKSM yang ada tahun sebelumnya  | Orang         | 223                      | 223               |
|   |  | %             | 9                        | 27.66             |
| Persentase (%) PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | Jumlah PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun  | Orang         | 585                      | 1809              |
|   | Jumlah PMKS skala kota dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial   | Orang         | 6539                     | 6539              |
|   |  | %             | 20.70                    | 5.18              |
| Persentase (%) jumlah PMKS dalam 1 tahun skala kota yang menerima program                     | Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis | Orang         | 100                      | 25                |

|  |   |       |       |       |
|--|---|-------|-------|-------|
| pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial  | Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis | Orang | 483   | 483   |
| Persentase (%)<br>Panti Sosial skala kota yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial | Bukan termasuk SPM yang menjadi kewenangan Kota, indikator SPM ini merupakan kewenangan Provinsi  |       |       |       |
|  |   | %     | 91    | 100   |
| Persentase (%)<br>Panti Sosial skala kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial     | Jumlah Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos panti dalam 1 tahun   | Panti | 10    | 9     |
|  | Jumlah panti sosial skala kota dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana   | Panti | 11    | 9     |
| Persentase (%)   |   | %     | 86.05 | 86.05 |

(Sumber: Dinas Sosial Kota Cilegon, 2014)

Pada kenyataannya, Dinas Sosial Kota Cilegon masih banyak mengalami permasalahan-permasalahan dalam menjalani program pemberdayaan keluarga rentan , yaitu: Pertama, dalam proses perencanaan, belum tercapainya target atau tujuan Dinas Sosial Kota Cilegon dalam program pemberdayaan keluarga rentan, tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belum tercapainya target tersebut dapat dilihat dalam tabel target dan realisasi Dinas Sosial dalam program pemberdayaan sosial di bawah ini:

**Tabel 1.8**  
**Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Cilegon**  
**Tahun 2014**

| <b>Nama Program</b>  | <b>Satuan</b> | <b>Target<br/>2014</b> | <b>Realisasi<br/>2014</b> |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|
| Proporsi peningkatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)   | Orang         | 12                     | 0                         |
| Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis | Orang         | 100                    | 50                        |

*(Sumber: Dinas Sosial Kota Cilegon, 2014)*

Kedua, tidak adanya struktur organisasi formal dalam pengorganisasian atau pembagian masing-masing pekerjaan dalam program pemberdayaan sosial. Hanya Kasi Pemberdayaan Sosial dan Lembaga Sosial yang dibantu dengan dua orang staff pelaksana dan di lapangan dibantu oleh delapan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), masing-masing satu TKSK di satu Kecamatan.

Ketiga, kurangnya personil atau Sumber Daya Manusia di Dinas Sosial dalam proses penyusunan pegawai. Tahun 2014 Dinas Sosial Kota Cilegon hanya memiliki 31 Pegawai Negeri Sipil dengan salah tugasnya adalah melaksanakan pemberdayaan sosial demi menurunkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) salah satunya keluarga rentan. Jika Dibandingkan dengan Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang, Kota Cilegon memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil paling sedikit. Berikut tabel jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial dengan Keluarga Rentan tahun 2014:

**Tabel 1.9**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial dengan Keluarga Rentan**  
**Tahun 2014**

| <b>Unit Kerja</b>           | <b>Jumlah Pegawai</b> | <b>Jumlah Keluarga Rentan</b> |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Dinas Sosial Kota Serang    | 36                    | 7.081                         |
| Dinas Sosial Kab. Serang    | 35                    | 29.424                        |
| Dinas Sosial Kab. Tangerang | 35                    | 16.249                        |
| Dinas Sosial Kota Cilegon   | 31                    | 5.507                         |

*(Sumber: Dinsos Provinsi Banten, 2014)*

Kasi Pemberdayaan Sosial dan Lembaga Sosial juga mengalami masalah, yaitu hanya dibantu oleh dua orang staff pelaksana dan mereka tidak memiliki latar belakang sosial. Sehingga Dinas Sosial Kota Cilegon, mengalami kesulitan dalam program pemberdayaan sosial dari kurangnya jumlah personil atau Sumber Daya Manusia dan bukan berasal dari latar belakang sosial. Menurut Ibu Yuadhita, selaku Kasi Pemberdayaan Sosial dan Lembaga Sosial, ia hanya dibantu dengan dua orang staff pelaksana yang berlatar belakang pendidikan sarjana sains dan berlatar belakang Sekolah Menengah Atas (SMA).

Keempat, minimnya pembinaan kerja yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Cilegon kepada staff pelaksana yang bukan berasal dari latar belakang sosial dan kepada keluarga rentan di Kota Cilegon. Pembinaan kerja kepada staff pelaksana hanya dilakukan satu tahun sekali di Bandung yang dibantu oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Kesejahteraan Sosial. Kemudian, untuk keluarga rentan hanya dilakukan pembinaan kerja yaitu satu tahun sekali di Dinas Sosial Kota Cilegon.

Kelima, sulitnya melakukan koordinasi antara Dinas Sosial Kota Cilegon dengan keluarga rentan. Masing-masing keluarga rentan memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda, sehingga Dinas Sosial kesulitan menyatukan banyaknya perbedaan keinginan dan kebutuhan masing-masing kepala keluarga rentan.

Keenam, kurangnya pemahaman teknologi oleh keluarga rentan dalam pembuatan laporan keuangan. Banyak keluarga rentan yang tidak bisa mengoperasikan komputer atau mesin tik, sehingga laporan yang dibuat hanyalah

laporan dalam bentuk sederhana dengan metode tulis tangan. Laporan dari keluarga rentan harus diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Cilegon setiap tiga bulan sekali.

Ketujuh, kurangnya bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada setiap kelompok keluarga rentan. Pada tahun 2014 terdapat 10 kelompok keluarga rentan dengan nama Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan setiap kelompok memiliki 5 orang anggota. Setiap kelompok hanya diberi bantuan sebesar Rp 7.000.000. Sebelumnya, kelompok tersebut harus menyerahkan proposal pengajuan bantuan ke Dinas Sosial Kota Cilegon setahun sebelum bantuan tersebut diberikan.

Dari berbagai permasalahan yang telah dijabarkan oleh peneliti di atas dapat diketahui bahwa Dinas Sosial Kota Cilegon masih mengalami permasalahan dalam memajemen program pemberdayaan keluarga rentan di Kota Cilegon.

Hal inilah yang menjadi latar belakang peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“MANAJEMEN PROGRAM PEMBERDAYAAN KELUARGA RENTAN DI DINAS SOSIAL KOTA CILEGON”**.



## 1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Belum tercapainya target atau tujuan yang dibuat oleh Dinas Sosial Kota Cilegon dalam program pemberdayaan sosial khususnya pemberdayaan keluarga rentan.
2. Tidak adanya struktur formal di Dinas Sosial Kota Cilegon pada proses pengorganisasian atau pembagian masing-masing pekerjaan dalam program pemberdayaan sosial.
3. Kurangnya personil atau Sumber Daya Manusia di Dinas Sosial dalam proses penyusunan pegawai untuk pelaksanaan program pemberdayaan sosial dan personil tersebut tidak memiliki latar belakang sosial.
4. Minimnya pembinaan kerja yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Cilegon kepada staff pelaksana yang bukan berasal dari latar belakang sosial dan kepada keluarga rentan di Kota Cilegon.
5. Sulitnya melakukan koordinasi antara Dinas Sosial Kota Cilegon dengan keluarga rentan.
6. Kurangnya pemahaman teknologi oleh keluarga rentan dalam pembuatan laporan keuangan yang harus diserahkan ke Dinas Sosial Kota Cilegon.
7. Kurangnya bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada setiap kelompok keluarga rentan.

### **1.3 Batasan dan Rumusan Masalah**

#### **1.3.1 Batasan Masalah**

Dari uraian-uraian yang ada dalam latar belakang dan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi masalah penelitian yaitu tentang Manajemen Program Pemberdayaan Keluarga Rentan di Dinas Sosial Kota Cilegon.

#### **1.3.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana Manajemen Program Pemberdayaan Keluarga Rentan di Dinas Sosial Kota Cilegon?

### **1.4 Maksud dan Tujuan Penulisan**

Setiap penelitian tentu akan memiliki suatu tujuan dari penelitian tersebut. Hal ini sangat perlu untuk bisa menjadikan acuan bagi setiap kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Karena tujuan merupakan tolak ukur dan menjadi targetan dari kegiatan penelitian tersebut. Tanpa itu semua maka apa yang akan dilakukan akan menjadi sia-sia. Maksud dan tujuan penelitian tersebut antara lain, yaitu sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana Manajemen Program Pemberdayaan Keluarga Rentan di Dinas Sosial Kota Cilegon.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Sebuah penelitian dilakukan untuk dapat digeneralisasikan dan diharapkan memberikan *feedback* atau manfaat yang baik bagi bidang-bidang yang berhubungan dengan penelitian ini. Maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wacana bagi peneliti.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian yang praktis bagi pemerintah untuk memaksimalkan program-program yang ada di Dinas Sosial Kota Cilegon khususnya dalam program pemberdayaan keluarga rentan di Kota Cilegon.

#### 2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan atau menambah teori baru mengenai Manajemen Pemberdayaan Keluarga Rentan oleh Dinas Sosial Kota Cilegon.

- c. Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran khususnya bagi pengembangan ilmu administrasi negara.
- d. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melaksanakan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai Manajemen Pemberdayaan Keluarga Rentan oleh Dinas Sosial Kota Cilegon.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Masalah**

Latar belakang masalah menerangkan atau menjelaskan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti. Bentuk penerangan dan penjelasan diuraikan secara deduktif, artinya dimulai dari penjelasan yang berbentuk umum hingga menitik ke masalah yang spesifik dan relevan.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah mendeteksi aspek permasalahan yang muncul berkaitan dari tema/topik/judul penelitian atau dengan masalah.

## **1.3 Batasan Masalah**

Pembatasan masalah memfokuskan pada masalah spesifik yang akan diajukan dalam rumusan masalah.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Perumusan masalah bertujuan untuk memilih dan menetapkan masalah yang paling urgen yang berkaitan dengan judul penelitian. Perumusan masalah mendefinisikan permasalahan yang telah diterapkan dalam bentuk definisi konsep dan operasional, kalimat yang digunakan adalah kalimat pertanyaan.

#### **1.5 Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Menjelaskan manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam temuan penelitian. Manfaat teoritis berguna memberikan kontribusi tertentu terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan serta dunia akademis. Manfaat praktis memberikan kontribusi tertentu terhadap objek penelitian, baik individu, kelompok maupun organisasi.

## **BAB II DESKRIPSI TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN**

### **2.1 Deskripsi Teori**

Mengkaji berbagai teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan dan variabel penelitian, sehingga akan memperoleh konsep yang jelas.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai bahan acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini.

## **2.3 Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir adalah penjelasan secara sistematis tentang hubungan antar variabel penelitian yang dituangkan dalam bentuk bagan.

## **2.4 Asumsi Dasar**

Merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti, dan akan diuji kebenarannya.

# **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

## **3.1 Metode Penelitian**

Bagian ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian.

## **3.2 Variabel Penelitian**

### **3.2.1 Definisi Konsep**

Definisi konseptual memberikan penjelasan tentang konsep dari variabel yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan Kerangka Teori yang digunakan.

### **3.2.2 Definisi Operasional**

Definisi Operasional merupakan penjabaran konsep atau variabel penelitian dalam rincian yang terukur (indikator penelitian).

Variabel penelitian dilengkapi dengan tabel matriks, variabel, indikator, sub indikator dan nomor pertanyaan sebagai lampiran. Dalam penelitian kualitatif tidak perlu dijabarkan menjadi indikator maupun sub indikator tetapi cukup menjabarkan fenomena yang akan diamati.

### **3.3 Instrumen Penelitian**

Menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpulan data yang digunakan, proses pengumpulan data, dan teknik penentuan kualitas instrumen.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Menjelaskan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data seperti wawancara, obsevasi dan studi dokumentasi.

### **3.5 Informan Penelitian**

Informan penelitian dalam penelitian ini adalah *purposive* karena orang-orang tersebut adalah orang yang mengetahui betul apa yang menjadi permasalahan di penelitian ini.

### **3.6 Pedoman Wawancara**

Pedoman wawancara merupakan kisi-kisi pertanyaan yang memudahkan peneliti dalam mencari data ke informan.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data menjelaskan mengenai cara menganalisa data yang dilakukan dalam penelitian.

### **3.8 Uji Kredibilitas Data**

Uji kredibilitas data yang berfungsi sebagai pelaksana pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat tercapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.

### **3.9 Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat dan waktu penelitian menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian dilaksanakan.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

Menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi dari populasi atau sampel yang telah ditentukan, serta yang berhubungan dengan objek penelitian.

### **4.2 Deskripsi Data**

Menjelaskan data penelitian dengan menggunakan teori yang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

### **4.3 Pembahasan**

Merupakan pembahasan lebih lanjut dan lebih rinci terhadap hasil analisis data.



## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara jelas, singkat dan juga mudah dipahami. Kesimpulan juga harus sejalan dengan permasalahan serta asumsi dasar penelitian.

### **5.2 Saran**

Berisi tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun praktis. Saran praktis lebih operasional sedangkan aspek teoritis lebih mengarah pada pengembangan konsep atau teori.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Berisi daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan Skripsi.

## **LAMPIRAN**

Berisi mengenai daftar dokumen yang menunjang data penelitian.

## **BAB II**

### **DESKRIPSI TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN**

#### **2.1 Deskripsi Teori**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, peneliti menggunakan beberapa istilah yang berkaitan dengan masalah penelitian. Untuk itu pada bab ini peneliti menggunakan beberapa teori yang mendukung masalah dalam penelitian ini. Teori dalam ilmu administrasi mempunyai peranan yang sama seperti ilmu-ilmu lainnya, yaitu berfungsi untuk menjelaskan dan menjadi panduan dalam penelitian. Dengan penggunaan teori akan ditemukan cara yang tepat untuk mengelola sumber daya, waktu yang singkat untuk menyelesaikan pekerjaan dan alat yang tepat untuk memperingankan pekerjaan.

#### **2.2 Teori Manajemen**

##### **2.2.1 Definisi dan Konsep Manajemen**

Menurut H. Koontz & O'Donnel dalam Handayaniingrat (2001:19) mengemukakan definisi manajemen sebagai berikut:

*“Management involve getting things done through and with people”.*

(Manajemen berhubungan dengan pencapaian sesuatu tujuan yang dilakukan melalui dan cara dengan orang-orang lain.

Dalam definisi ini manajemen dititikberatkan pada usaha memanfaatkan orang-orang lain dalam pencapaian tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka orang-orang di dalam organisasi harus jelas wewenang, tanggung jawab dan tugas pekerjaannya (*job description*).

Selain itu, Tom Degenars *expert* PBB yang diperbantukan pada Lembaga Administrasi Negara tahun 1978-1979 dalam Handayaniingrat (2001:19) memberikan definisi manajemen sebagai berikut:

*“Management is defined as a process dealing with a guided group activity and based on distinct objectives which have to be achieved by the involment of human and non-human resources”.* (Manajemen didefinisikan sebagai suatu proses yang berhubungan dengan bimbingan kegiatan kelompok dan berdasarkan atas tujuan yang jelas yang harus dicapai dengan menggunakan sumber-sumber tenaga manusia dan bukan tenaga manusia).

Dalam definisi ini, manajemen dititikberatkan pada bimbingan kegiatan kelompok. Dalam pencapaian tujuan kelompok ini penggunaan sumber daya manusia adalah sangat penting, sekalipun sumber-sumber daya lainnya tidak boleh diabaikan.

Sedangkan George R.Terry dalam dalam Handayaniingrat (2001:20) memberikan definisi manajemen sebagai berikut:

*“Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, utilizing in each both science and art, and followed in order to accomplish predetermined objectives”*. (Manajemen adalah suatu proses yang mebedakan atas: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya).

Dalam definisi ini manajemen dipandang sebagai suatu proses mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan sampai pada pengawasan.

Berdasarkan definisi-definisi yang dijelaskan di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa manajemen adalah suatu proses untuk mencapai suatu tujuan yang dilakukan bersama orang-orang dengan menggunakan sumber daya yang ada dengan melakukan tahapan-tahapan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan sampai pada tahap pengawasan.

### **2.2.2 Proses atau Fungsi Manajemen**

Pengertian proses berarti serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai berakhirnya sasaran atau tercapainya tujuan, sedangkan fungsi adalah tugas atau kegiatan. Akan tetapi perkataan proses dan fungsi dalam hal ini tampaknya mempunyai pengertian yang sama, misalnya: W.H Newman, L. Gullick, G. Terry menyebut proses manajemen, Mc. Farland, Koontz, F. Taylor menyebut fungsi manajemen. H. Fayol menyebut pengertian yang sama yaitu proses atau fungsi adalah unsur (*element*).

William H. Newman dalam Handyaningrat (2001:20), menyebut “*The Work of Administrator/Manager*”. (Pekerjaan seorang Administrator/Manager) yang dapat dibagi dalam lima proses, yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*). Perencanaan ini meliputi serangkaian keputusan-keputusan termasuk penentuan-penentuan tujuan, kebijaksanaan, membuat program-program, menentukan metode dan prosedur serta menetapkan jadwal waktu pelaksanaan.
2. Pengorganisasian (*Organizing*). Pengorganisasian yaitu pengelompokan kegiatan-kegiatan yang diwadahkan dalam unit-unit untuk melaksanakan rencana dan menetapkan hubungan antara pimpinan dan bawahannya (atasan dan bawahan) di dalam setiap unit.
3. Pengumpulan Sumber (*Assembling Resources*). Pengumpulan sumber berarti pengumpulan sumber-sumber yang dipergunakan untuk mengatur penggunaan daripada usaha-usaha tersebut yang meliputi personal, uang atau kapital, alat-alat atau fasilitas dan hal-hal lain yang diperlukan untuk melaksanakan rencana.
4. Pengendalian Kerja (*Supervising*). Pengendalian kerja ialah bimbingan daripada pelaksanaan pekerjaan setiap hari termasuk memberikan instruksi, motivasi (dorongan) agar mereka secara sadar menuruti segala instruksinya, mengadakan koordinasi daripada berbagai kegiatan pekerjaan dan memelihara hubungan kerja baik antara atasan dan bawahan (*the “boss” and “subordinate”*).
5. Pengawasan (*Controlling*). Pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan sedapat mungkin sesuai dengan rencana (“*Seeing that the operating results conform as nearely as possible to the plan*”). Hal ini menyangkut penentuan standar dan bila perlu mengadakan koreksi atau pembetulan apabila pelaksanaannya menyimpang daripada rencana.

Sedangkan menurut Dalton E. Mc. Farland dalam Handyaningrat (2001:21), menyebut “Fungsi daripada Pimpinan” (*The Function of Executive/Management*) yang terbagi ke dalam tiga fungsi, yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*). Perencanaan berarti memutuskan tujuan berdasarkan ramalan apa yang akan terjadi dalam waktu yang

akan datang (*forecasting* = melihat ke depan). Di dalam *forecasting* dipertimbangkan tentang apa yang akan terjadi (kecenderungan/*trends*) perubahan (*change*) dan masalah-masalah pada waktu yang akan datang. Mc. Farland membedakan rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Perencanaan jangka pendek pada umumnya lebih mendekati kebenaran (*acceptable*) sedang perencanaan jangka panjang lebih banyak kemungkinan penyimpangannya.

2. Pengorganisasian (*Organizing*). Disamping mengatur sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang efektif, yang lebih penting disini ialah mengatur faktor manusia yang disertai tugas-tugas dalam pelaksanaan kerja (*organizing work-staffing*) dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab terhadap seseorang yang memegang jabatan.
3. Pengawasan (*Controlling*). Pengawasan ialah mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, bila perlu dengan mengadakan perubahan-perubahan atau pembetulan secukupnya.

Pendapat Mc. Farland dalam Handayani (2001:22) ini hampir sama dengan pendapat F.W Taylor tentang fungsi manager (*executive*), yaitu :

1. Perencanaan (*Planning*).
2. Pembinaan Kerja (*Directing*)
3. Mengatur Pekerjaan (*Organizing Work*).

Menurut Taylor di dalam *Directing* ini sudah tercakup fungsi *Supervising and Controlling* seperti dikemukakan oleh William. H. Newman.

Fungsi manager (*The Function of Manager*) menurut H. Koontz & O'Donnell dalam Handayani (2001:22) *The Principles of Management*, yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*). Perencanaan berhubungan dengan pemilihan sasaran atau tujuan (*objective*), strategi, kebijaksanaan, program, dan prosedur pencapaiannya. Perencanaan adalah suatu pengambilan keputusan, manakalan perencanaan ini menyangkut pemilihan di antara beberapa alternatif. Tanggung jawab perencanaan tidak dapat dipisahkan sama sekali daripada penyelenggaraan manajemen (*management performance*), baik perencanaan pada tingkatan pimpinan atas (*top manager plan*) maupun pada perencanaan pimpinan tingkat bawah (*bottom manager plan*).
2. Pengorganisasian (*Organizing*). Pengorganisasian berhubungan dengan pengaturan struktur melalui penentuan kegiatan untuk mencapai tujuandaripada suatu badan usaha secara keseluruhan atau setiap bagiannya. Pengelompokan kegiatan-kegiatannya, penugasan, pelimpahan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan, menentukan koordinasi, kewenangan dan hubungan informasi baik horizontal maupun vertikal dalam struktur organisasi itu. Struktur organisasi bukan suatu tujuan, tetapi suatu alat dalam menyelesaikan tujuan bada usaha atau organisasi. Struktur ini harus sesuai dengan tugas, yang telah diletakan oleh pimpinan terhadap seseorang yang bekerja dalam organisasi atau badan usaha itu.
3. Penyusunan Pegawai (*Staffing*). Penyusunan pegawai ini berhubungan dengan penempatan orang-orang, yaitu menempatkapan orang-orang sesuai dengan jabatan yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi. Untuk keperluan ini dengan sendirinya memerlukan persyaratan penentuan tenaga kerja bagi sesuatu pekerjaan atau jabatan yang harus disesuaikan, dan pekerjaan ini termasuk juga mengadakan inventarisasi, penilaian, dan pemilihan calon untuk pengisian jabatan tersebut. Disamping itu juga perlu dipertimbangkan tentang gaji, latihan dan pengembangannya baik bagi calon pegawai maupun pegawai tetap lainnya agar dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cara yang efektif.
4. Pembinaan dan Kepemimpinan (*Directing and Leading*). Metode pembinaan dan kepemimpinan merupakan pekerjaan yang sangat komplek. Pimpinan atas harus memperhitungkan bawahannya terhadap nilai-nilai kebiasaan, sasaran atau tujuan dari kebijaksanaan organisasi atau badan usaha. Pihak bawahan diusahakan agar banyak mengetahui terhadap struktur organisasi, hubungan yang saling ketergantungan daripada kegiatan dan kedudukan pribadinya, tugas-tugasnya dan wewenangnya. Apabila bawahan telah cukup jelas orientasinya terhadap pekerjaannya, atasan harus melimpahkan wewenang dan pertanggungjawabannya untuk kejelasan daripada tugasnya, yaitu memberikan pembinaan agar pelaksanaannya akan bertambah

baik, dan memberikan dorongan terhadap mereka agar bekerja dengan semangat dan penuh pengabdian. Pembinaan dan kepemimpinan yang dapat berhasil dari atasan terhadap bawahan diakui demikian kompleksnya. Namun demikian motivasi dan hasil daripada ilmu pengetahuan serta orang-orang yang telah terlatih yang bekerja secara efisien akan dapat menjadi tujuan organisasi atau badan usaha dengan sebaik-baiknya.

5. Pengawasan (*Controlling*). Pengawasan adalah tindakan penilaian atau perbaikan terhadap bawahan untuk menjamin agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana. Jadi penilaiannya apakah hasil pelaksanaannya tidak bertentangan dengan sasaran (*goals*) dan rencananya (*plans*). Bila terlihat adanya penyimpangan-penyimpangan, perlu segera diadakan tindakan perbaikan. Pembetulan penyimpangan-penyimpangan tersebut akan dapat membantu dan menjamin penyelesaian daripada rencana itu. Sekalipun perencanaan sendiri tidak dapat melakukannya, karena perencanaan merupakan pedoman bagi pimpinan untuk menggunakan sumber-sumber yang diperlukan secara tepat dalam penyelesaian tujuan yang tertentu, kemudian kegiatan ini dimonitoring untuk menentukan apakah dalam pelaksanaan kegiatan itu sesuai dengan yang direncanakan.

Menurut Luther Gullick proses daripada administrasi dan manajemen (*The Process of Administration and Management*) dalam Handayaniingrat (2001:24) adalah:

1. Perencanaan (*Planning*). Perencanaan adalah perincian dalam garis besar untuk memudahkan pelaksanaannya dan metode yang digunakan dalam menyelesaikan maksud atau tujuan badan usaha itu.
2. Pengorganisasian (*Organizing*). Menetapkan struktur formal daripada kewenangan dimana pekerjaan dibagi-bagi sedemikian rupa, ditentukan dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyusunan Pegawai (*Staffing*). Keseluruhan fungsi daripada kepegawaian sebagai usaha pelaksanaannya, melatih para staf dan memelihara situasi pekerjaan yang menyenangkan.
4. Pembinaan Kerja (*Directing*). Merupakan tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan, yang berwujud suatu perintah khusus atau umum dan instruksi-instruksi, dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu badan usaha atau organisasi.



5. Pengkoordinasian (*Coordinating*). Merupakan kewajiban yang penting untuk menghubungkan berbagai-bagai kegiatan daripada pekerjaan.
6. Pelaporan (*Reporting*). Dalam hal ini pimpinan yang bertanggung jawab harus mengetahui apa yang sedang dilakukan, baik bagi keperluan pimpinan maupun bawahannya melalui catatan, penelitian maupun inspeksi.
7. Anggaran (*Budgeting*). Semua kegiatan akan berjalan dengan baik bila disertai dengan usaha pembiayaan dalam bentuk anggaran, perhitungan anggaran dan pengawasan anggaran.

Sedangkan menurut George Terry dalam Handayani (2001:25) dengan bukunya: *Principles of Management* menggunakan pedekatan “Proses daripada Manajemen”, yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*). Perencanaan adalah suatu pemilihan yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan, membuat dan menggunakan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan waktu yang akan datang (*future*) dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dengan penuh keyakinan untuk tercapainya hasil yang dikehendakinya.
2. Pengorganisasian (*Organizing*). Pengorganisasian adalah menentukan, mengelompokan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk pencapaian tujuan, penugasan orang-orang dalam kegiatan-kegiatan ini, dengan menetapkan faktor-faktor lingkungan fisik yang sesuai, dan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
3. Penggerakan Pelaksanaan (*Actuating*). Penggerakan pelaksanaan adalah usaha agar semua anggota kelompok suka melaksanakan tercapainya tujuan dengan kesadarannya dan berpedoman pada perencanaan (*planning*) dan usaha pengorganisasiannya.
4. Pengawasan (*Controlling*). Pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus diselesaikan, yaitu: pelaksanaan, penilaian pelaksanaan, bila perlu melakukan tindakan korektif agar supaya pelaksanaannya tetap sesuai dengan standar.

Selain itu John F. Mee dalam Handayani (2001:26) mengemukakan dalam bukunya *Management Thought in a Dynamic Economy* menyebut fungsi manajemen yang terdiri atas:

1. Perencanaan (*Planning*) adalah proses pemikiran yang matang untuk dilakukan di masa yang akan datang dengan menentukan kegiatan-kegiatannya.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, peralatan, kegiatan, tugas, wewenang dan tanggung jawab, sehingga merupakan organisasi yang tepatdigerakan secara keseluruhan dalam rangka tercapainya tujuan yang telah ditentukan.
3. Pemberian Motivasi (*Motivating*) adalah seluruh proses pemberian motif (dorongan) kepada para karyawan untuk bekerja lebih bergairah, sehingga mereka dengan sadar mau bekerja demi tercapainya tujuan organisasi secara berhasil guna dan berdaya guna.
4. Pengawasan (*Controlling*) adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaab dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari beberapa definisi yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa arti kata fungsi dan proses dalam konsep manajemen memiliki definisi yang sama. Proses atau fungsi manajemen adalah serangkaian tahapan dalam menentukan tujuan sampai dengan pencapaian tujuan. Tahapan tahapan itu dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan, penganggaran, sampai dengan pengawasan.

## 2.3 Teori Konsep Pemberdayaan

### 2.3.1 Teori Konsep Pemberdayaan

Secara etimologi pemberdayaan dijelaskan dalam buku Manajemen Pemberdayaan karya Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto (2007:1) sebagai berikut:

“Pemberdayaan berasal dari penerjemahan bahasa Inggris *“empowerment”* yang juga bermakna “pemberian kuasa” karena *power* bukan sekedar “daya”, tetapi juga “kekuasaan” sehingga kata “daya” tidak saja bermakna “mampu”, tetapi juga “mempunyai kuasa”.

Konsep pemberdayaan mulai menjadi diskursus pembangunan, ketika orang mulai mempertanyakan makna pembangunan. Di Eropa, wacana pemberdayaan muncul ketika industrialisasi menciptakan rakyat penguasa faktor produksi dan masyarakat yang bekerja dikuasai. Di negara-negara sedang berkembang, wacana pemberdayaan muncul ketika pembangunan menimbulkan disinteraksi sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi sumber daya alam, dan alienasi masyarakat dari faktor-faktor produksi oleh penguasa. Pemberdayaan pun dipahami secara beragam atas kelanjutan dari ketidaktepatan pemahaman mengenai pemberdayaan dalam wacana praktik pembangunan (Moses, 2011: 30).

Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Oleh karena itu, ide utama pemberdayaan ini selalu bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Sejalan dengan artian secara konseptual, Sulistiyani dalam buku yang berjudul

*Kemitraan dan Model–Model Pemberdayaan*, mengemukakan bahwa “pemberdayaan dapat dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya” (Sulistiyani 2004:7).

Pengertian pemberdayaan dalam bidang pembangunan sosial, banyak dikemukakan oleh tokoh-tokoh, ahli-ahli maupun teoritis. Pada dasarnya secara umum pengertian pemberdayaan memiliki fokus yang sama yaitu mengupayakan adanya proses dalam memberikan daya kepada kelompok lemah dengan tujuan untuk mensejahterakannya sehingga dapat mandiri dalam menjalankan kehidupannya.

Pemberdayaan menurut Edi Suharto (2009:59-60), dalam buku *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, adalah:

“Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya”.

Sedangkan Suhendra (2006:75) mengemukakan bahwa:

“Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan bahwa masyarakat diberi kuasa, dalam upaya untuk menyebarkan kekuasaan, melalui pemberdayaan masyarakat, organisasi agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya untuk semua aspek kehidupan politik,

ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan dan sebagainya”.

Owin Jamasy (2004:38) dalam buku Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan mengemukakan bahwa:

“Kerangka pikir dalam pemberdayaan setidaknya mengandung tiga tujuan penting yakni: *pertama*, Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang misalnya mengadakan pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat atau kelompok yang akan diberdayakan, misalnya melalui peningkatan taraf pendidikan (membekali masyarakat ke arah berfikir rasional dan prestatif), peningkatan derajat kesehatan, serta peningkatan akses sumber kemajuan. *Ketiga*, berupaya mecegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, menciptakan keadilan dan kebersamaan antara yang sudah maju dan yang belum berkembang”.

Pemberdayaan menekankan pada tiga ketentuan tersebut jelas akan menjadi strategi unggulan dan akan berdampak positif terhadap menurunnya angka kemiskinan. Namun perlu diketahui terlebih dahulu potensi atau kekuatan yang dapat membantu proses perubahan agar dapat lebih cepat dan terarah, sebab tanpa adanya potensi atau kekuatan yang berasal dari masyarakat itu sendiri maka seseorang, kelompo, organisasi atau masyarakat akan sulit bergerak melakukan perubahan. Kekuatan pendorong ini didalam masyarakat harus ada atau bahkan diciptakan lebih dulu pada awal proses perubahan tersebut berlangsung.

Dalam kerangka pemberdayaan masyarakat yang terpenting adalah dimulai dengan bagaimana cara menciptakan kondisi, suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang, dalam

mencapai tujuan pemberdayaan, berbagai upaya dapat dilakukan melalui berbagai macam strategi, diantara strategi tersebut adalah pendidikan penyuluhan. Pendidikan penyuluhan berusaha untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat serta menanamkan jiwa kemandirian. Oleh karenanya konsep penyuluhan tidak berbeda jauh dari konsep pemberdayaan. Menurut Suriatna (1987:44) Peran pendidikan penyuluhan sangat penting sebagai bagian dari intervensi pihak luar komunitas kedalam komunitas tertentu.

“Penyuluhan merupakan suatu proses perubahan perilaku. Peran pendidikan penyuluhan sangat penting untuk membantu masyarakat di pedesaan yang tidak mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal, sehingga sebagai permasalahan usaha misalnya usaha tani di pedesaan yang tidak mampu dihadapi oleh masyarakat desa dapat dibantu pemecahannya dengan baik”.

Pendidikan penyuluhan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat berimplikasi sangat luas terhadap kondisi masyarakat sasaran, tidak terbatas pada aspek pengetahuan semata, namun juga menjurus pada adanya perubahan yang sifatnya menyeluruh, meliputi perubahan sikap mental yang mengarah pada tindakan atau perilaku yang menunjukkan produktivitas yang tinggi. Pendidikan dalam penyuluhan mengarahkan agar individu atau kelompok masyarakat sasaran dapat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan produktif, terutama yang berkaitan dengan penyuluhan kesehatan yang dijalankan. Dengan demikian implikasinya adalah program pendidikan penyuluhan harus terus menerus berkesinambungan.

Pemberdayaan masyarakat haruslah memberikan dampak yang positif bagi masyarakat yang diberdayakan.

Menurut Suharto (2010:58) Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*) dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Mengacu pada definisi dan teori para ahli di atas, dalam penelitian ini peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya sehingga masyarakat dapat mencapai kemandirian.

### **2.3.2 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat**

Suhendra (2006:88-96) dalam bukunya Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat membahas mengenai banyak pemikir dan ahli-ahli terutama dari disiplin sosial yang menyampaikan prinsip pemberdayaan. Suhendra mengacu pada 22 prinsip pemberdayaan yang dikutip dari Jim Ife, yaitu:

1. *Integrated Development*  
Masalah sosial adalah manusia dan lingkungan dalam arti luas. Oleh karenanya pengembangan masyarakat mencakup berbagai

aspek yaitu social, politik, ekonomi, budaya dan lingkungan, spiritual, semua hal ini mencerminkan aspek-aspek kehidupan masyarakat.

2. *Confronting Structural Disadvantage*

Struktur yang bertentangan akan melemahkan pengembangan masyarakat. Perbedaan-perbedaan kelas sosial, ras, suku, gender yang mengarah hambatan struktural hendaknya dapat dimasimalkan. Jika hal ini tidak dapat dihindari maka akan merupakan maslaah bagi pekerja masyarakat. Bahkan konflik-konflik sosial yang berkala relatif besar akan membawa kemunduran bukan kemajuan.

3. *Human Rights*

Dalam pengertian positif bahwa pengembangan masyarakat dapat menggunakan prinsip-prinsip HAM (Hak Asasi Manusia). Dengan hak asasi manusia, maka secara asasi hal-hal perorangan dilindungi, apalagi kelompok minoritas sekalipun. Dalam prinsip hak asasi manusia tidak dikenal penonjolan kelompok minoritas maupun mayoritas.

4. *Sustainability*

Dengan prinsip kesinambungan penggunaan sumber-sumber harus sehati-hati mungkin. Pengembangan masyarakat ditunjukkan untuk mengurangi ketergantungan kepada sumber-sumber yang dapat diperbaharui agar keseimbangan ekologi dapat terus dipelihara.

5. *Empowerment*

Penguasa atau pemberdayaan dilakukan dengan cara memberi sumber, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat untuk menentukan hari depannya sendiri.

6. *The Personal and Political*

Kepentingan individu secara aspiratif harus dapat sejalan dan mengkait dengan masalah umum dan politik. Masalah politik hendaknya menjadi bagian dari masalah individu dan sebaliknya. Awal dari kebijakan pemerintah adalah kemauan politik, oleh karenanya pemberdayaan masyarakat pendidikan politik masyarakat adalah penting sehingga terbentuk political minded maka masyarakat ikut berpartisipasi sejak tahap awal proses pembangunan.

7. *Community Ownership*

Prinsip ini menekankan bahwa pengembangan masyarakat mengkait dengan kepemilikan material maupun non material seperti struktur dan proses. Kepemilikan material agar masyarakat bertanggung jawab memanfaatkannya secara efektif dan efisien, sedangkan kepemilikan non material agar masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan pelayanan, ikut membuat keputusan-keputusan aktivitas-aktivitas setempat.



8. *Self Reliance*

Bahwa dengan menambahkan percaya diri dalam pengembangan masyarakat, diupayakan penggunaan sumber-sumber setempat: keuangan, teknik, sumber alam maupun sumber daya manusia.

9. *Independence from The State*

Prinsip ini menekankan pada kemampuan otonomi dan kepercayaan diri pada masyarakat dan meminimalkan bantuan dana dari pemerintah. Dana dari pemerintah jika diperlukan merupakan alternatif terakhir dan hal itu akan memberikan keleluasaan dalam masyarakat.

10. *Immediate Goals and Ultimate Visions*

Prinsip ke- 10 menyatakan bahwa selalu ada hubungan dan saling ketergantungan antara tujuan segera dan tujuan visioner. Tujuan jangka pendek dan jangka panjang ini merupakan hal penting dan esensial yang sejalan, bukan pertentangan.

11. *Organic Development*

Suatu cara untuk memudahkan penghayatan pada prinsip ini adalah membedakan antara konsep organis dan mekanis seperti membedakan antara tanaman dan mesin, antara masyarakat dan lingkungan. Pengembangan masyarakat adalah suatu yang kompleks dan dinamis, oleh karena memerlukan seni disamping ilmu semata. Dalam pemberdayaan masyarakat intinya akan tertuju kepada masyarakat walaupun demikian tidak boleh mengabaikan unsur-unsur lain yang pasti ikut mempengaruhi.

12. *The Pace of Development*

Prinsip ini menekankan agar langkah-langkah pengembangan masyarakat, dinamika percepatan serta irama pengembangan disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada di dalam masyarakat, agar masyarakat ikut memiliki dan bertanggung jawab. Pengembangan masyarakat merupakan proses belajar bagi masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat sepenuhnya harus diperankan sebagai subyek disamping sebagai obyek. Hal ini sangat diperlukan agar masyarakat tidak merasa asing di tengah-tengah masyarakatnya.

13. *External Expertise*

Keahlian dari luar yang mendesign dan membantu pengembangan masyarakat disertai sumber-sumber akan memberikan dampak yang kurang baik bagi pengembangan masyarakat setempat. Hal ini tidak berarti bahwa keberhasilan pengembangan masyarakat di tempat lain tidak perlu diperhatikan. Ahli pengembangan dari luar dapat saja dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan karakteristik setempat dan menyesuaikan.

14. *Community Building*

Bahwa semua pengembangan masyarakat adalah bertujuan untuk membangun masyarakat. Satu hal penting dalam membangun masyarakat adalah terciptanya interaksi sosial, kerja sama antar mereka, saling terbuka melalui komunikasi sosial.

15. *Proses and Outcome*

Kadang kala ada keinginan yang merupakan bias pembangunan untuk mencapai hasil yang sesegera mungkin melupakan proses yang melibatkan semua komponen masyarakat. Kegiatan seperti *kit and run* hanya sekali pukul mendapatkan hasil. Kelanjutan keberhasilan berikutnya sangat diragukan. Dengan hanya menekankan pada hasil maka kita melupakan pemberdayaan masyarakat, kita tidak memposisikan masyarakat sebagai subyek akan tetapi sebagai obyek pembangunan,

16. *The Integrity of Process*

Pengembangan masyarakat melalui suatu proses pertemuan-pertemuan, masyarakat didorong untuk menyampaikan dan mengambil keputusan. Adalah sesuatu yang baik apabila proses yang ternyata berhasil dalam pengembangan masyarakat dalam mempertahankan dan dipelihara. Melalui pertemuan-pertemuan dapat diidentifikasi kebutuhan masyarakat, cara mencapai tujuan yang diinginkan hingga didapatkan suatu konsensus.

17. *Non Violence*

Prinsip ini untuk menjamin bahwa didalam proses pengembangan masyarakat tidak terjadi kekerasan fisik diantara anggota masyarakat.

18. *Inclusiveness*

Pengembangan masyarakat harus menyertakan seluruh anggota masyarakat. Kadang-kadang pertentangan tidak dapat dihindari, akan tetapi upaya-upaya saling menghormati, saling menghargai yang merupakan nilai yang dimiliki masyarakat kiranya masih dapat dipertahankan.

19. *Konsensus*

Pengembangan masyarakat yang baik adalah apabila keputusan yang diambil untuk rencana-rencana kegiatan melalui suatu kesepakatan bersama "konsensus".

20. *Co-operation*

Prinsip kerjasama adalah sangat baik, dan kalau diperlukan untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat lain guna peningkatan ekonomi dan pemberian manfaat lainnya dalam jangka waktu yang lama. Bahkan kerjasama perlu diperluas sampai ketingkat nasional.

21. *Participation*

Didalam pengembangan masyarakat harus selalu diupayakan optimalisasi partisipasi. Setiap anggota masyarakat secara aktif

ikut dalam proses-proses kegiatan pengembangan. Akan tetapi partisipasi setiap individu berbeda-beda secara fungsi, kapasitas sesuai potensi dan kondisi masing-masing.

#### 22. *Definining Need*

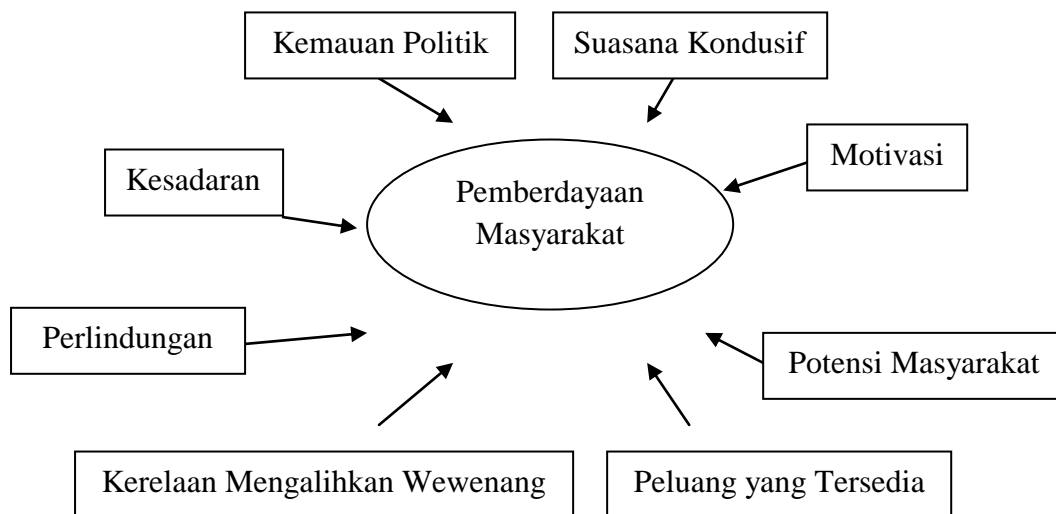
Prinsip pendefinisian kebutuhan adalah sangat penting dalam pengembangan masyarakat. Kebutuhan meliputi dua prinsip penting, yaitu:

- a. Pengertian kebutuhan masyarakat seutuhnya, konsumen, sumber daya.
- b. Kebutuhan yang bersifat progresif maupun regresif.

Berdasarkan pendapat di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan diri.

### **2.3.3 Unsur-Unsur dan Indikator Pemberdayaan**

Penerapan pemberdayaan harus diawali dengan melihat unsur-unsur dasar yang mendukung dalam sebuah pemberdayaan itu. Tanpa adanya dukungan dari unsur-unsur tersebut maka pemberdayaan yang direalisasikan akan sulit untuk berkembang. Unsur-unsur tersebut meliputi: Kemauan politik yang mendukung; Suasana kondusif untuk mengembangkan potensi secara menyeluruh; Motivasi; Potensi masyarakat; Peluang yang tersedia; Kerelaan mengalihkan wewenang; Perlindungan; Kesadaran (*awarness*) (Suhendra, 2006:87).



*(Sumber: Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat, (Suhendra,2006:87)*

### **Gambar 2.1**

#### **Indikator pemberdayaan**

Dalam hal ini, unsur-unsur pemberdayaan dapat dijadikan indikator terbentuknya sebuah standar umum untuk menciptakan pemberdayaan yang efektif dan efisien. Disisi lain, faktor subjek masyarakat sebagai pelaku yang berdaya mempunyai indikator khusus. Indikator merupakan ukuran yang digunakan untuk membandingkan perubahan keadaan atau kemajuan atau memantau hasil dari suatu kegiatan, proyek, atau program dalam rentang waktu tertentu. Melalui indikator dapat terlihat apakah pemberdayaan berjalan dengan baik atau tidak dengan membandingkan kriteria yang ditetapkan dengan realita yang terjadi. Menurut Onny S

Priyono dan AMW Pranarka (1996:15) pemberdayaan sendiri dapat diukur dengan:

1. Pengetahuan masyarakat.
2. Kemandirian masyarakat, adalah kebebasan dan kemampuan anggota masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri dengan merubah dirinya sendiri atas dasar kekuatan dirinya meliputi:
  - a. Kemampuan dalam mengelola sumber-sumber daya yang ada pada dirinya.
  - b. Kemampuan untuk meminimalisir ketergantungan dan pengaruh dari pihak lain.
  - c. Kemampuan untuk menentukan pilihannya sendiri.
3. Aktualisasi diri, yaitu kemampuan individu untuk menampilkan potensi yang dimilikinya sehingga ia dapat dihargai oleh orang lain, yang meliputi:
  - a. Kemampuan individu untuk mengeluarkan pendapatnya diberbagai media.
  - b. Kemampuan untuk dapat melihat peluang yang ada bagi kepentingan pribadi atau masyarakat secara keseluruhan.

Konsep pemberdayaan di atas, jika dijabarkan lebih jauh lagi, akan mencakup pada masalah kemandirian, peningkatan kreatifitas dan kemampuan berkomunikasi dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapinya pada pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Berbeda halnya dengan pendapat Schuler, Hashemi, dan Riley yang dikutip oleh Suharto (2005:63-66), mereka berpendapat bahwa berhasilnya suatu pemberdayaan dapat diukur dengan indikator keberdayaan, yaitu:

1. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi keluar rumah, ketempat ibadah, pasar, fasilitas medis. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi apabila, setiap individu mampu pergi sendiri.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan dirinya
3. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier. Seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah , pakaian keluarga.

4. Terlibat dalam pembuatan keputusan–keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga.
5. Kemampuan relative dari dominasi.
6. Kesadaran hukum dan politik: minimal mengetahui nama salah seorang dari pegawai kantor kelurahan maupun desa tempat bermukim.
7. Keterlibatan dalam maupun protes–protes: seorang akan dianggap berdaya apabila ia terlibat dalam kampanye.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga, memiliki tanah, rumah dan aset maupun tabungan.

Sementara itu Suhendra (2006:86) dalam konteks masyarakat sebagai subjek dari pemberdayaan menyebutkan, bahwa keberdayaan itu dapat dilihat melalui:

1. Kemampuan menyiapkan dan menggunakan pranata dan sumber-sumber yang ada dimasyarakat
2. Dapat berjalannya “*bottom planning*”
3. Kemampuan dan aktivitas ekonomi
4. Kemampuan menyiapkan haridepan keluarga
5. Kemampuan menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa adanya tekanan.

Melalui pemberdayaan yang diupayakan, diharapkan dapat menciptakan kemampuan dan kekuatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan guna mencapai kesejahteraan.

#### **2.3.4 Strategi Pemberdayaan**

Istilah strategi secara etimologi berasal dari kata *Strategos* atau *strategus* dengan kata jamak strategi. *Strategus* yang dalam bahasa Yunani kuno adalah Jendral, atau juga disebut dengan perwira negara dengan fungsi yang luas. Sedangkan menurut Bintoro dan Mustopadidjaja (1980:5), strategi diartikan sebagai:

“Seluruh langkah perhitungan yang pasti, guna mencapai suatu tujuan atau untuk mengatasi suatu persoalan. Strategi dapat dipandang sebagai dasar seluruh rencana, yang meliputi tiga aspek, yaitu penentuan tujuan, macam-macam perumusan kebijakan dan operasionalisasi pelaksanaan, yang semuanya ditentukan oleh nilai-nilai masyarakat yang dianut, sehingga pilihan-pilihan alternatifnya tidak bebas dari kecenderungan nilai”.

Strategi memiliki elemen-elemen seperti yang dikatakan oleh Salusu (2006:88), yaitu:

1. Seni situasional
2. Tujuan dan sasaran
3. Produk, keunggulan kompetitif
4. Pola keputusan
5. Kebijakan dan program
6. Destinasi
7. Sumber daya dan lingkungan
8. Program bertindak
9. Formulasi strategi, arus keputusan
10. Deceptive device
11. Pemimpin

Strategi pemberdayaan masyarakat digunakan dalam pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat. Pendekatan ini menyadari tentang betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal yang ditempuh melalui kesanggupan melakukan kontrol internal atas sumber daya materi dan nonmateri yang penting melalui redistribusi modal atau kepemilikan.

Edi Suharto (2009:66-67) dalam bukunya membangun masyarakat, Memberdayakan Masyarakat menjelaskan strategi pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga Pendekatan atau mantra pemberdayaan (*empowerment setting*), yaitu: mikro, mezzo dan makro.

1. Pendekatan Mikro. Pemberdayaan dilakukan secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*)
2. Pendekatan mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok media sebagai intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi
3. Pendekatan makro. Pendekatan ini sering disebut dengan Strategi Sistem Besar, karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepay untuk bertindak.

Dari berbagai pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi pemberdayaan adalah upaya atau cara dalam mencapai tujuan pemberdayaan atau upaya berencana yang dirancang untuk merubah atau membuat suatu kondisi ketidakberdayaan menjadi berdaya yang menitikberatkan pada pembinaan potensi dan kemandirian masyarakat.

### **2.3.5 Tujuan Pemberdayaan**

Setiap proses pemberdayaan mensyaratkan bahwa perubahan dalam masyarakat dapat dilakukan secara optimal bila melibatkan partisipasi aktif yang luas disemua spektrum masyarakat tingkat lokal, baik dalam tahap penentuan tujuan maupun pelaksanaan tindakan perubahan. Adapun tujuan utama pemberdayaan menurut Edi Suharto (2009:60):



“adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misal persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil)”.

Dalam kaitannya dengan tujuan pemberdayaan yaitu memperkuat kekuasaan, kekuasaan disini mempunyai beberapa maksud tertentu. Pada hakekatnya pemberdayaan merupakan upaya pemberian kuasa dan kemampuan kepada masyarakat terutama kelompok marginal. Menurut Ife dalam Suharto (2009:59) kekuasaan sebagai tujuan pemberdayaan, diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal pekerjaan.
2. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
3. Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas tanpa ada tekanan.
4. Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
5. Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
6. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
7. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Dari penjelasan di atas maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa tujuan pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan dan ketidakberdayaan

## 2.4 Tinjauan Konsep Kesejahteraan Sosial

### 2.4.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial menurut Suparlan (Suud, 2006:5) adalah keadaan sejahtera pada umumnya, yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah dan sosial dan bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu saja; jadi merupakan suatu keadaan dan kegiatan. Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjuk pada segenap aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung (*diadvantaged groups*) (Suharto, 2005:3).

Dalam Undang-Undang No 11 tahun 2009 Pasal 1 tentang kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pasal tersebut menjelaskan bahwa untuk terpenuhinya kebutuhan hidup, baik secara materil maupun spritual mereka harus mempunyai kemampuan untuk bekerja dan mengembangkan diri supaya mereka mampu hidup layak dan dapat diterima di tengah masyarakat.

Kemudian menurut Segal dan Bruzuzy dalam Suud (2006:5) kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat. Kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Selain itu, kesejahteraan sosial menurut Midgel dalam Suud (2006:5) adalah suatu keadaan sejahtera secara sosial tersusun dari tiga unsur sebagai berikut: Pertama, setinggi apa masalah-masalah sosial yang dikendalikan. Kedua, seluas apa kebutuhan-kebutuhan terpenuhi. Dan ketiga, setinggi apa kesempatan-kesempatan untuk maju tersedia. Tiga unsur ini berlaku bagi individu-individu, keluarga-keluarga, komunitas-komunitas, dan bahkan seluruh masyarakat.

Dari berbagai pengertian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan material seseorang sehingga orang tersebut mampu hidup dengan layak dan mampu mengembangkan diri serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

#### **2.4.2 Fungsi Kesejahteraan Sosial**

Menurut Sumarnonugroho dalam Suharto (2009:43) kesejahteraan sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi penyembuhan dan pemulihan (*kuratif/remedial* dan *rehabilitatif*).

Fungsi penyembuhan dapat bersifat represif artinya bersifat menekan agar masalah sosial yang timbul tidak makin parah dan tidak menjalar. Fungsi pemulihan (*rahabilitatif*) terutama untuk menanamkan dan menumbuhkan fungsionalitas kembali dalam diri orang maupun anggota masyarakat. Fungsi penyembuhan dan pemulihan bertujuan untuk meniadakan hambatan-hambatan atau masalah sosial yang ada.

2. Fungsi pencegahan (*preventif*).

Dalam hal ini meliputi langkah-langkah untuk mencegah agar jangan sampai timbul masalah sosial baru, juga langkah-langkah untuk memelihara fungsionalitas seseorang maupun masyarakat.

3. Fungsi pengembangan (*promotif, developmental*).

Untuk mengembangkan kemampuan orang maupun masyarakat agar dapat lebih meningkatkan fungsionalitas mereka sehingga dapat hidup secara produktif.

4. Fungsi penunjang (*suportif*).

Fungsi ini menopang usaha-usaha lain agar dapat lebih berkembang. Meliputi kegiatan-kegiatan yang dapat memperlancar keberhasilan program-program lainnya seperti bidang kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, pertanian dan sebagainya.

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan perubahan-perubahan sosial ekonomi serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 2.5 Definisi dan Konsep Kemiskinan

Menurut Suharto (2004:7-8) kemiskinan merupakan konsep dan fenomena yang berwayuh wajah, bermatra dimensional, misalnya menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki beberapa ciri:

1. ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).
2. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal.
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber alam.
6. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.

7. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

Dengan menggunakan perspektif yang lebih luas lagi. David Cox membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi:

1. kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan yang kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju. Sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan).
3. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.
4. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.  
(Cox David, 2004:1-6)

Ellis dalam Suharto (2009:133) menyatakan bahwa dimensi kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya dalam konteks ini menyangkut tidak hanya aspek finansial, melainkan pula semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Berdasarkan konsepsi ini, maka kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan

persediaan sumberdaya yang dimiliki melalui penggunaan standar baku yang dikenal dengan garis kemiskinan (*poverty line*). Cara seperti ini sering disebut dengan metode pengukuran kemiskinan absolut. Garis kemiskinan yang digunakan BPS sebesar 2.100 kalori per orang per hari yang disetarakan dengan pendapatan tertentu atau pendekatan Bank Dunia yang menggunakan 1 Dollar AS per orang per hari adalah contoh pengukuran kemiskinan absolut.

BPS dan Depsos (2002:4) mengemukakan bahwa:

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang. Namun demikian, secara luas kemiskinan juga kerap didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan: kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat (SMERU dalam Suharto, 2009:134). Definisi kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar seperti ini diterapkan oleh Depsos, terutama dalam mendefinisikan fakir miskin. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002:3).

Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (*power*). Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. Ada tiga pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan akses terhadap kekuasaan ini, yaitu (*a*) bagaimana orang dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam masyarakat, (*b*) bagaimana orang dapat turut ambil bagian dalam pembuatan keputusan penggunaan sumberdaya yang tersedia, dan (*c*) bagaimana kemampuan untuk untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Dalam konteks politik ini Friedman dalam Suharto (2004:135) mendefinisikan kemiskinan dalam kaitannya dengan ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasi basis kekuasaan sosial yang meliputi:

- a. Modal produktif atau asset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan).
- b. Sumber keuangan (pekerjaan, kredit).
- c. Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi soisal).
- d. Jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa.
- e. Pengetahuan dan keterampilan.
- f. Informasi yang berguna untuk kemajuan hidup.

Kemiskinan secara sosial-psikologis menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. Dimensi kemiskinan ini juga dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah atau merintangikan seseorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat. Faktor-faktor penghambat

tersebut secara umum meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal datang dari dalam diri si miskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan atau adanya hambatan budaya. Teori “kemiskinan budaya” (*cultural poverty*) yang dikemukakan oleh Oscar Lewis, misalnya, menyatakan bahwa kemiskinan dapat muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya. Faktor eksternal datang dari luar kemampuan orang yang bersangkutan, seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang dalam memanfaatkan sumberdaya. Kemiskinan model ini seringkali diistilahkan dengan kemiskinan struktural. Menurut pandangan ini, kemiskinan terjadi bukan dikarenakan “ketidakmampuan” sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja.

Dari berbagai definisi di atas peneliti dapat menari kesimpulan bahwa kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi atau layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan dan transportasi.

## **2.6 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS adalah seseorang,



keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunasosialan keterbelakangan, keterasingan atau ketertinggalan dan bencana alam maupun bencana sosial.

Renstra Dinsos Kota Cilegon (2014:22-34) dijelaskan secara terinci definisi operasional dan karakteristik dari masing-masing jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu sebagai berikut:

1. Anak Balita Terlantar, adalah anak yang berusia 0-4 tahun karena sebab tertentu, orangtuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan: miskin atau tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang atau keduanya-duanya meninggal, anak balita sakit) sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani, rohani dan sosial.
2. Anak Terlantar, adalah anak berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu orangtuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu, salah seorang dari orangtuanya atau kedua-duanya sakit, salah seorang atau kedua-duanya meninggal, karena tidak harmonis, tidak ada pengasuh atau pengampu) sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial.
3. Anak Nakal, adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang berperilaku menyimpang dari norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, lingkungannya sehingga merugikan dirinya, keluarganya dan orang lain, serta mengganggu ketertiban umum, akan tetapi karena usia belum dapat dituntut secara hukum.
4. Anak Jalanan, adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun tempat-tempat umum.
5. Wanita Rawan Sosial Ekonomi, adalah seorang wanita dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

6. Korban Tindak Kekerasan, adalah seseorang yang mengalami tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan terdekatnya, dan terancam baik secara fisik maupun non fisik.
7. Lanjut Usia Terlantar, adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani dan sosial.
8. Penyandang Cacat, adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik dan mental.
9. Tuna Susila, adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
10. Pengemis, adalah orang-orang yang mendapat penghasilan memintaminta di tempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan balas kasihan dari orang lain.
11. Gelandangan, adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
12. Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK), adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupan secara normal.
13. Korban Penyalahgunaan NAPZA, adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras diluar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
14. Keluarga Fakir Miskin, adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.
15. Keluarga Berumah Tidak Layak Huni, adalah keluarga yang kondisi perumahan dan lingkungan tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.
16. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, adalah keluarga yang hubungan antar keluarganya terutama antara suami istri kurang serasi,

sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

17. Komunitas Adat Terpencil, kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan “kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas.
18. Korban Bencana Alam, adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana alam yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Termasuk dalam korban bencana alam adalah korban bencana gempa bumi tektonik, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, gelombang pasang atau tsunami, angin kencang, kekeringan, dan kebakaran hutan atau lahan, kebakaran pemukiman, kecelakaan pesawat terbang, kereta api, perahu dan musibah industri (kecelakaan kerja).
19. Korban Bencana Sosial atau Pengungsi, adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana sosial kerusuhan yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.
20. Pekerja Migran Terlantar, adalah seseorang yang bekerja di luar tempat asalnya dan menetap sementara di tempat tersebut dan mengalami permasalahan sosial sehingga menjadi terlantar.
21. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), adalah seseorang dengan rekomendasi profesional (dokter) atau petugas laboratorium terbukti tertular virus HIV sehingga mengalami sindrom penurunan daya tahan tubuh (AIDS) dan hidup terlantar.
22. Keluarga Rentan, adalah keluarga muda yang baru menikah (sampai dengan lima tahun usia pernikahan) yang mengalami masalah sosial dan ekonomi (berpenghasilan sekitar 10% di atas garis kemiskinan) sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Dari penjelasan di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah orang yang memiliki hambatan atau kesulitan dalam melakukan fungsi sosialnya yang diakibatkan berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunasosialan keterbelakangan, keterasingan atau ketertinggalan dan bencana alam maupun bencana sosial

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan dalam penelitian ini dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti, diantaranya :

1. Penelitian (Penelitian Evaluasi) Kementerian Sosial RI Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial oleh Drs.Suradi, M.Si, Dra. Sri Gati Setiti, M.Si, Dra. Nunung Unayah, dan Muslim Sabarisman, AKS pada tahun 2010, dengan judul Pemberdayaan Keluarga (Studi Evaluasi AKSK di Sulawesi Utara, Sumatra Barat, Kalimantan Selatan dan Jawa Timur). Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual, yaitu: konteks, input, proses dan produk. Metode penelitian menggunakan kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif dengan desain *pta-eksperimen*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program AKSK memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lokal, masih adanya ego sektoral, namun untuk dukungan masyarakat memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggara AKSK dan sekaligus sudah memanfaatkan kegiatan AKSK.
2. Penelitian (Skripsi) Fisip Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang dilakukan oleh Reiza Rusman Wijayan tahun 2012, dengan judul Evaluasi Program Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga (AKSK) di Kecamatan Walantaka Kota Serang. Pada peneliti tersebut peneliti menggunakan teori Evaluasi William N Dunn, yaitu: (1) Efektivitas, (2) Efisiensi, dan (3) Kecukupan. Teknik pengumpulan data yang

digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Metode penelitian menggunakan teknik analisis menurut Miles dan Huberman. Sedangkan untuk menguji validitas menggunakan triangulasi dan membercheck. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi Program Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga (AKSK) di Kecamatan Walantaka Kota Serang kurang dirasakan pengaruhnya oleh masyarakat karena jenis bantuan yang diberikan ada yang tidak sesuai dengan pengajuan serta harapan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian, dalam pelaksanaan Program AKSK di Kecamatan Walantaka Kota Serang memiliki hambatan, yaitu: kurangnya koordinasi dan adanya unsur nepotisme yang ditemukan dalam penyelenggaraan program tersebut.

3. Penelitian (Skripsi) Fisip Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang dilakukan oleh Nitha Chitrasari tahun 2012, dengan judul. Kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Cilegon. Pada penelitian tersebut peneliti menggunakan teori Dwiyanto, dkk, yaitu: (1) Produktivitas, (2) Kualitas Layanan, (3) Responsivitas, (4) Responsibilitas, dan (5) Akuntabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Cilegon masih belum optimal.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan judul Manajemen Program Pemberdayaan Keluarga Rentan di Dinas Sosial Kota Cilegon. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Fungsi Manajemen menurut Gullick dalam Handayani (2011:13), diantaranya: Perencanaan, Pengorganisasian, Penyusunan Pegawai, Pembinaan Kerja, Pengkoordinasian, Pelaporan dan Anggaran. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Untuk lebih jelas terhadap penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang akan**  
**dilakukan oleh Peneliti**

| Item                 | Kementerian Sosial RI<br>Badan Pendidikan dan<br>Penelitian<br>Kesejahteraan Sosial  | Reiza<br>Suherman   | Nitha Chitrasari   | Peneliti  |
|----------------------|--|---|--|---|
| Judul                | Pemberdayaan Keluarga<br>(Studi Evaluasi AKSK<br>di Sulawesi Utara,<br>Sumatra Barat,<br>Kalimantan Selatan dan<br>Jawa Timur)   | Evaluasi<br>Program<br>Asistensi<br>Kesejahteraan<br>Sosial (AKSK)<br>di Kecamatan<br>Walantaka Kota<br>Serang  | Kinerja Dinas<br>Sosial dalam<br>Penanganan<br>Gelandangan dan<br>Pengemis di Kota<br>Cilegon  | Manajemen Program<br>Pemberdayaan<br>Keluarga Rentan di<br>Dinas Sosial Kota<br>Cilegon   |
| Tahun                | 2010   | 2012  | 2012   | 2015  |
| Tujuan<br>Penelitian | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diketuainya aspek kontek, input, dan proses dalam program pemberdayaan keluarga melalui Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga (AKSK).</li> <li>2. Diketuainya pengaruh kegiatan AKSK terhadap kesejahteraan keluarga.</li> <li>3. Diketuainya faktornya penghambat dan pendukung yang mempengaruhi kegiatan AKSK.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengetahui dampak yang terjadi pada masyarakat penerima bantuan pasca program AKSK.</li> <li>2. Untuk mengetahui proses pengawasan terhadap program AKSK.</li> <li>3. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program AKSK.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui bagaimana Kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Cilegon.</li> <li>2. Untuk mengetahui hal apa saja yang menjadi hambatan Dinas Sosial Kota Cilegon dalam menangani gelandangan dan pengemis di Kota Cilegon.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui bagaimana Manajemen Program Pemberdayaan Keluarga Rentan di Dinas Sosial Kota Cilegon.</li> <li>2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan Dinas Sosial Kota Cilegon dalam melaksanakan program pemberdayaan keluarga rentan di Kota Cilegon.</li> </ol> |
| Teori                | Teori Evaluasi oleh Stufflebeam  | Teori Evaluasi oleh William N Dunn  | Teori Kinerja oleh Dwiyanto, dkk   | Teori Fungsi Manajemen oleh Luther Gullick  |

| Metode Penelitian | Kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif dengan desain pra-eksperimen   | Kualitatif Deskriptif   | Kualitatif Deskriptif  | Kualitatif Deskriptif  |
|-------------------|--|---|--|--|
| Asumsi Dasar      | Ho = Tidak ada pengaruh kegiatan AKSK terhadap kesejahteraan keluarga.<br>H1 = Ada pengaruh kegiatan AKSK terhadap kesejahteraan keluarga.   | Evaluasi Program Asistensi Kesejahteraan Sosial (AKSK) di Kecamatan Walantaka Kota Serang dapat dikatakan belum berhasil meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. | Kinerja Dinas Sosial dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Cilegon dapat dikatakan belum maksimal. | Manajemen Program Pemberdayaan Keluarga Rentan di Dinas Sosial Kota Cilegon dapat dapat dirasakan secara optimal dalam melaksanakan program kesejahteraan dalam memberdayakan keluarga rentan di Kota Cilegon. |
| Hasil Penelitian  | Pelaksanaan program AKSK memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lokal, masih adanya ego sektoral, namun untuk dukungan masyarakat memberikan dukungan penuh terhadap program AKSK dan sekaligus sudah memanfaatkan kegiatan AKSK  | Evaluasi Program Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga (AKSK) di Kecamatan Walantaka Kota Serang kurang dirasakan pengaruhnya oleh masyarakat.                        | Kinerja Dinas Sosial dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Cilegon masih belum maksimal.           | —  |
| Perbedaan         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua Peneliti melakukan penelitian di tahun yang berberda.</li> <li>2. Semua Peneliti memiliki tujuan penelitian yang berbeda.</li> <li>3. Setiap Peneliti memiliki focus dan locus penelitian yang berbeda.</li> </ol>   |   |  |  |
| Persamaan         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap peneliti menggunakan metode penelitian yang sama, yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif, walaupun Kementerian RI Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial menggunakan kombinasi metode penelitian.</li> <li>2. Semua peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang sama, yaitu dengan observasi, wawancara dan studi pustaka.</li> <li>3. Locus penelitian yang sama antara peneliti Nitha Cithrasari dengan peneliti sendiri, yaitu di Dinas Sosial Kota Cilegon.</li> </ol> |   |  |  |

(Sumber: Peneliti, 2015)



## 2.8 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca. Maka, berdasarkan judul penelitian tersebut kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu dimana Manajemen Program Pemberdayaan di Dinas Sosial cukup penting dalam memberdayakan keluarga rentan, Manajemen Program Pemberdayaan dalam penelitian ini merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial demi mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan untuk masyarakat khususnya keluarga rentan, sedangkan pemberdayaan itu sendiri merupakan upaya memberikan daya kepada keluarga rentan dengan diharapkannya peningkatan kesejahteraan hidupnya baik sosial maupun ekonomi dan juga salah upaya dalam menangani masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjadi di Kota Cilegon.

Dinas Sosial Kota Cilegon merupakan pelaksana program kesejahteraan. Untuk melihat sejauh mana program yang dilakukan Dinas Sosial Kota Cilegon dalam pemberdayaan keluarga rentan di Kota Cilegon dilakukan dengan mengadakan berbagai program dalam suatu kebijakan yang telah disusun sedemikian rupa agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga rentan di Kota Cilegon.

Ada beberapa poin yang menjadi titik acuan untuk mengetahui Manajemen Pemberdayaan oleh Dinas Sosial dengan menggunakan indikator fungsi manajemen menurut Gullick dalam Handayani (2001:24), diantaranya:

Perencanaan, Pengorganisasian, Penyusunan Pegawai, Pembinaan Kerja, Pengkoordinasian, Pelaporan dan Anggaran. Dalam hal ini, Manajemen Program Pemberdayaan Keluarga Rentan di Dinas Sosial Kota Cilegon dilakukan dengan mengadakan berbagai program yang telah disusun sedemikian rupa agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga rentan. Maka alur berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

MANAJEMEN PROGRAM PEMBERDAYAAN KELUARGA RENTAN DI  
DINAS SOSIAL KOTA CILEGON



Permasalahan:

1. Belum tercapainya target atau tujuan yang dibuat oleh Dinas Sosial Kota Cilegon dalam program pemberdayaan sosial khususnya pemberdayaan keluarga rentan.
2. Tidak adanya struktur formal di Dinas Sosial Kota Cilegon pada proses pengorganisasian atau pembagian masing-masing pekerjaan dalam program pemberdayaan sosial.
3. Kurangnya personil atau Sumber Daya Manusia di Dinas Sosial dalam proses penyusunan pegawai untuk pelaksanaan program pemberdayaan sosial dan personil tersebut tidak memiliki latar belakang sosial.
4. Minimnya pembinaan kerja yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Cilegon kepada staff pelaksana yang bukan berasal dari latar belakang sosial dan kepada keluarga rentan di Kota Cilegon.
5. Sulitnya melakukan koordinasi antara Dinas Sosial Kota Cilegon dengan keluarga rentan.
6. Kurangnya pemahaman teknologi oleh keluarga rentan dalam pembuatan laporan keuangan yang harus diserahkan ke Dinas Sosial Kota Cilegon.
7. Kurangnya bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada setiap kelompok keluarga rentan.



Fungsi Manajemen:

1. Perencanaan (*Planning*)
  2. Pengorganisasian (*Organizing*)
  3. Penyusunan Pegawai (*Staffing*)
  4. Pembinaan Kerja (*Directing*)
  5. Pengkoordinasian (*Coordinating*)
  6. Pelaporan (*Reporting*)
  7. Anggaran (*Budgeting*)
- Gullick dalam Handayaniingrat (2001:24)



Output:

Meningkatkan kesejahteraan keluarga rentan di Kota Cilegon dan berkurangnya tingkat kemiskinan di Kota Cilegon

**Gambar 2.2**  
**Alur Berpikir**

## **2.9 Asumsi Dasar**

Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, peneliti telah melakukan observasi awal terhadap objek penelitian. Maka peneliti berasumsi bahwa penelitian tentang Manajemen Pemberdayaan Keluarga Rentan oleh Dinas Sosial Kota Cilegon dalam realitasnya ternyata belum dapat dirasakan secara optimal dalam melaksanakan program kesejahteraan dalam memberdayakan keluarga rentan di Kota Cilegon.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Penelitian merupakan usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang digunakan untuk mengetahui metode ilmiah (Hadi, 1984:4). Penentuan suatu metode yang digunakan dalam penelitian akan menemukan kadar ilmiah hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci (Ridwan, 2005:51), sedangkan bentuknya yaitu dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang merupakan metode yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Dalam prakteknya tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan klasifikasi data saja tetapi juga menganalisis dan menginterpretasikan tentang arti data tersebut. Itulah alasan mengapa peneliti mengambil penelitian kualitatif.

Dengan demikian melalui penelitian kualitatif deskriptif ini peneliti hanya berusaha untuk menggambarkan permasalahan yang ada dalam kaitannya dengan “Manajemen Program Pemberdayaan Keluarga Rentan di Dinas Sosial Kota Cilegon”.

## 3.2 Variabel Penelitian

### 3.2.1 Definisi Konsep

Pengertian proses berarti serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai berakhirnya sasaran atau tercapainya tujuan, sedangkan fungsi adalah tugas atau kegiatan. Akan tetapi perkataan proses dan fungsi dalam hal manajemen mempunyai pengertian yang sama.

Menurut Luther Gullick dalam Handyaningrat (2001:24) proses daripada administrasi dan manajemen (*The Process of Administration and Management*) yang terkenal dengan akronim (POSDCORB) adalah:

1. Perencanaan (*Planning*). Perencanaan adalah perincian dalam garis besar untuk memudahkan pelaksanaannya dan metode yang digunakan dalam menyelesaikan maksud atau tujuan badan usaha itu.
2. Pengorganisasian (*Organizing*). Menetapkan struktur formal daripada kewenangan dimana pekerjaan dibagi-bagi sedemikian rupa, ditentukan dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyusunan Pegawai (*Staffing*). Keseluruhan fungsi daripada kepegawaian sebagai usaha pelaksanaannya, melatih para staf dan memelihara situasi pekerjaan yang menyenangkan.
4. Pembinaan Kerja (*Directing*). Merupakan tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan, yang berwujud suatu perintah khusus atau umum dan instruksi-instruksi, dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu badan usaha atau organisasi.
5. Pengkoordinasian (*Coordinating*). Merupakan kewajiban yang penting untuk menghubungkan berbagai-bagai kegiatan daripada pekerjaan.
6. Pelaporan (*Reporting*). Dalam hal ini pimpinan yang bertanggung jawab harus mengetahui apa yang sedang dilakukan, baik bagi keperluan pimpinan maupun bawahannya melalui catatan, penelitian maupun inspeksi.
7. Anggaran (*Budgeting*). Semua kegiatan akan berjalan dengan baik bila disertai dengan usaha pembiayaan dalam bentuk anggaran, perhitungan anggaran dan pengawasan anggaran.

### 3.2.2 Definisi Operasional

Definisi Operasional yang merupakan penjabaran konsep atau variabel penelitian dalam rincian yang terukur (indikator penelitian), dibawah ini adalah penjabaran konsep tabel variabel penelitian:

**Tabel 3.1**  
**Variabel Operasional**

| <b>Variabel</b>   | <b>Indikator</b>   |
|---|--|
| Manajemen<br>(Gullick dalam<br>Handyaningrat,<br>2001:24) | 1. Pengawasan ( <i>Planning</i> )<br>2. Pengorganisasian ( <i>Organizing</i> )<br>3. Penyusunan Pegawai ( <i>Staffing</i> )<br>4. Pembinaan Kerja ( <i>Directing</i> )<br>5. Pengkoordinasian ( <i>Coordinating</i> )<br>6. Pelaporan ( <i>Reporting</i> )<br>7. Anggaran ( <i>Budgeting</i> ) |

### 3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Menurut Irawan (2006:17) satu-satunya instrument terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti rekaman dan kamera. Tetapi alat-alat tersebut benar-benar tergantung kepada peneliti yang menggunakannya.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Peneliti merupakan *key instrument* atau alat penelitian utama. Dialah yang mengadakan sendiri pengamatan atau wawancara tidak terstruktur, dalam penelitian kualitatif peneliti melihat sendiri objek dan subjek yang sedang ditelitinya, selain itu peneliti juga mampu menyimpulkan kapan penyimpulan data telah mencakupi, data telah jenuh dan kapan penelitian di hentikan dan peneliti juga dapat langsung melaksanakan pengumpulan data.

Data primer adalah data yang berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dari hasil wawancara dan observasi. Data yang diperoleh dari pegawai Dinas Sosial Kota Cilegon dan keluarga rentan di Kota Cilegon. Sedangkan data sekunder adalah data tambahan yang didapatkan berupa dokumen tertulis. Adapun alat-alat tambahan yang digunakan dalam pengumpulan data terdiri dari pedoman wawancara, alat perekam dan buku catatan. Selain itu, dilengkapi data-data penunjang seperti profil Dinas Sosial, tupoksi setiap bidang.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah:

#### **3.4.1 Wawancara Mendalam**

Menurut Irawan (2006:59) metode wawancara merupakan suatu alat pengumpulan data yang digunakan dengan instrumen lainnya. Tetapi metode wawancara merupakan satu-satunya alat yang diperlukan berpusat



pada informan (responden). Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam. Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara tidak terstruktur dimana pertanyaan yang telah disusun disesuaikan dengan keadaan dan cirri yang unik dari informan dan pelaksanaan wawancara mengalir seperti percakapan sehari-hari.

Adapun kisi-kisi pertanyaan tidak terstruktur pada penelitian ini disusun bukan berupa daftar pertanyaan, akan tetapi hanya berupa poin-poin pokok yang akan ditanyakan pada informan dan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar proses wawancara berlangsung secara alami dan mendalam seperti yang diharapkan yaitu tentang manajemen pemberdayaan keluarga rentan oleh Dinas Sosial Kota Cilegon, program-program dalam pemberdayaan keluarga rentan serta bantuan sosial yang diberikan Dinas Sosial Kota Cilegon.

#### **3.4.2 Pengamatan/Observasi**

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi non partisipan yang artinya dimana peneliti terjun langsung ke lapangan namun tidak terlibat secara langsung dengan objek penelitian, peneliti hanya melakukan pengamatan langsung terhadap objek-objek yang diteliti, kemudian dari pengamatan tersebut melakukan pencatatan-pencatatan data-data yang diperoleh yang berkaitan dengan aktivitas penelitian. Sehubungan dengan

itu Hadi dalam Moleong (1990:32) mengartikan observasi sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidikinya. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu keluarga rentan yang berada di beberapa Kecamatan di Kota Cilegon.

### **3.4.3 Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi didapat dari dokumen resmi pemerintah. Dimana peneliti akan menggunakan teknik dokumentasi atau *library research*. Prinsip teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menggali data dokumen yang telah tersedia dalam perpustakaan.

Dokumen tidak hanya catatan peristiwa saat ini dan yang akan datang, namun juga catatan masa lalu. Data-data yang didapat peneliti berupa diagram, gambar ataupun tabel dari data kantor Dinas Sosial Kota Cilegon serta foto-foto objek penelitian. Dokumen resmi yang didapat antara lain, Renstra Kerja Dinas Sosial Kota Cilegon 2014, Cilegon dalam angka tahun 2011-2014, dan tupoksi pegawai.

### **3.5 Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive* yaitu informan-informan yang peneliti temukan dimana informan ini merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam

penelitian ini, karena mereka (informan) dalam kesehariannya senantiasa berurusan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Deskripsi informan yaitu menggambarkan secara umum informan-informan yang diambil sebagai narasumber yang tentunya berhubungan dengan objek yang diteliti. Sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga data dan informasi yang diambil mencapai taraf jenuh dalam penelitian kualitatif ini. Dalam sebuah penelitian sosial dengan metode kualitatif informan menjadi salah satu hal yang sangat penting. Dalam penelitian ini yang akan menjadi informan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

**Tabel Informan**

| <b>No</b> | <b>Kode Informan</b> | <b>Informan</b>                              | <b>Keterangan</b>  |
|-----------|----------------------|--|--------------------|
| 1         | I <sub>1</sub>       | Kasubag Program dan Evaluasi                 | Key Informan       |
| 2         | I <sub>2</sub>       | Kabid Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial | Key Informan       |
| 3         | I <sub>3</sub>       | Kasi Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial  | Key Informan       |
| 4         | I <sub>4</sub>       | Staff Pelaksana                              | Key Informan       |
| 5         | I <sub>5</sub>       | Tenaga Kerja Sosial Kecamatan                | Key Informan       |
| 6         | I <sub>6</sub>       | Keluarga Rentan                              | Secondary Informan |

*(Sumber: Peneliti, 2015)*

### **3.6 Pedoman Wawancara**

Pedoman wawancara merupakan alur atau pedoman bagi peneliti dalam melakukan wawancara dengan informan. Pedoman wawancara ini disusun untuk memudahkan peneliti dalam proses wawancara yang akan dilakukan. Pedoman wawancara tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.3**  
**Pedoman Wawancara**

| <b>No</b> | <b>Kisi-Kisi Pertanyaan</b>  | <b>Informan</b>                                     |
|-----------|--|---|
| 1         | Bagaimana perencanaan Dinas Sosial Kota Cilegon dalam program pemberdayaan keluarga rentan?  | Dinas Sosial Kota Cilegon dan TKSK                  |
| 2         | Bagaimana pengorganisasian Dinas Sosial Kota Cilegon dalam program pemberdayaan keluarga rentan?   |   |
| 3         | Bagaimana penyusunan pegawai Dinas Sosial Kota Cilegon dalam program pemberdayaan keluarga rentan?   |   |
| 4         | Bagaimana pembinaan kerja yang dilakukan Dinas Sosial Kota Cilegon dalam program pemberdayaan keluarga rentan?                                     | Dinas Sosial Kota Cilegon, TKSK dan keluarga rentan |
| 5         | Bagaimana pengkoordinasian yang dilakukan Dinas Sosial Kota Cilegon dalam program pemberdayaan keluarga rentan?                                    |   |
| 6         | Bagaimana bentuk pelaporan pertanggungjawaban dalam program pemberdayaan keluarga rentan?  |   |
| 7         | Bagaimana dengan Anggaran untuk program pemberdayaan keluarga rentan di Kota Cilegon?  | Dinas Sosial Kota Cilegon dan TKSK                  |
| 8         | Apakah Dinas Sosial Kota Cilegon pernah melakukan pemberdayaan kepada Anda (Keluarga Rentan)?  | Keluarga Rentan                                     |
| 9         | Dalam bentuk apa pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam program pemberdayaan keluarga rentan?   |   |
| 10        | Apakah upaya-upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial memberikan manfaat atau meningkatkan kesejahteraan hidup Anda (Keluarga Rentan) ? |   |
| 11        | Apakah Upaya-upaya pemberdayaan tersebut rutin dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Cilegon?   |   |

*(Sumber: Peneliti, 2015)*

Pedoman wawancara ini disusun dengan fokus penelitian peneliti berdasarkan apa yang nantinya akan peneliti kaji dan temukan saat di lapangan yang kemudian akan diolah dan dikembangkan sesuai data yang diperoleh menjadi satu rangkaian informasi yang dijabarkan dalam bentuk deskriptif sehingga menjadi suatu hasil penelitian yang paten dan dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif menggunakan model interaktif dari Miles dan Hubberman (2009:15-20), yang menggunakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intraktif dengan proses pengumpulan data dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampel jenuh.

Proses datanya mencakup:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data, dan mencari yang diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan selanjutnya yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

### 3. *Conclusion Drowing / Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Hubberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## **3.8 Uji Kredibilitas Data**

Uji keabsahan data memiliki dua fungsi, yaitu melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti (Praswoto, 2011:266). Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi dan member check.

### **3.8.1 Triangulasi**

Moleong (2006:330) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diatur data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Denzin (Prastowo, 2011:269) membedakan teknik ini menjadi lima macam, yaitu:

1. Triangulasi sumber yaitu suatu teknis pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

2. Triangulasi teknik yaitu suatu teknik pengecekan kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu yaitu suatu teknik pengecekan kredibilitas dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.
4. Triangulasi penyidik, suatu teknik pengecekan kredibilitas dilakukan dengan cara memanfaatkan pengamat lain untuk pengecekan derajat kepercayaan data.
5. Triangulasi teori, suatu teknik pengecekan kredibilitas dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari suatu teori untuk memeriksa data temuan penelitian.

Kelima macam triangulasi di atas, peneliti dalam melakukan analisis data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Sumber data pada penelitian ini adalah pegawai Dinas Sosial Kota Cilegon dan Keluarga Rentan di Kota Cilegon.

### **3.8.2 Member check**

Member check adalah proses pengecekan data yang kita peroleh kepada pemberi data tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh data yang kita peroleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jika data yang ditemukan itu disepakati oleh pemberi data, sehingga data tersebut valid sehingga semakin kredibel (dapat dipercaya). Namun sebaliknya, jika pemberi data tidak menyepakatinya kita harus mengubah temuannya dan menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Setelah disepakati pemberi data kita minta untuk menandatangani supaya lebih autentik. Selain itu langkah tersebut jga dapat menjadi bukti bahwa kita telah melakukan member check.



### **3.9 Tempat dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Sosial Kota Cilegon, sedangkan untuk melengkapi data primer yang diperlukan, peneliti juga melakukan penelusuran data sekunder melalui pengamatan terhadap beberapa keluarga rentan yang berada di beberapa Kecamatan di Kota Cilegon dengan rincian jadwal penelitian sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Jadwal Penelitian**

| No | Kegiatan Penelitian           | Waktu Penelitian |             |             |     |             |      |     |
|----|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|-----|-------------|------|-----|
|    |                               | 2014             |             | 2015        |     |             | 2016 |     |
|    |                               | Okt              | Nov-<br>Des | Jan-<br>Mei | Okt | Nov-<br>Des | Jan  | Feb |
| 1  | Pengajuan Judul               |                  |             |             |     |             |      |     |
| 2  | Perijinan dan Observasi Awal  |                  |             |             |     |             |      |     |
| 3  | Penyusunan BAB I –<br>BAB III |                  |             |             |     |             |      |     |
| 4  | Bimbingan BAB 1 –<br>BAB III  |                  |             |             |     |             |      |     |
| 5  | Seminar Proposal              |                  |             |             |     |             |      |     |
| 6  | Penyusunan BAB IV –<br>BAB V  |                  |             |             |     |             |      |     |
| 7  | Bimbingan BAB IV –<br>BAB V   |                  |             |             |     |             |      |     |
| 8  | Sidang Skripsi                |                  |             |             |     |             |      |     |

*(Sumber: Peneliti 2015)*

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum mengenai Kota Cilegon beserta Dinas Sosial Kota Cilegon selaku Dinas yang berwenang untuk melakukan Manajemen Program Pemberdayaan Keluarga Rentan di Kota Cilegon.

##### **4.1.1 Gambaran Umum Kota Cilegon**

Kota Cilegon merupakan sebuah kota yang terdapat di Provinsi Banten, Indonesia. Berdasarkan letak geografisnya, Kota Cilegon terletak di bagian ujung sebelah barat Pulau Jawa yang terletak pada posisi 5° 52' 24" – 6° 04' 07" Lintang Selatan (LS) dan 105° 54' 05" – 106° 05' 11" Bujur Timur (BT). Kota Cilegon memiliki luas secara keseluruhan 17.550,0 Ha dengan batasan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pulo Ampel dan Bojonegara (Kabupaten Serang)
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Anyer dan Mancak (Kabupaten Serang)

d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kramatwatu dan Waringin Kurung (Kabupaten Serang).

Sehubungan dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan daerah kota terhadap laut adalah 1/3 dari wilayah laut provinsi (yaitu 12 mil laut), atau 4 mil laut (1 mil laut = 1.852m, sehingga 4 mil laut = 7.408m). Panjang pantai Kota Cilegon bila diukur secara “lurus” adalah sekitar 25 Km. Sehingga secara tentatif luas laut yang menjadi kewenangan Kota Cilegon sekitar 185 Km<sup>2</sup>, atau sedikit lebih luas dari wilayah daratan.

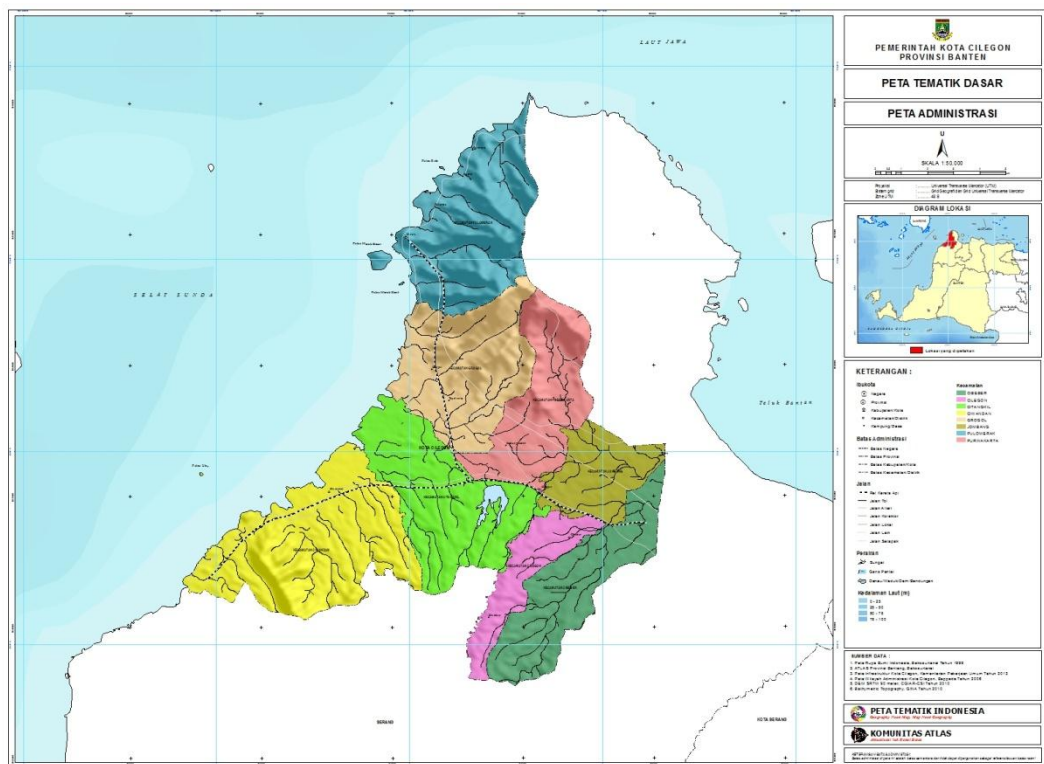
Kota Cilegon memiliki wilayah relatif landai di daerah tengah dan pesisir barat hingga timur kota, tetapi wilayah utara Kota Cilegon menjadi berlereng karena berbatasan langsung dengan Gunung Gede yang merupakan daerah Kecamatan Pulomerak, sedangkan wilayah selatan topografi menjadi berbukit karena berbatasan langsung dengan Kecamatan Mancak. Morfologi Kota Cilegon sendiri berada pada ketinggian 0-553 meter dpl. Secara administrasi wilayah Kota Cilegon terbagi menjadi 8 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Cilegon
2. Kecamatan Ciwandan
3. Kecamatan Pulomerak
4. Kecamatan Cibeber
5. Kecamatan Grogol
6. Kecamatan Purwakarta

7. Kecamatan Citangkil

8. Kecamatan Jombang

Kota Cilegon memiliki berbagai wilayah objek vital negara, antara lain Pelabuhan Merak, Pelabuhan Cigading Habeam Center, Kawasan Industri Krakatau Steel, PLTU Suralaya, Krakatau Tirta Industri Water Treatment Plant, (Rencana Lot) Jembatan Selat Sunda, dan (Rencana Lot) Kawasan Industri Berikat Selat Sunda. Adapun peta Kota Cilegon dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 4.1**  
**Peta Kota Cilegon**

#### **4.1.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Cilegon**

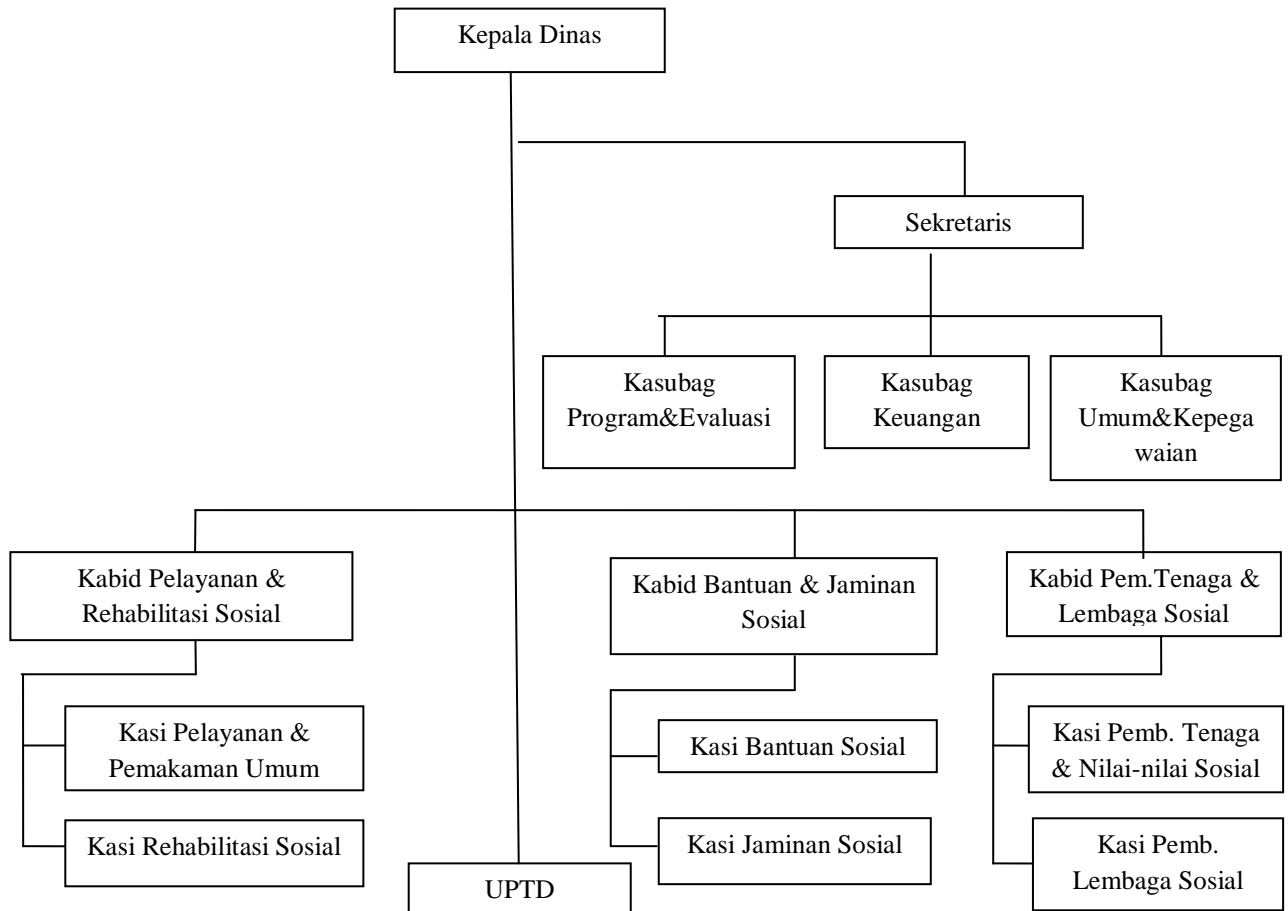
Dinas Sosial Kota Cilegon adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang sosial sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah. Dinas Sosial Kota Cilegon dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial ini menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 68 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Sosial Kota Cilegon serta Peraturan Walikota Cilegon No 38 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Sosial Kota Cilegon. Sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggungjawab di sektor sosial yaitu memberikan bantuan atau perlindungan melalui kegiatan pelayanan, pemberdayaan, rehabilitasi, jamuinan dan pembinaan yang berkenaan dengan masyarakat.

#### **4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Cilegon**

Pegawai Dinas Sosial Kota Cilegon berjumlah 46 orang yang terdiri dari 31 orang PNS dan 15 orang non PNS. Dari personil tersebut komposisi Dinas Sosial Kota Cilegon adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Sosial : 1 orang
2. Sekretaris : 1 orang, membawahkan :
  - a. Kepala Sub Bag. Program & Evaluasi : 1 orang
  - b. Kepala Sub Bag. Umum & Kepegawaian : 1 orang
  - c. Kepala Sub Bag. Keuangan : 1 orang

3. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial : 1 orang,  
membawahkan :
  - a. Kepala Seksi Pelayanan Sosial & Pemakaman : 1 orang
  - b. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial : 1 orang
4. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial : 1 orang,  
membawahkan :
  - a. Kepala Seksi Bantuan Sosial : 1 orang
  - b. Kepala Seksi Jaminan Sosial : 1 orang
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial : 1  
orang, membawahkan :
  - a. Kepala Seksi Pemberdayaan Tenaga dan Nilai – Nilai Sosial :  
1 orang
  - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Sosial : 1 orang
6. Pelaksana : 19 orang
7. Tenaga Magang : 15 orang



(Sumber : Dinas Sosial Kota Cilegon, 2014)

**Gambar 4.2**

**Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Cilegon**



#### **4.1.4 Tugas Pokok Bidang – Bidang Pada Dinas Sosial**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Cilegon dan Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Cilegon, Dinas Sosial Kota Cilegon terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas dan Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 6 (enam) seksi dan 3 (tiga) Sub Bagian serta 1 (satu) UPTD.

##### **1. Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon**

###### **a. Tugas Pokok**

Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan dan mengkoordinasikan sasaran kegiatan Dinas, melakukan pembinaan dan pengarahan kegiatan Dinas serta menyelenggarakan , mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Dinas agar terlaksana dengan baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

###### **b. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan perencanaan kebijaksanaan teknis operasional dan administratif di bidang sosial.

- 2) Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan operasional dan administratif di bidang sosial.
- 3) Penyelenggaraan dan pembinaan aparatur pada Dinas.
- 4) Pembinaan dan pengendalian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas.
- 5) Pengkoordinasian di bidang sosial dengan instansi terkait.
- 6) Penyelenggaraan pelaporan pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan kinerja Dinas.

## **2. Sekretariat**

### **a. Tugas Pokok**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekertaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinir penyusunan rencana program dan pengendalian anggaran Sekretariat, penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan pembinaan kepegawaian, pengaturan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan Dinas, dan pelaksanaan laopran akuntabilitas dan evaluasi kinerja Dinas agar terlaksana dengan baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **b. Fungsi**

- 1) Penyelenggaraan program, kegiatan dan pengendalian anggaran pada Sekretariat.

- 2) Pengkoordinasian penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Dinas.
- 3) Penghimpun rencana kerja Dinas.
- 4) Penyelenggaraan rencana kerja Dinas.
- 5) Penyelenggaraan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan Dinas.
- 6) Penyelenggaraan pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan Dinas.
- 7) Pengkoordinasian dan pembinaan tugas-tugas Sub Bagian pada Sekretariat.
- 8) Pengkoordinasian dan sinkronisasi tugas, program dan kegiatan tiap-tiap Bidang pada Dinas.
- 9) Penyusunan laporan pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan kinerja Dinas.
- 10) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Sekretariat.

### **3. Sekretariat Membawahi:**

#### **3.1 Sub Bagian Program dan Evaluasi**

Mempunyai tugas pokok: merencanakan dan mengontrol kegiatan penyusunan program dan evaluasi, memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan, dan membuat laporan Sub Bagian Program dan Evaluasi sehingga berhasil guna dan

berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan perencanaan Sub Bagian Program dan Evaluasi.
- 2) Pelaksanaan penyusunan visi dan misi Dinas.
- 3) Pelaksanaan penghimpunan rencana kerja Sekretariat dan Bidang.
- 4) Pelaksanaan perencanaan, pengkoordinasian dan evaluasi program kegiatan Dinas.
- 5) Pelaksanaan pengelolaan bahan referensi kegiatan Dinas.
- 6) Penyusunan rencana strategis Dinas.
- 7) Pengumpulan dan pengelolaan data laporan hasil kegiatan Dinas.
- 8) Penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Dinas.
- 9) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di bidang program dan evaluasi.
- 10) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Program dan Evaluasi.

### **3.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Mempunyai tugas pokok: merencanakan dan mengontrol kegiatan administrasi umum, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian, memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan, dan membuat laporan Sub Bagian dan

Kepegawaian sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan perencanaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum dan tata usaha Dinas.
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas.
- 4) Pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan Dinas.
- 5) Penyusunan rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan Dinas.
- 6) Pelaksanaan pengadaan peralatan dan perlengkapan Dinas.
- 7) Pelaksanaan pendistribusian barang keperluan Dinas.
- 8) Pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan barang inventaris Dinas.
- 9) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di bidang umum dan kepegawaian.
- 10) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

### **3.3 Sub Bagian Keuangan**

Mempunyai tugas pokok: merencanakan dan mengontrol kegiatan administrasi keuangan, memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan, dan membuat laporan Sub Bagian Keuangan sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan memiliki fungsi:

- 1) Penyusunan perencanaan Sub Bagian Keuangan.
- 2) Penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung Dinas.
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi gaji pegawai Dinas.
- 4) Penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) Dinas.
- 5) Penyusunan alur kas keuangan Dinas.
- 6) Pelaksanaan administrasi keuangan Dinas.
- 7) Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas.
- 8) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di bidang keuangan.
- 9) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Keuangan.

#### **4. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial**

##### **a. Tugas Pokok**

Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan penyusunan program dan pengendalian anggaran di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, mengkoordinir, menyelenggarakan dan megawasi serta mengevaluasi kegiatan di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membagi tugas dan mengatur serta memberi petunjuk kegiatan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial kepada bawahan dan memberikan laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

##### **b. Fungsi**

- 1) Penyelenggaraan program, kegiatan dan pengendalian anggaran pada Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- 2) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- 3) Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan tiap-tiap Seksi pada Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

- 4) Penyelenggaraan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- 5) Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- 6) Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- 7) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

## **5. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahi:**

### **5.1 Seksi Pelayanan Sosial dan Pemakaman**

Mempunyai tugas pokok: merencanakan dan mengontrol kegiatan Seksi Pelayanan Sosial dan Pemakaman, memberikan petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan Seksi Pelayanan Sosial dan Pemakaman sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan perencanaan Seksi Pelayanan Sosial dan Pemakaman.
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Pelayanan Sosial dan Pemakaman.
- 3) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pada Seksi Pelayanan Sosial dan Pemakaman.



- 4) Penyiapan bahan pelayanan penyelenggaraan di bidang Pelayanan Sosial dan Pemakaman.
- 5) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Bidang Pelayanan Sosial dan Pemakaman.
- 6) Pelaksanaan kegiatan di Bidang Pelayanan Sosial dan Pemakaman.
- 7) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di Bidang Pelayanan Sosial dan Pemakaman.
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pelayanan Sosial dan Pemakaman.

## **5.2 Seksi Rehabilitasi Sosial**

Mempunyai tugas pokok: merencanakan dan mengontrol kegiatan Seksi Pelayanan Sosial dan Pemakaman, memberikan petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan Seksi Pelayanan Sosial dan Pemakaman sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan perencanaan Seksi Rehabilitasi Sosial.
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Rehabilitasi Sosial.
- 3) Pelaksanaan Pengumpulan, pengolahan, pengalisan data pada Seksi Rehabilitasi Sosial.

- 4) Penyiapan bahan pelayanan di Bidang Rehabilitasi Sosial.
- 5) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Bidang Rehabilitasi Sosial.
- 6) Pelaksanaan kegiatan di Bidang Rehabilitasi Sosial.
- 7) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di Bidang Rehabilitasi Sosial.
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Rehabilitasi Sosial.

## **6. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial**

### **a. Tugas Pokok**

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai fungsi tugas pokok memimpin, merencanakan penyusunan program dan pengendalian anggaran Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, mengkoordinir, menyelenggarakan dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membagi tugas dan mengatur serta memberi petunjuk kegiatan Bantuan dan Jaminan Sosial kepada bawahan dan memberikan laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan di Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial berjalan dengan baik, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**b. Fungsi**

- 1) Penyelenggara program, kegiatan dan pengendalian anggaran pada Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial.
- 2) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial.
- 3) Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan tiap-tiap Seksi pada Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial.
- 4) Penyelenggaraan Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial.
- 5) Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan di Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial.
- 6) Penyelenggaraan Koordinasi dengan instansi/pihak terkait di Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial.
- 7) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial.

**7. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial membawahi:****7.1 Seksi dan Bantuan Sosial**

Mempunyai tugas pokok: merencanakan dan mengontrol kegiatan Seksi Bantuan Sosial, memberikan petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan Seksi Bantuan Sosial sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan perencanaan Seksi Bantuan Sosial.
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Bantuan Sosial.
- 3) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pada Seksi Bantuan Sosial.
- 4) Penyiapan bahan pelayanan penyelenggaraan di Bidang Bantuan Sosial.
- 5) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Bidang Bantuan Sosial.
- 6) Pelaksanaan kegiatan di Bidang Bantuan Sosial.
- 7) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di Bidang Bantuan Sosial.
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Seksi Bantuan Sosial.

## **7.2 Seksi Jaminan Sosial**

Mempunyai tuga pokok: merencanakan dan mengontrol kegiatan Seksi Jaminan Sosial, memberikan petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan Seksi Jaminan Sosial sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan perencanaan Seksi Jaminan Sosial.
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Jaminan Sosial.
- 3) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data pada Seksi Jaminan Sosial.
- 4) Penyiapan bahan pelayanan penyelenggaraan di Bidang Jaminan Sosial.
- 5) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Bidang Jaminan Sosial.
- 6) Pelaksanaan kegiatan di Bidang Jaminan Sosial.
- 7) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/pihak yang terkait di Bidang Jaminan Sosial.
- 8) Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Seksi Jaminan Sosial.

## **8. Bidang Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial**

### **a. Tugas Pokok**

Bidang pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan penyusunan program dan pengendalian anggaran Bidang Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial, mengkoordinir, menyelenggarakan dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan Bidang

Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial, membagi tugas dan mengatur serta memberi petunjuk kegiatan Bidang Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial kepada bawahan dan memberikan laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan di Bidang Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial berjalan dengan baik, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan program, kegiatan dan pengendalian anggaran pada Bidang Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial.
- 2) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial.
- 3) Pengkoordinasian dan pembinaan tiap-tiap Seksi pada Bidang Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial.
- 4) Penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial.

## **9. Bidang Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial membahas:**

### **9.1 Seksi Pemberdayaan Tenaga dan Nilai-Nilai Sosial**

Mempunyai tugas pokok: merencanakan dan mengontrol kegiatan Seksi Pemberdayaan Tenaga dan Nilai-Nilai Sosial, memberikan petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan

dan membuat laporan Seksi Pemberdayaan Tenaga dan Nilai-Nilai Sosial sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan perencanaan Seksi Pemberdayaan Tenaga dan Nilai-Nilai Sosial.
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Pemberdayaan Tenaga dan Nilai-Nilai Sosial.
- 3) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pada Seksi Pemberdayaan Tenaga dan Nilai-Nilai Sosial.
- 4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Bidang Pemberdayaan Tenaga dan Nilai-Nilai Sosial.
- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di Bidang Pemberdayaan Tenaga dan Nilai-Nilai Sosial.

## **9.2 Seksi Pemberdayaan Lembaga Sosial**

Mempunyai tugas pokok: merencanakan dan mengontrol kegiatan Seksi Pemberdayaan Lembaga Sosial, memberikan petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan Seksi Pemberdayaan Lembaga Sosial sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien

dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan perencanaan Seksi Pemberdayaan Lembaga Sosial.
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Pemberdayaan Lembaga Sosial.
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Bidang Pemberdayaan Lembaga Sosial.
- 4) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di Bidang Pemberdayaan Lembaga Sosial.
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan Seksi Pemberdayaan Lembaga Sosial.

#### **4.1.5 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Cilegon**

Berdasarkan kedudukan, tugas dan fungsi serta kondisi saat ini maupun kondisi dan proyeksi ke depan, maka perlu dirumuskan visi Dinas Sosial, sehingga visi ini akan menjadi penuntun arah organisasi agar dapat bekerja secara konsisten dan konsekuen, antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan demikian visi Dinas Sosial Kota Cilegon adalah:

**“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat”**

Perumusan visi tersebut mengindikasikan visi ini mengandung arti bahwa pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat ditunjukan untuk



mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang masuk ke dalam kategori PMKS menjadi berkesejahteraan sosial.

Guna mewujudkan visi tersebut, maka Dinas Sosial Kota Cilegon menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Meningkatkan pemberdayaan terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)
3. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan bantuan sosial, jaminan sosial dan penanggulangan bencana
4. Terwujudnya peningkatan kinerja kelembagaan SKPD untuk mendukung pelayanan sosial

#### **4.1.6 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Tujuan jangka menengah Dinas Sosial Kota Cilegon adalah meningkatkan keberdayaan dan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat, sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat (PMKS).

#### 4.1.7 Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kota Cilegon

##### 1. Strategi dan Kebijakan pada Misi Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Berpijak pada upaya untuk mencapai sasaran misi meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) maka ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

| STRATEGI   | KEBIJAKAN  |
|--|--|
| Peningkatan PMKS yang menerima pelayanan dan rehabilitasi Sosial | Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS |

##### 2. Strategi dan Kebijakan pada Misi Meningkatkan Pemberdayaan terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)

Berpijak pada upaya untuk mencapai sasaran dan misi meningkatkan pemberdayaan terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) maka ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

| STRATEGI   | KEBIJAKAN   |
|--|---|
| Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial | Fasilitasi bantuan dan pelatihan peningkatan kualitas tenaga sosial |
|  | Fasilitasi bantuan dan pemberdayaan kelembagaan sosial              |

**3. Strategi dan Kebijakan pada Misi Meningkatkan Pembinaan dan Pelayanan Bantuan Sosial, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Bencana**

Berpijak pada upaya untuk mencapai sasaran misi meningkatkan pembinaan dan pelayanan bantuan sosial, jaminan sosial dan penanggulangan bencana maka ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

| <b>STRATEGI</b>   | <b>KEBIJAKAN</b>   |
|---|--|
| Memperluas cakupan dan kualitas layanan dan jaminan sosial serta penanggulangan bencana | Meningkatkan kapasitas tagana dan penanggulangan bencana |
|   | Memperluas cakupan pelayanan jaminan sosial              |

**4. Strategi dan Kebijakan pada Misi Terwujudnya Peningkatan Kinerja Kelembagaan SKPD untuk Mendukung Pelayanan Sosial**

Berpijak pada upaya untuk mencapai sasaran misi terwujudnya peningkatan kinerja kelembagaan SKPD untuk mendukung pelayanan sosial maka ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

| <b>STRATEGI</b>   | <b>KEBIJAKAN</b>  |
|---|---|
| Peningkatan kinerja kelembagaan SKPD untuk mendukung pelayanan sosial | Meningkatkan kapasitas (ketersediaan dan kualitas) kelembagaan SKPD |

#### **4.1.8 Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Cilegon**

Dinas Sosial Kota Cilegon merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial Kota Cilegon mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Salah satu tugas dari Dinas Sosial Kota Cilegon diantaranya melaksanakan pemberdayaan sosial demi menurunkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Pada tahun 2014 Dinas Sosial Kota Cilegon telah melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) aktif.
2. Kegiatan peningkatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) aktif.
3. Pemberian bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar kepada PMKS skala kota.
4. Pemberian bantuan pada program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial.
5. Pembinaan terhadap panti sosial skala kota dalam melaksanakan standar operasi pelayanan kesejahteraan sosial.
6. Pendampingan terhadap panti sosial skala kota dalam menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

7. Pendampingan terhadap Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSMB).

Target dan realisasi program dan kegiatan pemberdayaan sosial yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Cilegon, secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.1**  
**Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Cilegon Tahun 2014**

| Indikator Sasaran / Capaian Program / Indikasi Kegiatan                                       |  |         | Kinerja Indikator |            |
|---|--|---------|-------------------|------------|
| Nama  | Cara Pehitungan  | Satuan  | Tahun 2013        | Tahun 2014 |
| Proporsi peningkatan PSKS aktif   |  | %       | 5                 | 7.63       |
|   | Jumlah penambahan PSKS   | Lembaga | 7                 | 10         |
|   | Jumlah PSKS yang ada tahun sebelumnya  | Lembaga | 131               | 131        |
| Proporsi peningkatan TKSM aktif   |  | %       | 5                 | 0          |
|   | Jumlah penambahan TKSM   | Orang   | 12                | 0          |
|   | Jumlah TKSM yang ada tahun sebelumnya  | Orang   | 223               | 223        |
|   |  | %       | 9                 | 27.66      |
| Persentase (%) PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | Jumlah PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun            | Orang   | 585               | 1809       |
|   | Jumlah PMKS skala kota dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial | Orang   | 6539              | 6539       |
|   |  | %       | 20.70             | 5.18       |

|   |   |       |       |       |
|---|---|-------|-------|-------|
| Persentase (%) jumlah PMKS dalam 1 tahun skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial | Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis            | Orang | 100   | 25    |
|   | Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis | Orang | 483   | 483   |
| Persentase (%) Panti Sosial skala kota yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial                     | Bukan termasuk SPM yang menjadi kewenangan Kota, indikator SPM ini merupakan kewenangan Provinsi  |       |       |       |
|   |   | %     | 91    | 100   |
| Persentase (%) Panti Sosial skala kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial                         | Jumlah Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos panti dalam 1 tahun   | Panti | 10    | 9     |
|   | Jumlah panti sosial skala kota dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana   | Panti | 11    | 9     |
| Persentase (%)  |   | %     | 86.05 | 86.05 |

(Sumber: Dinas Sosial Kota Cilegon, 2014)

## 4.2 Deskripsi Data

### 4.2.1 Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang didapat dari hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori manajemen oleh Luther Gullick dalam Handayani (2001:24). Teori tersebut

menjelaskan bahwa proses daripada administrasi dan manajemen (*The Process of Administration and Management*) dimulai dari beberapa indikator yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Penyusunan Pegawai, Pembinaan Kerja, Pengkoordinasian, Pelaporan dan Anggaran. Dalam penelitian mengenai Manajemen Program Pemberdayaan Keluarga Rentan di Dinas Sosial Kota Cilegon, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi lapangan dan dokumentasi.

Adapun dokumentasi yang peneliti ambil saat melakukan pengamatan adalah catatan lapangan peneliti yang berupa dokumen-dokumen yang peneliti dapatkan dari Dinas Sosial Kota Cilegon. Selanjutnya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka dalam proses menganalisis datanya pun peneliti melakukan analisa secara bersamaan. Seperti yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, bahwa dalam proses analisa dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan model interaktif yang telah dikembangkan oleh Milles dan Hubberman, yaitu selama penelitian dilakukan dengan menggunakan empat kegiatan penting, diantaranya: pengumpulan data atau *data collection*, reduksi data atau *data reduction*, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan

gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya jika diperlukan.

Penyajian data atau *data display* adalah langkah selanjutnya setelah data direduksi. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan selanjutnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan mudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

Penarikan kesimpulan atau *conclusion drawing/verification* merupakan langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut Milles dan Hubberman. Kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak dikemukakan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Peneliti juga melakukan triangulasi sehingga data yang digunakan mencapai titik jenuh. Teknik pengumpulan data dengan triangulasi data yaitu menggabungkan teknik pengumpulan data wawancara, teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung (observasi) dan teknik pengumpulan data dokumentasi yang dilengkapi dengan catatan lapangan



yang kemudian diberi kode. Triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber yaitu dengan mengadakan wawancara kepada sumber yang berbeda-beda hingga hasil wawancara tersebut mencapai titik jenuh. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

#### **4.2.2 Deskripsi Informan**

Deskripsi informan yaitu menggambarkan secara umum informan-informan yang diambil yang bersifat *purposive* sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga data dan informasi yang diambil mencapai titik jenuh dalam penelitian kualitatif ini. Dalam sebuah penelitian sosial dengan metode kualitatif, informan menjadi salah satu hal yang sangat penting, informan sebagai sumber data kualitatif.

Adapun informan-informan yang peneliti tentukan adalah orang yang menurut peneliti adalah orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. *Key Informan* dibutuhkan untuk memulai wawancara dan observasi. Dengan demikian, *key informan* adalah tokoh formal dalam penelitian Manajemen Program Pemberdayaan Keluarga Rentan di Dinas Sosial Kota Cilegon. *Key Informan* dalam penelitian ini antara lain Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi Dinas Sosial Kota Cilegon, Kepala Bidang Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial Dinas

Sosial Kota Cilegon, Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Sosial Dinas Sosial Kota Cilegon, Staff Pelaksana Dinas Sosial Kota Cilegon dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Citangkil. Sedangkan *secondary informan* dalam penelitian ini adalah keluarga rentan.

Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi Dinas Sosial Kota Cilegon, 1 orang Kepala Bidang Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial Dinas Sosial Kota Cilegon, 1 orang Kepala Seksi Pemberdayaan dan Lembaga Sosial Dinas Sosial Kota Cilegon, 1 orang Staff Pelaksana Dinas Sosial Kota Cilegon, 1 orang Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Citangkil, 3 orang keluarga rentan dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Maka data Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Deskripsi Informan**

| No | Kode Informan    | Nama                        | Keterangan  |
|----|------------------|-----------------------------|---|
| 1  | I <sub>1</sub>   | Ida Kristiyanti, M.Si       | Kasubag Program dan Evaluasi                        |
| 2  | I <sub>2</sub>   | Suherman, SE                | Kabid Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial        |
| 3  | I <sub>3</sub>   | Dra. Yuadhita Brotorini, MM | Kasi Pemberdayaan Sosial dan Lembaga Sosial         |
| 4  | I <sub>4</sub>   | Hikmawati. S.Si             | Staff Pelaksana Pemberdayaaan Sosial                |
| 5  | I <sub>5</sub>   | Sudirman, SE                | Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Kec. Citangkil |
| 6  | I <sub>6.1</sub> | Andis Sabariah              | Keluarga Rentan (KUBE BUEKA) Tegal Cabe             |
| 8  | I <sub>6.2</sub> | Erwin Yulianti              | Keluarga Rentan (KUBE LAJE) Citangkil               |
| 9  | I <sub>6.3</sub> | Neneng                      | Keluarga Rentan (Ex. KUBE Kelompok Kelapa) Deringo  |

*(Sumber: Peneliti, 2015)*

### 4.3 Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Pembahasan adalah langkah melakukan pemaparan lebih lanjut terhadap hasil analisis data yang telah dideskripsikan. Dalam pembahasan peneliti akan menguraikan pembahasan mengenai hasil penelitian yang didasari data yang didapat peneliti melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun uraian

pembahasan pada penelitian ini menggunakan proses manajemen dari Luther Gullick dalam Handayani (2001:24) yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*)
2. Pengorganisasian (*Organizing*)
3. Penyusunan Pegawai (*Staffing*)
4. Pembinaan Kerja (*Directing*)
5. Pengkoordinasian (*Coordinating*)
6. Pelaporan (*Reporting*)
7. Anggaran (*Budgeting*)

Berdasarkan poin-poin tersebut tersebut, peneliti kemudian mencoba menelaah lebih lanjut tentang bagaimana pelaksanaan manajemen program yang sedang dilakukan di Dinas Sosial Kota Cilegon. Dalam hal ini, fokus penelitiannya adalah tentang Manajemen Program Pemberdayaan Keluarga Rentan di Dinas Sosial Kota Cilegon

Dengan menggunakan teori manajemen dari Luther Gulick peneliti berupaya terlebih dahulu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana Manajemen Program Pemberdayaan Keluarga Rentan di Dinas Sosial Kota Cilegon” dan pembahasan yang dilakukan berdasarkan urutan poin tersebut. Teknik *purposive* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu itu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2008:218).

Program pemberdayaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial tujuannya adalah untuk mengentaskan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Cilegon agar terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani dan sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Bila ditinjau dari tujuan program pemberdayaan kesejahteraan sosial maka pemenuhan kebutuhan yang diupayakan adalah pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan kebutuhan sosial, ketentuan pemenuhan kebutuhan tersebut terdapat pada Petunjuk Teknis Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat. Sedangkan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk keluarga rentan dimana mereka menjadi salah satu sasaran program ini.

Pemberdayaan keluarga rentan ini menjadi salah satu tanggung jawab Pemerintah Kota Cilegon bersama-sama dan secara teknis fungsional hal tersebut menjadi salah satu tugas penting Dinas Sosial Kota Cilegon, walaupun hal tersebut hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini ditandai dengan jumlah keluarga rentan di Kota Cilegon terbanyak ketiga setelah wanita rawan sosial ekonomi dan penyandang cacat, jumlah keluarga rentan di Kota Cilegon tahun 2014 sebanyak 1079 kepala keluarga. dinas sosial beserta berbagai sub bagian yang terstruktur di dalamnya bekerjasama dan bersinergi melaksanakan berbagai kegiatan dalam suatu program atau kebijakan yang telah disusun untuk memberbedayakan keluarga rentan di Kota Cilegon.

Manajemen program pemberdayaan keluarga rentan di Dinas Sosial ini sangat penting untuk menuntaskan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Cilegon, Dinas Sosial Kota Cilegon dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu salah satunya memberdayakan keluarga rentan.

### **1. Perencanaan (*Planning*)**

Perencanaan adalah perincian dalam garis besar untuk memudahkan pelaksanaannya dan metode yang digunakan dalam menyelesaikan maksud atau tujuan suatu organisasi.

Dinas Sosial ini menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 68 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Sosial Kota Cilegon serta Peraturan Walikota Cilegon No. 38 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Sosial Kota Cilegon. Sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab di sektor sosial yaitu memberikan bantuan atau perlindungan melalui kegiatan pelayanan, pemberdayaan, rehabilitasi, jaminan dan pembinaan yang berkenaan dengan masyarakat. Selain itu, Dinas Sosial juga memiliki visi “Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat”.

Perumusan visi tersebut mengidentifikasi visi ini mengandung arti bahwa pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat yang masuk ke dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) salah satunya keluarga rentan menjadi berkesejahteraan sosial. Hal ini seperti

yang diungkapkan oleh Kasubag Program dan Evaluasi Dinas Sosial Kota Cilegon (I<sub>1</sub>), beliau menjelaskan:

*“Visi Dinsos kan terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat. Jadi, diharapkan dengan adanya program pemberdayaan mereka (keluarga rentan) memiliki keahlian untuk bisa menjadi sejahtera, membuat kehidupan mereka jadi lebih baik lagi”. (Wawancara dengan Ibu Ida Kristiyanti, M.Si, Jumat 24 April 2014).*

Hal ini dipertegas oleh Kabid Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial Dinsos Kota Cilegon (I<sub>2</sub>), Beliau mengatakan:

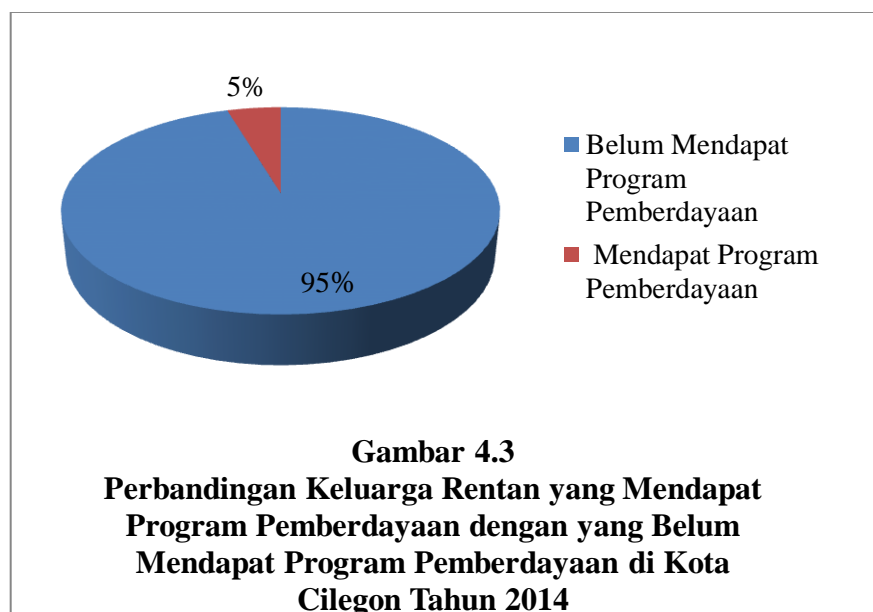
*“Program pemberdayaan ini kan diharapkan agar mereka (keluarga rentan) hidupnya menjadi sejahtera lepas dari kemiskinan”. (Wawancara dengan Bapak Suherman, SE, Kamis 23 April 2015).*

Hal ini juga senada dengan pernyataan Ibu Yuadhita Brotorini, MM selaku Kasi Pemberdayaan Lembaga Sosial Dinas Sosial Kota Cilegon (I<sub>3</sub>), beliau menjelaskan:

*“Tujuan program ini sesuai dengan visi Dinsos yah, memberdayakan masyarakat menjadi sejahtera. Jadi diharapkan dengan adanya pemberdayaan mereka bisa berkembang menjadi lebih baik”. (Wawancara dengan Ibu Yuadhita Brotorini, MM, Jumat 24 April 2015).*

Dari berbagai pernyataan (I<sub>1</sub>-I<sub>3</sub>) di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan memang sesuai dengan visi dari Dinas Sosial Kota Cilegon yaitu terwujudnya kesejahteraan sosial. Selain itu juga, pemberdayaan sosial juga diharapkan dapat menjadikan keluarga rentan memiliki keahlian sehingga menjadikan keluarga rentan menjadi berdaya dan menjadi sejahtera bahkan terbebas dari kemiskinan.

Namun pada kenyataannya, Dinas Sosial Kota Cilegon masih banyak mengalami permasalahan-permasalahan dalam menjalani program pemberdayaan keluarga rentan , yaitu: Pertama, dalam proses perencanaan, belum tercapainya target atau tujuan Dinas Sosial Kota Cilegon dalam program pemberdayaan keluarga rentan. Jumlah keluarga rentan di Kota Cilegon yaitu sebanyak 1079 kepala keluarga namun yang mendapat Program Pemberdayaan sebanyak 50 orang dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan yang belum mendapat program pemberdayaan sebanyak 1029 orang. Persentase jumlah keluarga rentan yang mendapat program pemberdayaan dengan yang belum mendapat program pemberdayaan bisa dilihat dalam diagram berikut:



(Sumber: Dinas Sosial Kota Cilegon, 2014)



Tujuan program pemberdayaan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belum tercapainya target tersebut dapat dilihat dalam tabel target dan realisasi Dinas Sosial dalam program pemberdayaan di bawah ini:

**Tabel 4.3**  
**Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Cilegon**  
**Tahun 2014**

| <b>Nama Program</b>  | <b>Satuan</b> | <b>Target<br/>2014</b> | <b>Realisasi<br/>2014</b> |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|
| Proporsi peningkatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)   | Orang         | 12                     | 0                         |
| Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis | Orang         | 100                    | 50                        |

*(Sumber: Dinas Sosial Kota Cilegon, 2014)*

Hal ini juga dijelaskan oleh Kasubag Program dan Evaluasi (I<sub>1</sub>),

Beliau menerangkan:

*“Kalau dilihat dari renstra memang targetnya sampai 100 namun selama 2014 baru 10 kelompok saja yang baru terdaftar di KUBE”. (Wawancara dengan Ibu Ida Kristiyanti, Jumat 24 April 2015).*

Hal ini juga disampaikan oleh Kasi Pemberdayaan dan Lembaga Sosial (I<sub>3</sub>), beliau menjelaskan:

*“Sebelumnya tahun 2013 ada 25 KUBE, tapi 2014 kemarin hanya 10 KUBE aja yang dapat bantuan dari sini, dalam 1 Kelompok KUBE anggotanya ada 5 orang. (Dinas Sosial Kota Cilegon)”. (Wawancara dengan Ibu Dra. Yuadhita Brotorini, MM, Jumat 24 April 2015).*

Selain itu, program pemberdayaan sosial di Dinas Sosial Kota Cilegon juga belum mampu mengurangi masalah kemiskinan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suherman selaku Kabid Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial (I<sub>2</sub>), beliau menjelaskan:

*“Pembinaan dari kita masih belum bisa mengurangi kemiskinan di Cilegon ini, menuntaskan kemiskinan ga hanya sebatas diberi pembinaan keahlian aja tapi mentalnya juga harus dibina. Kalau hanya pembinaan keahlian biasanya, udah..yaa..sebatas belajar..udah dari situ yaudah ilang aja”. (Wawancara dengan Bapak Suherman, SE, Kamis 23 April 2015).*

Dari berbagai pernyataan yang dipaparkan di atas oleh I<sub>1</sub>-I<sub>3</sub> Dapat ditarik kesimpulan bahwa program pemberdayaan sosial yang dilakukan Dinas Sosial Kota Cilegon tahun 2014 dikatakan belum mencapai target yaitu 100 orang, target yang dicapai oleh Dinas Sosial Kota Cilegon dalam program pemberdayaan sosial hanya 50% atau 50 orang. Mereka yang diberdayakan dijadikan kelompok yang disebut Kelompok Usaha Bersama (KUBE) masing-masing kelompok beranggotakan 5 orang.

Dinas Sosial juga mengalami kendala atau hambatan pada proses pencapaian tujuan dalam program pemberdayaan sosial. Hal ini dijelaskan oleh Kabid Pemberdayaan dan Tenaga Sosial (I<sub>2</sub>) beliau menjelaskan:

*“Program pemberdayaan ini susah tercapai karena kebanyakan mereka mentalnya ga siap ga bagus. Kebanyakan mereka keenakan disuapin gamau beridiri sendiri. Jadi, hambatannya datang dari mental mereka itu sendiri”. (Wawancara dengan Bapak Suherman, SE, Kamis 23 April 2015).*

Namun, pernyataan berbeda diungkapkan oleh Kasi Pemberdayaan dan Lembaga Sosial (I<sub>3</sub>), Beliau menerangkan bahwa:

*“Jumlah PMKS kan banyak yah, khususnya keluarga rentan. Dari data rekapitulasi aja jumlahnya ada 1079 kepala keluarga. Jadi kalau cuma Dinas Sosial yang ngejalani susah ngurangin jumlah yang banyak itu, harus dibantu juga sama Dinas lain yang terkait supaya pencapaian tujuan ini hasilnya maksimal”. (Wawancara dengan Ibu Dra. Yuadhita Brotorini, MM, Jumat 24 April 2015).*

Dari kedua pendapat di atas (I<sub>2</sub>-I<sub>3</sub>) dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Sosial Kota Cilegon mengalami kendala pada proses pencapaian tujuan dalam pemberdayaan sosial, hambatan tersebut adalah:

1. Mental dari keluarga rentan yang belum siap dalam menerima pemberdayaan dari Dinas Sosial Kota Cilegon.
2. Dinas Sosial tidak dapat menjalankan program pemberdayaan sosial sendiri kepada 1079 kepala keluarga keluarga rentan, Dinas Sosial membutuhkan Dinas lain yang terkait seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam program pemberdayaan sosial.

Berdasarkan uraian di atas yang terdapat pada indikator Perencanaan (*Planning*) bahwa tujuan pemberdayaan sosial sesuai dengan visi dari Dinas Sosial Kota Cilegon yaitu terwujudnya kesejahteraan sosial. Selain itu juga, pemberdayaan sosial juga diharapkan dapat menjadikan keluarga rentan memiliki keahlian sehingga menjadikan keluarga rentan menjadi berdaya dan menjadi sejahtera bahkan terbebas dari kemiskinan. Program pemberdayaan sosial yang dilakukan Dinas Sosial tahun 2014 belum mencapai target yaitu 100 orang, target yang dicapai oleh Dinas Sosial Kota Cilegon dalam program pemberdayaan sosial hanya 50% atau 50 orang. Mereka yang diberdayakan dijadikan kelompok yang disebut Kelompok Usaha Bersama (KUBE) masing-masing kelompok beranggotakan 5 orang. Pada proses pencapaian tujuannya juga Dinas Sosial Kota Cilegon mengalami kendala atau hambatan dalam proses pemberdayaan sosial, yaitu dari mental keluarga rentan yang tidak siap menerima program pemberdayaan sosial dan Dinas sosial tidak dapat menjalankan program pemberdayaan sosial sendiri, Dinas Sosial Kota Cilegon membutuhkan Dinas lain seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi agar proses pencapaian tujuan mendapatkan hasil yang optimal.

## **2. Pengorganisasian (*Organizing*)**

Pengorganisasian adalah proses menetapkan struktur formal daripada kewenangan dimana pekerjaan dibagi-bagi sedemikian rupa,

ditentukan dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam penelitian ini, Pengorganisasian lebih kepada penetapan struktur dan penetapan kepada setiap dekripsi masing-masing pekerjaan agar perencanaan program pemberdayaan sosial untuk keluarga rentan yang dilakukan sesuai yang diharapkan. Berdasarkan wawancara dengan Kabid Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial (I<sub>2</sub>) :

*“Untuk pembagian kerja sudah ditetapkan dari SK Kementrian, tapi yang benar-benar formal sih ga ada yah... Saya disini sebagai Kabid spesialis yang menangani masalah keluarga rentan karena untuk diberdayakan di KUBE, di bawah saya ada Kasi Pemberdayaan Tenaga dan Nilai-Nilai Sosial, Bapak Hasimudian sama Kasi Pemberdayaan Lembaga Sosial, Ibu Dita. Terus juga kita di bantu sama 2 staff pelaksana, tapi khusus nanganin pemberdayaan keluarga rentan di KUBE yang nanganin saya sama Ibu Dita dibantu dengan staff”. (Wawancara dengan Bapak Suherman, SE, Kamis 23 April 2015).*

Pernyataan ini juga diperkuat oleh Kasi Pemberdayaan dan Lembaga Sosial. Beliau menjelaskan bahwa yang khusus menangani keluarga rentan adalah Bidang Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial dan beliau menambahkan bahwa ada pekerja sosial yang membantu di lapangan dalam program pemberdayaan sosial, berikut petikan wawancaranya (I<sub>3</sub>) :

*“Kalau untuk struktur formal sih ga ada yahh.. Yang khusus menangani keluarga rentan dan diberdayakan dalam KUBE, Kami di Bidang Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial, yaitu Pak Kabid (Bapak Suherman) dan Saya (Ibu Dita), saya juga dibantu sama 2 staff pelaksana, namanya mba Hikmat sama Mas Adam. terus juga kalau di lapangan kita dibantu sama TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan) masing-masing 1 TKSK di 1 Kecamatan”.(Wawancara dengan Dra. Yuadhita Brotorini, MM, Jumat 24 April 2015).*

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa dalam pengorganisasian dalam struktur formal dalam program pemberdayaan sosial keluarga dilakukan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial dan Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Sosial, selain itu, Kabid Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial dan Kasi Pemberdayaan Lembaga Sosial dibantu oleh 2 orang staff pelaksana dan di lapangan dibantu oleh 1 Tenaga Kerja Sosial Kecamatan per 1 Kecamatan di Kota Cilegon. Staff pelaksana dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan tersebut bukanlah Pegawai Negeri Sipil, hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ibu Yuadhita selaku Kasi Pemberdayaan Lembaga Sosial, beliau (I<sub>3</sub>) menjelaskan:

*“Ya memang 2 staff pelaksana disini bukanlah PNS dan TKSK juga bukan PNS, mereka hanya pekerja honorer”. (Wawancara dengan Ibu Dra. Yuadhita Brotorini, MM, Jumat 24 April 2015)*

Dari berbagai penjelasan di atas diketahui bahwa dalam proses pengorganisasian dalam program pemberdayaan keluarga rentan tidak ada struktur organisasi formal dalam pengorganisasian atau pembagian masing-masing pekerjaan dalam program pemberdayaan sosial. Hanya Kabid Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial dengan Kasi Pemberdayaan Lembaga Sosial yang dibantu dengan dua orang staff pelaksana dan di lapangan dibantu oleh delapan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), masing-masing satu TKSK di satu Kecamatan.

Program Pemberdayaan Keluarga Rentan sudah dilaksanakan dari tahun 2008. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kasi Pemberdayaan dan Lembaga Sosial (I<sub>3</sub>), beliau menjelaskan:

*“Program pemberdayaan keluarga rentan ini sudah berjalan dari tahun 2008. Keluarga rentan itu dijadikan kelompok yang namanya Kelompok Usaha Bersama atau KUBE karena kalau diberdayakan dalam kelompok biasanya motivasinya akan lebih tinggi daripada sendiri-sendiri”. (Wawancara dengan Ibu Dra. Yuadhita Brotorini, MM, Jumat 24 April 2015).*

Menurut Kasi Pemberdayaan dan Lembaga Sosial Program Pemberdayaan Keluarga rentan sudah berjalan sejak 2008. Tahun 2014 Dinas Sosial Kota Cilegon sudah melakukan pemberdayaan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 10 kelompok. Namun, menurut Kasi Pemberdayaan dan Lembaga Sosial, dari 10 kelompok yang diberdayakan hanya 2 kelompok yang berhasil masih berjalan dari awal pendirian KUBE tersebut. Karena setelah mendapat bantuan kelompok tersebut tidak dapat mengelola bidang usaha yang dijalankan. Berikut penjelasannya (I<sub>3</sub>):

*“Program ini sudah berjalan dari 2008. Keluarga rentan ini dijadikan dalam kelompok yang namanya Kelompok Usaha Bersama atau KUBE karena Tahun 2014 baru 10 KUBE yang mendapat bantuan. Tapi, dari 10 hanya 2 KUBE yang masih bisa bertahan. Kebanyakan dari mereka setelah mendapat bantuan hilang gitu aja jadi ga bisa ngelola usahanya dan akhirnya gagal”. (Wawancara dengan Ibu Dra. Yuadhita Brotorini, MM, Jumat 24 April 2015).*

Menurut Ex. Ketua Kelompok Usaha Bersama Kelompok Kelapa (I<sub>6.3</sub>) kegagalan diakibatkan oleh faktor kurangnya motivasi dari anggota, berikut penjelasannya:

*” Kelompok Kelapa berdirinya tahun 2010 jualan nasi uduk. Anggotanya ada 5 orang. Dari 2010-2013 berjalan lancar. Tahun 2014 udah mulai masing-masing bilangnyanya males karena dapetnya sedikit jadi pada ga semangat. Satu hari omsetnya rata-rata Rp 150.000 terus harus dipotong buat muterin modal sama kas. Satu orang tiap hari megang Rp 10.000. Mereka bilangnyanya ga semangat capek-capek jualan dapetnya Cuma segitu. Terus yang makin parahnyanya pas Oktober 2013 ada anggota minjem uang kas Rp 5.000.000 karena anaknya sakit. Awal tahun 2014 dia kabur pindah rumah diem-diem, dari situ semakin ga semangat dan akhirnya bubar”. (Wawancara dengan Ibu Neneng, Senin 01 Februari 2016).*

Dari pernyataan yang diberikan di atas (I<sub>6.3</sub>) dapat ditarik kesimpulan bahwa kegagalan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kelompok Kelapa dikarenakan faktor rendahnya motivasi anggota. Pembagian keuntungan Rp 10.000 per hari dianggap tidak mencukupi sehingga anggota malas menjalankan usaha di bidang nasi uduk. Kemudian, terpakainya uang modal dari kas sebesar Rp 5.000.000 oleh salah satu anggota dan anggota tersebut pindah rumah secara diam-diam sampai akhirnya usaha yang didirikan berhenti dan gagal.



### 3. Penyusunan Pegawai (*Staffing*)

Penyusunan pegawai (*Staffing*) dalam penelitian ini lebih kepada bagaimana keadaan atau kondisi Sumber Daya Manusia yang ada Dinas Sosial Kota Cilegon. Penyusunan pegawai dinilai penting dalam mengelola suatu organisasi (Dinas Sosial) sehingga dapat mencapai tujuan khususnya dalam program pemberdayaan sosial kepada keluarga rentan.

Dinas Sosial Kota Cilegon memiliki tugas salah satunya ialah melaksanakan program pemberdayaan sosial kepada keluarga rentan. Jumlah keluarga rentan di Kota Cilegon sebanyak 1079 kepala keluarga, oleh karena itu Dinas Sosial Kota Cilegon membutuhkan pegawai yang mampu melaksanakan tugasnya agar tujuan program pemberdayaan sosial terhadap keluarga rentan dapat tercapai.

Namun, dalam proses penyusunan pegawai Dinas Sosial Kota Cilegon mengalami hambatan yaitu kurangnya personil atau Sumber Daya Manusia. Tahun 2014 Dinas Sosial Kota Cilegon hanya memiliki 31 Pegawai Negeri Sipil dan 15 orang Non Pegawai Negeri Sipil dengan salah tugasnya adalah melaksanakan pemberdayaan sosial demi menurunkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebanyak 5155 orang. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kabid Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial (I<sub>2</sub>) :

*“Di Dinsos Sendiri sebenarnya kekurangan personil yah.. untuk Keseluruhan yang PNS ada 31 orang, tapi yang khusus untuk nangangin keluarga rentan hanya 2 orang dibantu staff 2 orang, bisa dibayangkan kan dengan jumlah keluarga rentan yang banyak ada 1079 kepala keluarga kita cuma segini orang”. (Wawancara dengan Bapak Suherman, SE, Kamis 23 April 2015).*

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kasi Pemberdayaan dan Lembaga Sosial (I<sub>3</sub>):

*“Kami disini benar-benar kekurangan personil, untuk nanganin rentan jadi tugas Saya dengan Pak Kabid yang dibantu juga sama staff pelaksana, Mba Hikmat sama Mas Adam. Untuk benar-benar ngejalanin program ini seharusnya membutuhkan personil yang banyak biar tujuan program ini bisa tercapai secara maksimal”. (Wawancara dengan Ibu Dra. Yuadhita Brotorini, MM, Jumat 24 April 2015).*

Berdasarkan pernyataan di atas (I<sub>2</sub>-I<sub>3</sub>) dapat diketahui bahwa Dinas Sosial kekurangan personil dalam penyusunan pegawai untuk melaksanakan program pemberdayaan kepada keluarga rentan. Dinas Sosial hanya memiliki 31 orang Pegawai Negeri Sipil dan yang menangani keluarga Rentan hanya 4 orang, 2 orang Pegawai Negeri Sipil dan 2 orang staff pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil, yaitu 1 orang Kepala Bidang Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial, 1 orang Kasi Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial yang dibantu oleh 2 orang staff pelaksana.

Staff pelaksana dinilai cukup mampu meringankan beban pekerjaan Kasi Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial dalam melaksanakan program pemberdayaan sosial kepada keluarga rentan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kasi Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial (I<sub>3</sub>), Beliau mengungkapkan:

*“Ya benar, Mba Hikmat dan Mas Adam itu staff pelaksana di Kantor. Mereka cukup membantu meringankan beban pekerjaan saya”. (Wawancara dengan Ibu Dra. Yuadhita Brotorini, MM, Jumat 24 April 2015).*

Namun, selain kurangnya personil atau Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan program pemberdayaan sosial kepada keluarga rentan, Sumber Daya Manusia yang menangani program pemberdayaan sosial bukan berasal dari latar belakang sosial. Hal ini diungkapkan oleh Kasi Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial (I<sub>3</sub>), beliau menjelaskan:

*“Bisa dilihat sendiri yah dari struktur organisasi. Untuk Kabid Pemberdayaan aja background pendidikan saja bukan dari sosial, Pak Kabid latar belakangnya ekonomi, untuk staff pelaksana apalagi, Mbak Hikmat gelarnya S.Si sarjana sains bertolak belakang banget sama permasalahan sosial dan Mas Adam juga basic backgroundnya hanya SMA”. (Wawancara dengan Ibu Dra. Yuadhita Brotorini, MM, Jumat 24 April 2015).*

Menurut Kabid pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial (I<sub>2</sub>) bahwa ia tidak memiliki kendala yang berarti walaupun bukan berlatar belakang sosial. Berikut petikan wawancaranya:

*“Background saya memang dari ekonomi, tapi saya tidak begitu mengalami hambatan yang berarti. Keluarga rentan ini kan permasalahan yang besar dari sisi ekonomi jadi menurut saya background saya masih bisa masuk dalam program ini. Background itu tidak menjamin bahwa seseorang mampu melaksanakan pekerjaannya atau tidak”. (Wawancara dengan Bapak Suherman, Kamis 23 April 2015).*

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Citangkil (I<sub>5</sub>) beliau juga berlatar belakang pendidikan ekonomi dan tidak mengalami hambatan sebagai pelaksana program pemberdayaan sosial di lapangan. Berikut petikan wawancaranya:

*“Saya basicnya sarjana ekonomi. Ga ada halangannya sih menjalani pekerjaan ini”. (Wawancara dengan Bapak Sudirman, SE, Jumat 18 Desember 2015).*

Namun pernyataan yang berbeda diungkapkan oleh Staff Pelaksana Dinas Sosial Kota Cilegon (I<sub>4</sub>), beliau mengatakan:

*“Kendalanya sih karena saya bukan dari sosial yah tapi dari sains, jadi untuk masalah ini kan menghadapi orang jadi awalnya masalah dari komunikasi antar saya dengan mereka aja (keluarga rentan) karena saya awalnya agak kaku kalo komunikasi dengan oranglain. Tapi lama kelamaan saya jadi biasa dan ini kan udah jadi kewajiban saya bekerja disini jadi kalo sekarang mah udah ga begitu mengalami kendalanya lagi udah biasa”. (Wawancara dengan Mba Hikmawati, S.Si, Jumat 25 April 2015).*

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyusunan pegawai Dinas Sosial Kota Cilegon kekurangan personil atau Sumber Daya Manusia dalam menjalankan program pemberdayaan sosial kepada keluarga rentan, personil atau Sumber Daya Manusia dalam program pemberdayaan sosial keluarga rentan hanya berjumlah 4 orang, yaitu 2 orang Pegawai Negeri Sipil, 1 Kabid Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial dengan 1 orang Kasi Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial dan Orang Staff Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan personil atau Sumber Daya Manusia yang menjalankan program pemberdayaan sosial kepada keluarga rentan bukan berlatar belakang sosial, melainkan berlatarbelakang pendidikan ekonomi, sains dan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA).

Setiap anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) beranggotakan lima orang, satu orang ketua kelompok, satu sekretaris dan tiga orang anggota. Hal ini disampaikan oleh Kasi Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial (I<sub>3</sub>), Beliau menjelaskan:

*“Tahun 2014 hanya sepuluh KUBE yang baru diberdayakan dengan Kita. Setiap kelompok ada lima orang, untuk penyusunan anggota biasanya yang menjadi ketua yang mereka anggap lebih mampu memberikan motivasi lebih kepada anggota lain. Ada juga KUBE yang beranggotakan tujuh orang, tapi dua orang itu ga terdata di Dinsos karena yang dua itu bukan termasuk dari keluarga rentan, mereka hanya membantu KUBE itu agar bisa terus berjalan agar terus dapat mensejahterakan kehidupannya”. (Wawancara dengan Ibu Dra. Yuadhita Brotorini, MM, Kamis 24 April 2015).*

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam penyusunan anggota KUBE, setiap anggota KUBE beranggotakan lima sampai tujuh orang. Namun, yang terdata di Dinsos hanyalah lima orang, dua orang tersebut hanyalah sebagai pembantu agar KUBE dapat terus berjalan mencapai tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan dan dua orang tersebut bukan termasuk dari keluarga rentan.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Kelompok KUBE BUEKA (Kelompok Usaha Bersama Bina Usaha Keluarga) (I<sub>6.1</sub>), beliau menjelaskan:

*“BUEKA ini ada tujuh orang tapi yang ke data sama Dinsos cuma boleh lima orang, dua orang ga termasuk dari keluarga rentan, karena dalam penyusunan anggota ini udah ada aturannya Mba, setiap 1 KUBE harus ada minimal dua orang yang termasuk dalam RTS (Rumah Tangga Sasaran), saya termasuk dari dua orang tambahan itu karena data saya disini bukan RTS dan mereka alhamdulillah percayain saya buat mimpin BUEKA ini”.*

*(Wawancara dengan Ibu Andis Sabariah, Jumat 18 Desember 2015).*

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa dalam penetapan anggota atau penyusunan anggota pendataan di Dinas Sosial hanya 5 orang dan dalam setiap kelompok minimal harus beranggotakan 2 orang yang termasuk Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Pergantian anggota kelompok juga terjadi di KUBE BUEKA. KUBE BUEKA didirikan pada bulan Mei tahun 2015 dan sudah dua kali mengalami pergantian anggota kelompok. Hal ini diungkapkan oleh Ketua KUBE BUEKA (I<sub>6.1</sub>):

*“BUEKA sendiri didirikannya dari Mei 2014 tapi baru terdaftar dan dapat bantuan dari Dinsos setahun yang lalu, Desember 2014. Saya malah yang ngegantiin posisi Ketua sebelumnya, Ibu Rosi namanya. Dia tiba-tiba pindah gitu aja ga ada ngabarin sama yang lain gatau pindah kemana, terus saya ngobrol sama ibu-ibu disini trus akhirnya saya yang dipercaya sama anggota BUEKA lainnya buat gantiin Ibu Rosi. Terus juga ada Ibu Hasdiah karena sering sakit-sakitan terus digantiin sama Ibu Maryati”.  
(Wawancara dengan Ibu Andis Sabariah, Jumat 18 Desember 2015).*

Berdasarkan pernyataan di atas sejak berdiri pada Bulan Mei 2014 dan terdaftar di Dinas Sosial Kota Cilegon dan mendapat program pemberdayaan sosial pada Desember 2014, KUBE BUEKA sudah mengalami dua kali pergantian personil anggota, yaitu Ibu Andis Sabariah menggantikan posisi Ketua Ibu Rosita yang tiba-tiba pindah tempat tinggal tanpa memberi informasi kepada anggota lainnya dan Ibu Maryati

menggantikan posisi Ibu Hasdiah dikarenakan faktor kesehatan Ibu Hasdiah yang tidak mampu lagi menjadi anggota KUBE BUEKA.

Pembagian tugas pekerjaan di dalam KUBE tidaklah sesuai dengan deskripsi pekerjaan sesuai posisi masing-masing anggota. Para anggota kelompok menganggap bahwa sebenarnya posisi Ketua, Bendahara maupun Sekertaris hanyalah sebagai formalitas untuk pendataan di Dinas Sosial Kota Cilegon Saja. Anggota kelompok menganggap bahwa orang yang bisa memimpin, membuat perencanaan ataupun membuat laporan adalah sebagai Ketua Kelompok. Kasi Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial (I<sub>3</sub>) membenarkan hal ini, berikut pernyataannya:

*“Ya memang pada kenyataannya di lapangan posisi kaya Ketua, Sekertaris atau Bendahara hanya menjadi formalitas untuk pendataan saja. Tapi ini ga jadi masalah ko.. mereka ga keberatan sama masalah posisi ini yang paling penting kan bukan siapa Ketuanya atau Sekertarisnya atau Bendaharannya.. yang penting kan gimana KUBE mereka bisa bertahan dan maju buat ningkatin taraf kesejahteraan mereka”. (Wawancara dengan Ibu Dra. Yuadhita Brotorini, MM, Kamis 24 April 2015).*

Pernyataan dari Kasi Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial (I<sub>3</sub>) ini pun di pertegas oleh Ketua KUBE BUEKA (I<sub>6.1</sub>), beliau mengatakan:

*“Iya Ibu-Ibu lain (anggota lain) nunjuknya saya aja, pada percaya sama saya, karena saya yang sering aktif ngbrol sama Ibu Dita, saya yang rajin nyatet-nyatet pembukuan. Jadi saya merangkap semuanya Mba, Ketua iya, Sekertaris iya, Bendahara juga iya. Saya sendiri juga masalah ko, happy happy aja.hehehe..”. (Wawancara dengan Ibu Andis Sabariah, Jumat 18 Desember 2015)*

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Kelompok Usaha Bersama Lawang Rejeki (KUBE LAJE) (I<sub>6.2</sub>), Beliau mengatakan:

*“Kalo dari data di Dinsos kan sebenarnya posisi saya kan cuma anggota tapi Ibu-Ibu lain (anggota lain) malah lebih percayainnya ke saya. Saya sih ga masalah yang lain juga ga masalah yang penting tujuan kita kan sama, buat maju bareng-bareng”. (Wawancara dengan Ibu Erwin Yulianti, Kamis 17 Desember 2015).*

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Ex. Ketua KUBE Kelompok Kelapa (I<sub>6.3</sub>), beliau mengatakan:

*“Ga ada sih. Dulu kalau kerja bareng-bareng aja ga ada yang sendiri-sendiri. Itu kan buat Dinas Sosial aja buat pendataan siapa Ketua siapa Sekertaris, bendahara tp kalo kenyataannya bareng-bareng aja.” (Wawancara dengan Ibu Neneng, Senin 01 Februari 2016).*

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh informan (I<sub>2</sub>, I<sub>6.1</sub>, I<sub>6.3</sub>) di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa posisi jabatan sebagai Ketua, Sekertaris maupun Bendahara hanyalah sebagai formalitas saja. Seorang Ketua dapat merangkap sebagai Sekertaris dan Bendahara sekaligus karena dianggap mampu dan dipercaya oleh anggota lain tanpa ada paksaan siapapun karena tujuan yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan setiap kelompok

#### **4. Pembinaan Kerja (*Directing*)**

Dinas Sosial Kota Cilegon memiliki visi tewujudnya kesejahteraan sosial masyarakat. Dinas Sosial juga sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggungjawab di sektor sosial yaitu memberikan bantuan atau



perlindungan melalui kegiatan pelayanan, pemberdayaan, rehabilitasi, jamuinan dan pembinaan yang berkenaan dengan masyarakat. Dinas sosial Kota Cilegon memiliki peran dalam dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon dengan memberikan program pemberdayaan sosial salah satunya kepada keluarga rentan.

Dalam penelitian ini, pembinaan yang dimaksud adalah pembinaan sebagai proses untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan. Menurut Kasi Pemberdayaan Lembaga Sosial (I<sub>3</sub>) pembinaan untuk pegawai dilakukan 1 tahun sekali di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Kesejahteraan Sosial Bandung Jawa Barat, berikut penjelasannya:

*“Pembinaan kerja dilakukan rutin satu tahun sekali, untuk pembinaan sendiri Kita dibantu oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Kesejahteraan Sosial di Bandung”. (Wawancara dengan Ibu Dra. Yuadhita Brotorini, MM, Kamis 24 April 2015).*

Pernyataan ini juga dipertegas oleh Staff Pelaksana (I<sub>4</sub>), ia mengatakan bahwa:

*“Ya, setiap satu tahun sekali rutin pembinaan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Kesejahteraan Sosial Bandung selama dua minggu”. (Wawancara dengan Mba Hikmawati, S.Si, Jumat 25 April 2015).*

Pembinaan kerja kepada pegawai rutin dilakukan selama satu tahun sekali di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Kesejahteraan

Sosial Bandung Jawa Barat selama dua minggu. Pembinaan kerja ini dinilai belum cukup optimal karena pegawai bukan berlatarbelakang sosial dan hanya dilakukan satu tahun sekali. Pendapat ini disampaikan oleh Staff Pelaksana (I<sub>4</sub>), beliau berpendapat:

*“Saya kan basicnya bukan dari sosial yah.. jadi kayanya kurang optimal aja kalau dilakukan cuma satu tahun sekali. Seharusnya minimal satu tahun ada tiga kali pembinaan kerja lah. Jadi kan kita bisa benar-benar optimal dan jadi lebih baik lagi ngelayanin masyarakatnya”. (Wawancara dengan Hikmawati, S.Si, Jumat 25 April 2015).*

Berdasarkan penjelasan di atas (I<sub>4</sub>) dapat diketahui bahwa pembinaan kerja pegawai belum optimal dikarenakan hanya dilakukan satu tahun sekali sedangkan pelaksana program pemberdayaan sosial kepada keluarga rentan bukan berasal dari latar belakang sosial.

Menurut Kasi Pemberdayaan Lembaga Sosial (I<sub>3</sub>) pembinaan kerja yang diberikan kepada anggota KUBE rutin dilakukan minimal satu tahun sekali, beliau mengatakan:

*“Untuk pembinaan anggota KUBE minimal satu tahun sekali juga dilakukan di Aula Dinsos Cilegon. Bentuk pembinaan bisa berupa pelatihan manajemen, pelatihan tata boga, dan sebagainya”. (Wawancara dengan Ibu Dra. Yuadhita Brotorini, MM, Kamis 24 April 2015).*

Tahun 2014 Dinas Sosial sudah melaksanakan program pemberdayaan sosial sebanyak dua kali, yaitu berupa pembinaan tata boga dan pembinaan manajemen. Hal ini di ungkapkan oleh Kasi Pemberdayaan dan Lembaga Sosial (I<sub>3</sub>), beliau mengungkapkan:

*“untuk tahun 2014 sudah dua kali dilakukan pembinaan, pembinaan tata boga dengan manajemen. Pembinaan manajemennya sederhana sih, hanya manajemen penulisan pencatatan pembukuan pembuatan laporan keuangan aja supaya mereka lebih terampil lagi membuat laporannya”. (Wawancara dengan Ibu Dra. Yuadhita Brotorini, MM, Kamis 24 April 2015).*

Pernyataan di atas juga diperkuat oleh pernyataan Ketua KUBE

BUEKA (I<sub>6.1</sub>), beliau mengatakan:

*“Tahun 2014 kemarin ada dua kali pembinaan, kelas tata boga sama kelas manajemen”. (Wawancara dengan Ibu Andis Sabariah, Jumat 18 Desember 2015).*

Hal yang sama juga dijelaskan oleh pernyataan Ketua KUBE LAJE

(I<sub>6.2</sub>), beliau menjelaskan:

*“Tahun kemaren dua kali dapat pembinaannya. Tata Boga sama pembinaan cara membuat laporan keuangan, Manajemen yah namanya? Dua-duanya dilakukan di Gedung Aula Dinsos sendiri”. (Wawancara dengan Ibu Erwin Yulianti, Kamis 17 Desember 2015).*

Pernyataan di atas juga diperkuat oleh pernyataan Ex. Ketua KUBE

Kelompok Kelapa (I<sub>6.3</sub>), beliau menjelaskan:

*“Dulu pas 2013 pernah pembinaan tata boga sama pembuatan pembukuan”. (Wawancara dengan Ibu Neneng, Senin 01 Februari 2016).*

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Kasi Pemberdayaan

Lembaga Sosial dengan Ketua KUBE (I<sub>3</sub>, I<sub>6.1</sub>, I<sub>6.2</sub>, I<sub>6.3</sub>) bahwa pada tahun

2013-2014 Dinas Sosial Kota Cilegon sudah melakukan pemberdayaan sosial berupa pembinaan tata boga dan manajemen pembukuan laporan keuangan yang dilakukan di gedung aula Dinas Sosial Kota Cilegon.

Namun, dalam pelaksanaan pembinaan anggota KUBE mengalami beberapa kendala, hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ketua KUBE BUEKA (I<sub>6.1</sub>), beliau menjelaskan:

*“Kendalanya lumayan banyak mba, kita kan semuanya ibu rumah tangga punya anak punya suami. Nah..kalo ada pembinaan kita suka ga fokus karena mikirin anak suami di rumah jadi pikirannya ke rumah aja. Terus juga mba. Disini mah kita kaya dipandang sebelah mata sama orang-orang sama Pak RT juga. kan kalo ada informasi apa-apa biasanya dari kelurahan turun ke RW ke RT, nahh mereka kadang ga nyampein mba, jadi informasinya ga sampe ke anggota. Jadi kita sendiri yang aktif langsung nanyain ke kelurahan.” (Wawancara dengan Ibu Andis Sabariah, Jumat 18 Desember 2014).*

Pernyataan ini juga dipertegas oleh Ketua KUBE LAJE, beliau menjelaskan:

*“Kendalanya paling kalo lagi ada pembinaan ga konsen masih tetep mikirin anak di rumah, maklum lah mba semuanya disini kan ibu rumah tangga jadi mau dimanapun tetep aja pikirannya di rumah.” (Wawancara dengan Ibu Erwin Yualianti, Kamis 17 Desember 2015).*

Berdasarkan pernyataan menurut Ketua KUBE BUEKA dan Ketua KUBE LAJE (I<sub>6.1</sub>, I<sub>6.2</sub>) di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi anggota KUBE dalam pelaksanaan pembinaan kertja, yaitu:

1. Tidak fokus dalam mengikuti kegiatan pembinaan kerja karena semua anggota KUBE adalah Ibu Rumah Tangga yang memiliki anak dan suami, sehingga saat adanya pelatihan mereka tidak berkonsentrasi dan memikirkan anak dan suami di rumah.
2. Tidak sampainya informasi tentang pembinaan langsung kepada anggota KUBE (KUBE BUEKA) karena lingkungan yang tidak mendukung, KETUA RT/RW tidak menyampaikan informasi mengenai program-program pemberdayaan atau pembinaan kepada anggota KUBE.

Namun, pendapat yang berbeda diungkapkan oleh TKSK Kecamatan Citangkil (I<sub>5</sub>), beliau berpendapat:

*“Masalahnya paling dalam menghadapi anggota KUBE yang kurang motivasi, jadi mereka susah untuk belajar sendiri maunya dituntun terus kalau untuk dilepas sendiri susah karena motivasinya kurang sekali.” (Wawancara dengan Bapak Sudirman, SE, Jumat 18 Desember 2015).*

Pendapat ini dibenarkan oleh Ketua KUBE LAJE (I<sub>6.2</sub>), beliau menjelaskan:

*“Ya memang sebagian anggota kita susah banget kalo ga dikasi tau dulu. Jadi mereka harus dituntun dulu baru mau bergerak. Ya tugas ketua juga yang harus sabar-sabar ngadepin anggota yang kurang motivasi seperti ini.” (Wawancara dengan Ibu Erwin Yulianti, Kamis 17 Desember 2015).*

Hal serupa diungkapkan oleh Ex. Ketua KUBE Kelompok Kelapa (I<sub>6.3</sub>), beliau mengungkapkan:

*“Kalau disuruh ikut pelatihan-pelatihan pada males, Mba. Alasannya bilanginya percuma ikutan pelatihan karena ga ada uangnya, bener-bener susah banget diajakin majunya. Jadi waktu itu, saya doang yang semangat. Namanya ilmu kan mahal jadi sayang banget kalau ga dimanfaatin.” (Wawancara dengan Ibu Neneng, Senin 01 Februari 2016).*

Berdasarkan pendapat di atas (I<sub>5</sub>, I<sub>6.2</sub>) dapat diketahui bahwa kurangnya motivasi anggota KUBE juga merupakan salah satu kendala dalam proses pelaksanaan pembinaan kerja.

## **5. Pengkoordinasian (*Coordinating*)**

Sebagai salah satu fungsi manajemen koordinasi merupakan fungsi pengikat, penyeimbang dan penyelaras semua aktifitas, maka dapat diketahui bahwa setiap fungsi manajemen pasti memerlukan fungsi koordinasi. Kebutuhan akan koordinasi tidak dapat dihindarkan karena setiap organisasi mempunyai unit-unit atau satuan-satuan organisasi yang mempunyai fungsi berbeda-beda tetapi mempunyai hubungan yang saling ketergantungan. Namun dalam penelitian ini, koordinasi hanya dibatasi antara Dinas Sosial Kota Cilegon dengan keluarga rentan dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial demi pencapaian tujuan dalam pemberdayaan keluarga rentan.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan keluarga rentan Dinas Sosial hanya melibatkan Kelurahan, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Hal ini seperti yang

diungkapkan oleh Kasi Pemberdayaan dan Lembaga Sosial (I<sub>3</sub>), beliau menjelaskan:

*“Khusus pemberdayaan KUBE kami hanya melibatkan Kelurahan, TKSK, setelah itu RW dan RT baru ke KUBE itu sendiri”. (Wawancara dengan Ibu Yuadhita Brotorini, MM, Kamis 24 April 2015).*

Pernyataan di atas dibenarkan oleh TKSK Kecamatan Citangkil

(I<sub>5</sub>), beliau menjelaskan:

*“Ya benar, biasanya setelah ada program pemberdayaan TKSK dilibatkan dalam pelaksanaan di lapangan, setelah informasi diserahkan ke Kelurahan kemudian turun ke RW dan turun lagi ke RT. RT masing-masing yang memberi informasi lagi ke KUBE”. (Wawancara dengan Bapak Sudirman, SE, Jumat 18 Desember 2015).*

Menurut Kasi Pemberdayaan dan Lembaga Sosial (I<sub>3</sub>) dalam proses pengkoordinasian tidak ada masalah yang berarti, beliau mengatakan hanya masalah pengkoordinasian komunikasi antara Dinas Sosial Kota Cilegon terhadap anggota KUBE tersebut, berikut petikan wawancaranya:

*“Ga ada masalah sih yah, paling cuma masalah komunikasi aja sama anggota. mereka kan berkelompok jadi kemauannya banyak. Jadi untuk menyatukan banyak kemauan jadi satu itu yang susah. Kan ga gampang memilah mana kepentingan pribadi dengan kepentingan kelompok”. (Wawancara dengan Ibu Yuadhita Brotorini, MM, Kamis 24 April 2015).*

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Tenaga Kerja Sosial

Kecamatan (TKSK) Kecamatan Citangkil, beliau mengatakan:

*“Masalahnya paling di komunikasi aja sih mba, komunikasi di antara anggota KUBE itu aja. Mereka kan berlima sampai bertujuh orang jadi punya ego masing-masing buat kepentingan masing-masing maunya diterima semuanya”. (Wawancara dengan Bapak Sudirman, SE, Jumat 18 Desember 2015).*

Pendapat di atas (I<sub>3</sub>, I<sub>5</sub>) diperkuat oleh pernyataan Ketua KUBE

LAJE (I<sub>6.2</sub>), beliau menyatakan:

*“Masalahnya tuh mba nyatuin kepentingan pribadi jadi satu kepentingan bersama kepentingan kelompok. Namanya juga Ibu-Ibu yah, banyak maunya”.* (Wawancara dengan Ibu Erwin Yulianti, Kamis 17 Desember 2015).

Namun, pernyataan yang berbeda diungkapkan oleh Ketua KUBE

BUEKA (I<sub>6.1</sub>), berikut petikan wawancaranya:

*“Kita disini mah kaya ga di dukung sama lingkungan Mba, informasinya suka ga disampein sama Pak RT nya. Kita dipandang sebelah mata, jadi kalau ada informasi Pak RT diem aja ga sampe ke kita jadinya. Yaudah jadi kita langsung aja nanyanya ke Kelurahan”.* (Wawancara dengan Ibu Andis Sabariah, Jumat, 18 Desember 2015).

Dari berbagai pernyataan di atas dapat diketahui bahwa faktor komunikasi merupakan salah satu kendala dalam proses penkoordinasian. Anggota KUBE berangotakan lima sampai tujuh orang dan semua anggota memiliki kepentingan masing-masing. Sulitnya menyatukan kepentingan masing-masing menjadi kepentingan bersama atau kepentingan kelompok menjadikan kendala dalam pengkoordinasian dalam pelaksanaan program pemberdayaan sosial keluarga rentan. Namun, menurut Ketua KUBE BUEKA salah satu permasalahannya terjadi di tahap penyampaian informasi di RT. Ketua RT tidak menyampaikan informasi kepada anggota KUBE BUEKA sehingga anggota KUBE BUEKA langsung mencari informasi mengenai program pemberdayaan sosial atau pembinaan langsung ke Kelurahan.



Menurut Kasi Pemberdayaan dan Lembaga Sosial (I<sub>3</sub>) tidak sampainya informasi mengenai program pemberdayaan atau pembinaan adalah lemahnya faktor pengawasan yang dilakukan di lapangan oleh TKSK. Berikut penjelasannya:

*“Dalam pelaksanaan di lapangan sebenarnya Dinas Sosial dibantu oleh TKSK itu, biasanya pengawasan dilakukan satu sampai dua kali dalam sebulan. Karena hanya satu sampai dua kali dalam sebulan itu jadinya kan lemah sekali dalam pengawasan sampai ada masalah informasi ga sampe ke KUBE”.(Wawancara dengan Ibu Yuadhita Brotorini, MM, Kamis 24 April 2015).*

Menurut Kasi Pemberdayaan dan Lembaga Sosial pengawasan di lapangan dilakukan satu sampai dua kali dalam sebulan oleh TKSK. Pernyataan ini dibenarkan oleh TKSK (I<sub>5</sub>), beliau menyatakan:

*“Untuk pengawasan atau monitoring sebulan itu satu sampai dua kali melakukan pengawasan”. (Wawancara dengan Bapak Sudirman, SE, Jumat 18 Desember 2015).*

Namun, berbeda dengan yang diungkapkan oleh Ketua KUBE BUEKA (I<sub>6.1</sub>), beliau mengungkapkan:

*“Ga ada orang dari Dinsos atau Kecamatan atau Kelurahan tuh yang ngawasin kegiatan kita”. (Wawancara dengan Ibu Andis Sabariah, Jumat 18 Desember 2015).*

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Cilegon atau TKSK dalam mengawasi program pemberdayaan sehingga terjadinya permasalahan tidak sampainya informasi kepada anggota KUBE.

## 6. Pelaporan (*Reporting*)

Laporan merupakan salah satu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis sesuai dengan hubungan wewenang dan tanggung jawab yang ada di organisasi. Dalam penelitian ini, Dinas Sosial Kota Cilegon bertanggung jawab atas program pemberdayaan sosial keluarga rentan. Dinas Sosial Kota Cilegon bertanggung jawab dan harus mengetahui semua kegiatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan sosial keluarga rentan. Dalam penelitian ini, peneliti hanya membatasi bagaimana proses pelaporan dalam pelaksanaan program pemberdayaan sosial keluarga rentan.

Menurut Kasi Pemberdayaan dan Lembaga Sosial bentuk pelaporan program pemberdayaan sosial keluarga rentan adalah Laporan Kinerja Pertanggungjawaban. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Sosial Kota Cilegon ke Walikota Cilegon. Berikut pernyataan Kasi Pemberdayaan dan Lembaga Sosial (I<sub>3</sub>):

*“Bentuk laporannya itu Laporan Kinerja Pertanggungjawaban dibuat oleh Kasubag Program dan Evaluasi kemudian ke Kadis Dinsos kemudian kepada Walikota”. (Wawancara dengan Ibu Yuadhita Brotorini, MM, Kamis 24 April 2015).*

Hal ini juga dipertegas oleh Kasubag Program dan Evaluasi (I<sub>1</sub>),

beliau menjelaskan:

*“Laporannya berupa Laporan Kinerja Pertanggungjawaban. Dibuat oleh Saya kemudian diserahkan kepada Kadis untuk dilaporkan kepada Walikota. Laporannya satu tahun sekali”. (Wawancara dengan Ibu Ida Kristiyanti, M.Si, Kamis, 24 April 2015).*

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa Dinas Sosial Kota Cilegon bertanggungjawab kepada Walikota dalam pelaksanaan program pemberdayaan sosial keluarga rentan. Kasubag Program dan Evaluasi Dinas Sosial Kota Cilegon membuat laporan dengan bentuk Laporan Kinerja Pertanggungjawaban yang diserahkan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon dan akan dipertanggungjawabkan kepada Walikota Cilegon. Laporan Kinerja Pertanggungjawaban ini dibuat satu tahun sekali.

Sedangkan, menurut Kasi Pemberdayaan dan Lembaga Sosial bentuk laporan pertanggungjawaban KUBE kepada Dinas Sosial Kota Cilegon hanya berbentuk laporan keuangan sederhana dan dilaporkan selama tiga bulan sekali, berikut petikan wawancaranya:

*“Untuk KUBE sendiri mereka harus menyerahkan laporannya ke Kita selama tiga bulan sekali. Bentuk laporannya hanya laporan keuangan sederhana saja. Tujuannya agar kita bisa memonitoring kegiatan mereka”. (Wawancara dengan Ibu Yuadhita Brotorini, MM, Kamis, 24 April 2015).*

Pernyataan Kasi Pemberdayaan dan Lembaga Sosial (I<sub>3</sub>) diperkuat oleh pernyataan Ketua KUBE BUEKA (I<sub>6,2</sub>), beliau menyatakan:

*“Bentuk laporannya cuma laporan keuangan biasa aja, Kita serahkan setiap tiga bulan sekali langsung kepada Ibu Dita”. (Wawancara dengan Ibu Andis Sabariah, Jumat 18 Desember 2015).*

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua KUBE LAJE (I<sub>6,2</sub>), beliau menjelaskan:

*“Laporan biasa aja sih, laporan keuangan sederhana, kaya modal, pendapatan, pengeluaran gitu. Setiap tiga bulan sekali harus diserahkan ke Dinsos, biasanya saya serahin ke Ibu Dita*

*langsung.” (Wawancara dengan Ibu Erwin Yulianti, Kamis 17 Desember 2015).*

Dari berbagai pernyataan di atas dapat diketahui bahwa bentuk laporan KUBE kepada Dinas Sosial Kota Cilegon berupa laporan keuangan biasa. Laporan keuangan tersebut diserahkan selama tiga bulan satu kali.

Dalam proses pelaporan terdapat kendala yang dihadapi oleh KUBE BUEKA, hal ini diungkapkan oleh Ketua KUBE BUEKA (I<sub>6.1</sub>), beliau menjelaskan:

*“Kita semua kurang paham teknologi jadi nulis laporannya tulis tangan aja. Coba aja kalau kita gak gaptek pasti lebih mudah dan rapih kalo bisa pake komputer atau engga laptop”. (Wawancara dengan Ibu Andis Sabariah, Jumat 18 Desember 2015).*

Pernyataan ini juga diperkuat oleh Ketua KUBE LAJE (I<sub>6.2</sub>), beliau mengatakan:

*“Ibu-Ibu mah pada gabisa megang laptop mba, pada gaptek apalagi kalo disuruh buat laporan di laptop atau komputer. Jadi laporannya tulis tangan aja yang penting kan isi dari laporan itu sendiri”. (Wawancara dengan Ibu Erwin Yulianti, Kamis 17 Desember 2015).*

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pembuatan laporan keuangan, setiap KUBE mengalami kendala dalam pemahaman teknologi, semua anggota KUBE tidak dapat mengoperasikan *notebook* atau laptop untuk membuat laporan keuangan sehingga laporan keuangan dibuat hanya dengan ditulis tangan.

## 7. Anggaran (*Budgetting*)

Semua kegiatan akan berjalan dengan baik bila disertai dengan usaha pembiayaan dalam bentuk anggaran dan pengawasan anggaran. Dinas Sosial Kota Cilegon merupakan Dinas yang melaksanakan program pemberdayaan sosial kepada keluarga rentan. Dalam program pemberdayaan sosial bantuan yang diberikan bukanlah berbentuk uang tunai melainkan bantuan yang diberikan berbentuk barang yang dibutuhkan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan masing-masing KUBE. Namun, bantuan barang tersebut juga dibatasi sebesar Rp 7.000.000. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kasi Pemberdayaan dan Lembaga Sosial (I<sub>3</sub>), berikut petikan wawancaranya:

*“Untuk bantuan kita ga kasih uang tunai tapi kasih barang yang sesuai dengan jenis usaha dari KUBE masing-masing. Pemberian bantuan tersebut juga ada batasnya, Kita batasi kurang lebih Rp 7.000.000 per KUBE”. (Wawancara dengan Ibu Yuadhita Brotorini, MM, Kamis 24 April 2015).*

Pernyataan Kasi Pemberdayaan dan Lembaga Sosial ini juga dipertegas oleh pernyataan Ketua KUBE BUEKA, beliau menyatakan:

*“Kita sih pengennya bantuannya uang langsung tapi bantuannya berbentuk barang. Kita kan bidangnya dikeripik bawang sama warung sembako, jadi awal bantuannya dikasih kompor, panci, tabung gas, minyak goreng, semacam itu deh sama bahan-bahan sembako untuk warungnya. Kalo dijumlahin sekitar Rp 7.000.000, karena emang dibatasin sama Dinsosnya jumlahnya segitu”. (Wawancara dengan Ibu Andis Sabariah, Jumat 18 Desember 2015).*

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua KUBE LAJE, beliau mengungkapkan:

*“Kita sih maunya dikasih uang yah cuma dibantunya dikasih barang kaya kompor, panci, langsung gitu. Kalau untuk jumlahnya dibatasin sekitar Rp. 7.000.000”. (Wawancara dengan Ibu Erwin Yulianti, Kamis 17 Desember 2015).*

Dalam pemberian bantuan masing-masing KUBE juga harus menyerahkan proposal permohonan bantuan yang berisi bantuan apa saja yang dibutuhkan kepada Dinas Sosial Kota Cilegon. Proposal permohonan bantuan ini diserahkan satu tahun sebelum pemberian bantuan kepada KUBE. Hal ini dijelaskan oleh Kasi Pemberdayaan dan Lembaga Sosial (I<sub>3</sub>), beliau menjelaskan:

*“Karena bentuk bantuannya bukan uang tunai, jadi mereka harus menyerahkan proposal permohonan bantuan terlebih dahulu barang apa saja yang dibutuhkan. Proposal itu juga harus diserahkan satu tahun sebelum cairnya bantuan tersebut”. (Wawancara dengan Ibu Yuadhita Brotorini, MM, Kamis 24 April 2015).*

Proses pencairan permohonan bantuan yang membutuhkan waktu selama satu tahun dikeluhkan oleh Ketua KUBE LAJE (I<sub>6.2</sub>), beliau berpendapat:

*“Menurut sya sih itu lama banget yah, untuk cair aja makan waktu satu tahun, padahal kayanya untuk Dinas mah jumlah Rp 7.000.000 ga gede-gede banget. Keburu kebutuhan kita beda lagi. Tapi ya bersyukur aja namanya juga udah dibantu”. (Wawancara dengan Ibu Erwin Yulianti, Kamis 17 Desember 2015).*

Sedangkan menurut Ketua KUBE BUEKA (I<sub>6.1</sub>) bantuan yang diberikan belum cukup untuk memenuhi kegiatan usaha mereka, berikut petikan wawancaranya:

*“Sebenarnya kan pengennya bentuk uang tunai yah mba tapi kan dibantunya bentuknya barang. Tapi menurut kami bantuan segitu kurang lebih Rp 7.000.000 belum cukup buat memenuhi usaha kami apalagi sekarang harga-harga kan pada naik jadi Kita yang harus pintar milih kebutuhan apa yang bener-bener Kita butuhin supaya KUBE ini terus jalan sampe nanti”. (Wawancara dengan Ibu Andis Sabariah, Jumat 18 Desember 2015).*

Dari berbagai pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pemberian bantuan pemberdayaan tidak berbentuk uang tunai melainkan dengan barang yang sesuai dengan kebutuhan sesuai masing-masing bidang usaha KUBE, misalnya: kompor, panci, tabung gas, minyak goreng, dan sebagainya. Bantuan tersebut juga dibatasi sebesar kurang lebih Rp 7.000.000. Namun, untuk mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Kota Cilegon, masing-masing KUBE harus menyerahkan proposal permohonan bantuan satu tahun sebelum permohonan bantuan tersebut diberikan. Namun, bantuan tersebut dianggap belum mencukupi kebutuhan dalam kegiatan usaha dan waktu satu tahun dianggap waktu yang lama dalam pemberian bantuan.

Dalam pemberian bantuan, Dinas Sosial langsung memberikan kepada KUBE yang disaksikan oleh TKSK. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kasi Pemberdayaan dan Lembaga Sosial (I<sub>3</sub>), beliau menjelaskan:

*“Untuk pemberian bantuan yang bentuknya barang-barang, Kita langsung berikan kepada KUBEnya dan disaksikan oleh TKSK”. (Wawancara dengan Ibu Yuadhita Brotorini, MM, Kamis 24 April 2015).*

Pernyataan ini dibenarkan oleh TKSK Kecamatan Citangkil (I<sub>5</sub>), beliau menyatakan:

*“Saya TKSK ikut jadi saksi dalam pemberian bantuan. Bantuan dari Dinsos langsung diberikan kepada masing-masing KUBE”. (Wawancara dengan Bapak Sudirman, SE, Jumat 18 Desember 2015).*

Menurut KUBE yang gagal Eks. Ketua KUBE Kelompok Kelapa (I<sub>6.3</sub>) bantuan yang sudah diberikan tidak diminta kembali oleh Dinas Sosial Kota Cilegon dan tidak diberi sanksi, berikut petikan wawancaranya:

*“Dari Dinas sih ga ada sanksi apa-apa. Lagian bantuannya kan bukan bentuk uang tapi barang-barang jadi ga diminta lagi sama Dinas”. (Wawancara dengan Ibu Neneng, Senin 01 Februari 2015).*

Pernyataan ini juga dibenarkan oleh Kasi Pemberdayaan dan Lembaga Sosial (I<sub>3</sub>), beliau menjelaskan:

*“Ya, memang bantuan yang diberikan tidak kami minta kembali karena salah satu alasannya memang tidak ada tempat penyimpanannya. Pemberian sanksi juga tidak ada hanya sebatas pendataan saja, Jadi, mereka yang sudah gagal tidak bisa ikut lagi apabila suatu hari membentuk KUBE lagi”. (Wawancara dengan Ibu Dra. Yuadhita Brotorini, MM, Jumat 24 April 2015).*

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bantuan berupa bentuk barang tidak diminta kembali oleh Dinas Sosial Kota Cilegon, dan tidak ada sanksi yang diberikan hanya sebatas pendataan saja sehingga nama anggota dari KUBE yang gagal tidak bisa membuat KUBE lagi.

Dinas Sosial dalam program pemberian bantuan pemberdayaan sosial mendapat pengawasan atau audit satu tahun sekali. Audit tersebut dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPPK) dan Badan Pemberian Keuangan (BPK) Kota Cilegon dan Provinsi



Banten. Hal ini dijelaskan oleh Kasi Pemberdayaan dan Lembaga Sosial (I<sub>3</sub>), berikut petikan wawancaranya:

*“Audit atau pengawasan dari BPKP dan BPK tingkat Kota sama Provinsi. Auditnya dilakukan satu tahun sekali”. (Wawancara dengan Ibu Yuadhita Brotorini, MM, Kamis 24 April 2015).*

Dari berbagai pernyataan di atas dapat diketahui bahwa dalam pemberian bantuan Dinas Sosial Kota Cilegon langsung memberikan bantuan kepada masing-masing KUBE yang disaksikan oleh Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK). Kemudian, dalam program pemberdayaan sosial Dinas Sosial Kota Cilegon mendapatkan pengawasan atau audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kota Cilegon dan Provinsi Banten. Audit tersebut dilakukan selama satu tahun sekali.

#### **4.4 Pembahasan**

##### **4.4.1 Manajemen Program Pemberdayaan Keluarga Rentan di Dinas Sosial Kota Cilegon**

Dari pemaparan di atas mengenai gambaran program pemberdayaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial tujuannya adalah untuk mengentaskan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Cilegon agar terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani dan sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Bila ditinjau dari tujuan program pemberdayaan kesejahteraan sosial maka pemenuhan kebutuhan yang diupayakan adalah pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan kebutuhan sosial, ketentuan pemenuhan kebutuhan tersebut terdapat pada Petunjuk Teknis Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat. Sedangkan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk keluarga rentan dimana mereka menjadi salah satu sasaran program ini.

Pemberdayaan keluarga rentan ini menjadi salah satu tanggung jawab Pemerintah Kota Cilegon bersama-sama dan secara teknis fungsional hal tersebut menjadi salah satu tugas penting Dinas Sosial Kota Cilegon, walaupun hal tersebut hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini ditandai dengan jumlah keluarga rentan di Kota Cilegon terbanyak ketiga setelah wanita rawan sosial ekonomi dan penyandang cacat, jumlah keluarga rentan di Kota Cilegon tahun 2014 sebanyak 1079 kepala keluarga. dinas sosial beserta berbagai sub bagian yang terstruktur di dalamnya bekerjasama dan bersinergi melaksanakan berbagai kegiatan dalam suatu program atau kebijakan yang telah disusun untuk memberdayakan keluarga rentan di Kota Cilegon.

Manajemen program pemberdayaan keluarga rentan di Dinas Sosial ini sangat penting untuk menuntaskan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Cilegon, Dinas Sosial Kota Cilegon dalam

hal melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu salah satunya memberdayakan keluarga rentan.

Adapun uraian indikator pembahasan pada penelitian ini menggunakan proses manajemen dari Luther Gullick dalam Handayani (2001:24) yaitu:

### **1. Perencanaan (*Planning*)**

Tujuan pemberdayaan sosial sesuai dengan visi dari Dinas Sosial Kota Cilegon yaitu terwujudnya kesejahteraan sosial. Selain itu juga, pemberdayaan sosial juga diharapkan dapat menjadikan keluarga rentan memiliki keahlian sehingga menjadikan keluarga rentan menjadi berdaya dan menjadi sejahtera bahkan terbebas dari kemiskinan. Program pemberdayaan sosial yang dilakukan Dinas Sosial tahun 2014 belum mencapai target yaitu 100 orang, target yang dicapai oleh Dinas Sosial Kota Cilegon dalam program pemberdayaan sosial hanya 50% atau 50 orang. Mereka yang diberdayakan dijadikan kelompok yang disebut Kelompok Usaha Bersama (KUBE) masing-masing kelompok beranggotakan 5 orang. Pada proses pencapaian tujuannya juga Dinas Sosial Kota Cilegon mengalami kendala atau hambatan dalam proses pemberdayaan sosial, yaitu dari mental keluarga rentan yang tidak siap menerima program pemberdayaan sosial dan Dinas sosial tidak dapat menjalankan program pemberdayaan sosial

sendiri, Dinas Sosial Kota Cilegon membutuhkan Dinas lain seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi agar proses pencapaian tujuan mendapatkan hasil yang optimal.

## **2. Pengorganisasian (*Organizing*)**

Tidak ada struktur organisasi formal dalam pengorganisasian atau pembagian masing-masing pekerjaan dalam program pemberdayaan sosial. Program pemberdayaan sosial keluarga rentan dilakukan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial dan Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Sosial, selain itu, Kabid Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial dan Kasi Pemberdayaan Lembaga Sosial dibantu oleh 2 orang staff pelaksana dan di lapangan dibantu oleh 1 Tenaga Kerja Sosial Kecamatan per 1 Kecamatan di Kota Cilegon. Staff pelaksana dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan tersebut bukanlah Pegawai Negeri Sipil. Kemudian, kegagalan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dikarenakan kurangnya motivasi anggota dalam menjalankan bidang usaha dan terpakainya modal.

## **3. Penyusunan Pegawai (*Staffing*)**

Kurangnya personil atau Sumber Daya Manusia. Tahun 2014 Dinas Sosial Kota Cilegon hanya memiliki 31 Pegawai Negeri Sipil dan 15 orang Non Pegawai Negeri Sipil dengan salah tugasnya adalah melaksanakan pemberdayaan sosial

demikian menurunkan jumlah PMKS sebanyak 5155 orang. Personil atau Sumber Daya Manusia dalam program pemberdayaan sosial keluarga rentan hanya berjumlah 4 orang, yaitu 2 orang Pegawai Negeri Sipil, 1 Kabid Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial dengan 1 orang Kasi Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial dan Orang Staff Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan personil atau Sumber Daya Manusia yang menjalankan program pemberdayaan sosial kepada keluarga rentan bukan berlatar belakang sosial, melainkan berlatarbelakang pendidikan ekonomi, sains dan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA). Kemudian, dalam penyusunan anggota KUBE, setiap anggota KUBE beranggotakan lima sampai tujuh orang. Namun, yang terdata di Dinsos hanyalah lima orang, dua orang tersebut hanyalah sebagai pembantu agar KUBE dapat terus berjalan mencapai tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan dan dua orang tersebut bukan termasuk dari keluarga rentan.

#### **4. Pembinaan Kerja (*Directing*)**

Pembinaan kerja pegawai belum optimal dikarenakan hanya dilakukan satu tahun sekali di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Kesejahteraan Sosial Bandung Jawa Barat selama dua minggu sedangkan pelaksana program

pemberdayaan sosial kepada keluarga rentan bukan berasal dari latar belakang sosial.

Pada tahun 2014 Dinas Sosial Kota Cilegon sudah melakukan pemberdayaan sosial berupa pembinaan tata boga dan manajemen pembukuan laporan keuangan yang dilakukan di gedung aula Dinas Sosial Kota Cilegon. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi anggota KUBE dalam pelaksanaan pembinaan kerja, yaitu:

- a. Tidak fokus dalam mengikuti kegiatan pembinaan kerja karena semua anggota KUBE adalah Ibu Rumah Tangga yang memiliki anak dan suami, sehingga saat adanya pelatihan mereka tidak berkonsentrasi dan memikirkan anak dan suami di rumah.
- b. Tidak sampainya informasi tentang pembinaan langsung kepada anggota KUBE (KUBE BUEKA) karena lingkungan yang tidak mendukung, KETUA RT/RW tidak menyampaikan informasi mengenai program-program pemberdayaan atau pembinaan kepada anggota KUBE.

Selain itu, kurangnya motivasi anggota KUBE juga merupakan salah satu kendala dalam proses pelaksanaan pembinaan kerja.

## **5. Pengkoordinasian (*Coordinating*)**

Pelaksanaan pemberdayaan keluarga rentan Dinas Sosial hanya melibatkan Kelurahan, TKSK, RW dan RT.

Faktor komunikasi merupakan salah satu kendala dalam proses penkoordinasian. Anggota KUBE berangotakan lima sampai tujuh orang dan semua anggota memiliki kepentingan masing-masing. Sulitnya menyatukan kepentingan masing-masing menjadi kepentingan bersama atau kepentingan kelompok menjadikan kendala dalam pengkoordinasian dalam pelaksanaan program pemberdayaan sosial keluarga rentan. Kemudian hambatan lainnya terjadi di tahap penyampaian informasi di RT. Ketua RT tidak menyampaikan informasi kepada anggota KUBE sehingga anggota KUBE langsung mencari informasi mengenai program pemberdayaan sosial atau pembinaan langsung ke Kelurahan.

Tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Cilegon atau TKSK dalam mengawasi program pemberdayaan sehingga terjadinya permasalahan tidak sampainya informasi kepada anggota KUBE.

## **6. Pelaporan (*Reporting*)**

Dinas Sosial Kota Cilegon bertanggungjawab kepada Walikota dalam pelaksanaan program pemberdayaan sosial keluarga rentan. Kasubag Program dan Evaluasi Dinas Sosial

Kota Cilegon membuat laporan dengan bentuk Laporan Kinerja Pertanggungjawaban yang diserahkan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon dan akan dipertanggungjawabkan kepada Walikota Cilegon. Laporan Kinerja Pertanggungjawaban ini dibuat satu tahun sekali. Sedangkan, bentuk laporan KUBE kepada Dinas Sosial Kota Cilegon berupa laporan keuangan biasa. Laporan keuangan tersebut diserahkan selama tiga bulan satu kali. KUBE mengalami kendala dalam pemahaman teknologi, semua anggota KUBE tidak dapat mengoperasikan *notebook* atau laptop untuk membuat laporan keuangan sehingga laporan keuangan dibuat hanya dengan ditulis tangan.

#### **7. Anggaran (*Budgeting*)**

Dinas Sosial Kota Cilegon Dalam pemberian bantuan pemberdayaan tidak berbentuk uang tunai melainkan dengan barang yang sesuai dengan kebutuhan sesuai masing-masing bidang usaha KUBE, misalnya: kompor, panci, tabung gas, minyak goreng, dan sebagainya. Bantuan tersebut juga dibatasi sebesar kurang lebih Rp 7.000.000. Namun, untuk mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Kota Cilegon, masing-masing KUBE harus menyerahkan proposal permohonan bantuan satu tahun sebelum permohonan bantuan tersebut diberikan. Namun, bantuan tersebut dianggap belum



mencukupi kebutuhan dalam kegiatan usaha dan waktu satu tahun dianggap waktu yang lama dalam pemberian bantuan. Dalam pemberian bantuan, Dinas Sosial langsung memberikan kepada KUBE yang disaksikan oleh Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK). Tidak adanya sanksi yang tegas kepada KUBE yang gagal hanya sebatas pendataan dan bantuan dalam bentuk barang juga tidak diminta kembali. Kemudian, dalam program pemberdayaan sosial Dinas Sosial Kota Cilegon mendapatkan pengawasan atau audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kota Cilegon dan Provinsi Banten. Audit tersebut dilakukan selama satu tahun sekali.

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan bahwa Manajemen Program Pemberdayaan Keluarga Rentan di Dinas Sosial Kota Cilegon belum berjalan secara optimal serta masih banyak yang perlu diperbaiki dalam proses pelaksanaannya karena dari tiap indikator yang ditentukan banyak proses pelaksanaan yang belum dijalankan dengan optimal.

**Tabel 4.4**  
**Pembahasan dan Hasil Penelitian**

| No  | Dimensi                                 | Hasil Temuan di Lapangan  | Kategori      |
|---|---|---|---------------|
| Teori Fungsi Manajemen Luther Gullick dalam Handyaningrat (2001:24) |   |   |               |
| 1   | Perencanaan<br><i>(Planing)</i>         | Program pemberdayaan sosial yang dilakukan Dinas Sosial tahun 2014 belum mencapai target yaitu 100 orang, target yang dicapai oleh Dinas Sosial Kota Cilegon dalam program pemberdayaan sosial hanya 50% atau 50 orang. Mereka yang diberdayakan dijadikan kelompok yang disebut Kelompok Usaha Bersama (KUBE) masing-masing kelompok beranggotakan 5 orang.  | Tidak optimal |
| 2   | Pengorganisasian<br><i>(Organizing)</i> | Tidak ada struktur organisasi formal dalam pengorganisasian atau pembagian masing-masing pekerjaan dalam program pemberdayaan sosial. Program pemberdayaan sosial keluarga rentan dilakukan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial dan Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Sosial, selain itu, Kabid Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial dan Kasi Pemberdayaan Lembaga Sosial dibantu oleh 2 orang staff pelaksana dan di lapangan dibantu oleh 1 Tenaga Kerja Sosial Kecamatan per 1 Kecamatan di Kota Cilegon. Staff pelaksana dan Tenaga Kerja | Tidak optimal |

|   |   |   |               |
|---|---|---|---------------|
|   |   | Sosial Kecamatan tersebut bukanlah Pegawai Negeri Sipil. Kurangnya motivasi KUBE dan terpakainya modal sehingga KUBE gagal.   |               |
| 3 | Penyusunan Pegawai<br>( <i>Staffing</i> ) | Kurangnya personil atau Sumber Daya Manusia. Tahun 2014 Dinas Sosial Kota Cilegon hanya memiliki 31 Pegawai Negeri Sipil dan 15 orang Non Pegawai Negeri Sipil. Personil atau Sumber Daya Manusia dalam program pemberdayaan sosial keluarga rentan hanya berjumlah 4 orang dan bukan berlatar belakang sosial, melainkan berlatarbelakang pendidikan ekonomi, sains dan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA). Kemudian, dalam penyusunan anggota KUBE, setiap anggota KUBE beranggotakan lima sampai tujuh orang. | Tidak optimal |
| 4 | Pembinaan Kerja<br>( <i>Directing</i> )   | Minimnya pembinaan kerja pegawai yang hanya dilakukan satu tahun sekali di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Kesejahteraan Sosial Bandung Jawa Barat selama dua minggu sedangkan pelaksana program pemberdayaan sosial kepada keluarga rentan bukan berasal dari latar belakang sosial.<br><br>Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi anggota KUBE dalam pelaksanaan pembinaan kerja, yaitu: Tidak fokus dalam mengikuti kegiatan  | Tidak optimal |

|   |   |   |                      |
|---|---|---|----------------------|
|   |   | <p>pembinaan kerja karena semua anggota KUBE adalah Ibu Rumah Tangga yang memiliki anak dan suami, sehingga saat adanya pelatihan mereka tidak berkonsentrasi dan memikirkan anak dan suami di rumah. Kemudian, tidak sampainya informasi tentang pembinaan langsung kepada anggota KUBE (KUBE BUEKA) karena lingkungan yang tidak mendukung, KETUA RT/RW tidak menyampaikan informasi mengenai program-program pemberdayaan atau pembinaan kepada anggota KUBE.</p> <p>Selain itu, kurangnya motivasi anggota KUBE juga merupakan salah satu kendala dalam proses pelaksanaan pembinaan kerja.</p> |                      |
| 5 | <p>Pengkoordinasian<br/>(<i>Coordinating</i>)</p> | <p>Faktor komunikasi merupakan salah satu kendala dalam proses penkoordinasian. Anggota KUBE berangotakan lima sampai tujuh orang dan semua anggota memiliki kepentingan masing-masing. Sulitnya menyatukan kepentingan masing-masing menjadi kepentingan bersama atau kepentingan kelompok menjadikan kendala dalam pengkoordinasian dalam pelaksanaan program pemberdayaan sosial keluarga rentan. Kemudian hambatan lainnya terjadi di tahap penyampaian informasi di RT. Ketua RT tidak menyampaikan informasi kepada anggota KUBE sehingga anggota KUBE langsung</p>                           | <p>Tidak optimal</p> |

|   |   |   |                      |
|---|---|---|----------------------|
|   |   | <p>mencari informasi mengenai program pemberdayaan sosial atau pembinaan langsung ke Kelurahan.</p> <p>Tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Cilegon atau TKSK dalam mengawasi program pemberdayaan sehingga terjadinya permasalahan tidak sampainya informasi kepada anggota KUBE.</p>   |                      |
| 6 | <p>Pelaporan<br/>(<i>Reporting</i>)</p> | <p>Bentuk laporan KUBE hanya laporan keuangan sederhana yang diserahkan ke Dinas Sosial Kota Cilegon selama tiga bulan sekali. Namun, KUBE mengalami kendala didalam pemahaman teknologi, semua anggota KUBE tidak dapat mengoperasikan <i>notebook</i> atau laptop untuk membuat laporan keuangan sehingga laporan keuangan dibuat hanya dengan ditulis tangan.</p>  | <p>Tidak optimal</p> |
| 7 | <p>Anggaran<br/>(<i>Budgeting</i>)</p>  | <p>Dinas Sosial Kota Cilegon Dalam pemberian bantuan pemberdayaan tidak berbentuk uang tunai melainkan dengan barang yang sesuai dengan kebutuhan sesuai masing-masing bidang usaha KUBE, misalnya: kompor, panci, tabung gas, minyak goreng, dan sebagainya. Bantuan tersebut juga dibatasi sebesar kurang lebih Rp 7.000.000. Namun, untuk mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Kota Cilegon, masing-masing KUBE harus menyerahkan</p> | <p>Tidak optimal</p> |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>proposal permohonan bantuan satu tahun sebelum permohonan bantuan tersebut diberikan. Namun, bantuan tersebut dianggap belum mencukupi kebutuhan dalam kegiatan usaha dan waktu satu tahun dianggap waktu yang lama dalam pemberian bantuan.</p> <p>Tidak ada sanksi yang tegas kepada KUBE yang gagal hanya sebatas pendataan saja.</p> |  |
|--|--|---|--|

*(Sumber: Peneliti, 2015).*

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang maka kesimpulan yang didapat bahwa Manajemen Program Pemberdayaan Keluarga Rentan di Dinas Sosial Kota Cilegon tidak optimal.

**Pertama**, tidak optimalnya proses perencanaan (*planning*) karena Dinas Sosial Kota Cilegon belum mencapai target dalam pencapaian tujuan program pemberdayaan. **Kedua**, proses pengorganisasian (*organizing*) tidak optimal karena tidak adanya struktur organisasi formal dalam pembagian masing-masing pekerjaan dalam program pemberdayaan sosial. **Ketiga**, tidak optimalnya program pemberdayaan keluarga rentan karena dalam proses penyusunan pegawai (*staffing*) Dinas Sosial Kota Cilegon kekurangan personil atau Sumber Daya Manusia dan personil tersebut bukan berasal dari latar belakang sosial. **Keempat**, tidak optimalnya pembinaan kerja (*directing*) terhadap personil atau pegawai Dinas Sosial Kota Cilegon karena hanya dilakukan satu tahun sekali di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Kesejahteraan Sosial Bandung Jawa Barat selama dua minggu dan pembinaan kepada keluarga rentan pada tahun 2014 dilakukan sebanyak dua kali. **Kelima**, tidak optimalnya proses pengkoordinasian (*coordinating*) yang disebabkan oleh faktor komunikasi antara Dinas Sosial dengan anggota KUBE. Selain itu, informasi terhambat pada Ketua RT sehingga

anggota KUBE tidak mengetahui adanya program pemberdayaan dari Dinas Sosial Kota Cilegon. Selain itu, tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Cilegon atau TKSK dalam mengawasi program pemberdayaan sehingga terjadinya permasalahan tidak sampainya informasi kepada anggota KUBE. **Keenam**, tidak optimalnya proses penyusunan laporan (*reporting*) karena kurangnya pemahaman teknologi oleh anggota KUBE dalam pembuatan laporan keuangan yang harus diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Cilegon setiap tiga bulan sekali. **Ketujuh**, tidak optimalnya program pemberdayaan karena dalam anggaran (*budgeting*) karena kurangnya bantuan yang diberikan bantuan yang diberikan bukan berbentuk uang tunai melainkan dengan barang yang sesuai dengan kebutuhan sesuai masing-masing bidang usaha KUBE, Bantuan tersebut juga dibatasi sebesar kurang lebih Rp 7.000.000.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka untuk meningkatkan manajemen program pemberdayaan keluarga rentan di Dinas Sosial Kota Cilegon di masa yang akan datang maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Diharapkan Dinas Sosial Kota Cilegon mengevaluasi program yang telah berjalan sebelumnya sehingga perencanaan di masa yang akan datang dapat tepat sasaran dan mencapai target sehingga terwujudnya visi misi dari Dinas Sosial Kota Cilegon sendiri, yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat.



2. Membuat struktur organisasi formal agar masing-masing pembagian pekerjaan dapat terlaksana dengan optimal.
3. Melakukan perekrutan pegawai agar personil atau Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan program pemberdayaan keluarga rentan dapat berjalan dengan optimal.
4. Pembinaan pegawai dilakukan lebih dari satu kali dalam satu tahun, karena pegawai di Dinas Sosial Kota Cilegon kebanyakan bukan berasal dari latar belakang sosial sehingga dapat mengoptimalkan program pemberdayaan sosial dan pembinaan kepada keluarga rentan dilakukan sesering mungkin, sehingga keluarga rentan tersebut menjadi berdaya sehingga terwujudnya kesejahteraan sosial.
5. Melakukan pengawasan yang rutin minimal 1 kali dalam sebulan agar program pemberdayaan dapat berjalan secara optimal.
6. Membuat program pembinaan teknologi terutama pembuatan laporan keuangan sehingga anggota KUBE dapat menguasai teknologi.
7. Bantuan yang diberikan kepada masing-masing KUBE sebaiknya ditambah dalam bentuk uang tunai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Hadi, Sutrisno. 1984. *Bimbingan Menulis Skripsi dan Thesis*. Yogyakarta: Andi
- \_\_\_\_\_, 1990. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Andi
- Handayaniingrat, Soewarno. 2001. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Mas Agung
- Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: DIA FISIP UI
- Jamasy, Owin. 2004. *Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Mizan Pustaka
- Milles, B dan Hubberman, Michael A. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press
- Moleong, J.Lexy. 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosada Karya
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Prijono, Onny S dan Pranarka A.M.W. 1996. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and Internasional Studies
- Salusu, Jonathan. 2006. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2010. *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial*. Bandung: STKSPress
- \_\_\_\_\_, 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Reflika Aditama
- \_\_\_\_\_, 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_, 2004. *Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Balatbangsos
- Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Sulistiyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media

- Suriatna. 1987. *Metode Penyuluhan Pendidikan*. Jakarta: Mediatama Sarana Prakarsa
- Suud, Mohammad. 2006. *3 Orientasi Kesejahteraan*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Tjokroadmidjojo, Bintoro dan Mustopadidjaja. 1980. *Teori Strategi dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung
- Wriahatnolo, Randi R dan Nugroho, Riant. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: Gramedia

**Dokumen:**

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- Peraturan Menteri Sosial RI No. 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
- Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Cilegon Tahun 2014
- Profil Dinas Sosial Kota Cilegon 2014
- Cilegon dalam Angka 2014

**Sumber lain:**

- Chitrasari, Nitha. 2012. Kinerja Dinas Sosial Kota Cilegon dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Cilegon. *Skripsi*. Tidak Dipublikasikan. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Cox, David. 2004. Outline of Presentation on Poverty Alleviation Programs in the Asia-Pacific. *International Seminar on Curriculum Development for Social Work Education in Indonesia*. Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. 2 Maret
- Suradi, dkk. 2010. Pemberdayaan Keluarga: Studi Evaluasi di Sulawesi Utara, Sumatra Barat, Kalimantan Selatan dan Jawa Timur. *Penelitian*. Jakarta: P3KS Press
- Wijaya, Reiza. 2012. Evaluasi Program Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga (AKSK) di Kecamatan Walantaka Kota Serang. *Skripsi*. Tidak Dipublikasikan. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

[www.banten.bps.go.id](http://www.banten.bps.go.id)

[www.cilegonkota.bps.go.id](http://www.cilegonkota.bps.go.id)

[www.pusdatin.go.id](http://www.pusdatin.go.id)

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara  
2. Ilmu Komunikasi  
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten  
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: [kontak@fisip-untirta.ac.id](mailto:kontak@fisip-untirta.ac.id)

Nomor : 80 /UN.43.6.1/PG/2015

02 Februari 2015

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon  
di  
Tempat

Dengan Hormat,  
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Amelia Rizky O  
NIM : 6661112424

Semester : 7

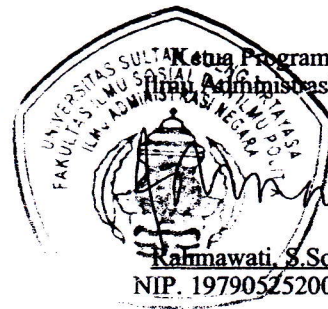
Mata Kuliah: Skripsi

Judul : Manajemen Pemberdayaan Keluarga Rentan oleh Dinas Sosial Kota Cilegon

Data : Program Pemberdayaan Keluarga Rentan, Wawancara, dll  
diperlukan

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.



Ketua Program Studi  
Ilmu Administrasi Negara

Rahmawati, S.Sos, M.Si  
NIP. 197905252005012001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara  
2. Ilmu Komunikasi  
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax: 0254-281245 Pakupatan Serang Banten  
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: [kontak@fisip-untirta.ac.id](mailto:kontak@fisip-untirta.ac.id)

Nomor : 85 /UN.43.6.1/PG/2015

04 Februari 2015

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.  
Kepala Badan Kesbanglinmas Kota Cilegon  
di  
Tempat

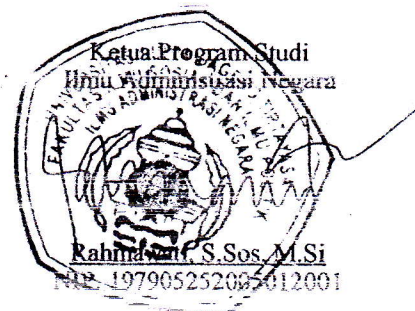
Dengan Hormat,  
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Amelia Rizky O  
NIM : 6661112424

Semester : 7  
Mata Kuliah : Skripsi  
Judul : Manajemen Pemberdayaan Keluarga Rentan oleh Dinas Sosial Kota Cilegon  
Data : Program Pemberdayaan Keluarga Rentan, Renstra, Wawancara, dll diperlukan

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat memberikan izin guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.





# PEMERINTAH KOTA CILEGON BADAN KESBANG DAN LINMAS

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa, Cilegon Plaza Mandiri (CPM) Lantai IV,

Telp. : (0254) 376273 Fax. : (0254) 376273

CILEGON - BANTEN

## **REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070/ 85 /Orgs.Kesbang/2015

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Surat dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 85/UN.43.6.1/PG/2015 tanggal 04 Febuari 2015 Tentang Permohonan Penelitian Tugas Akhir.

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Daerah perlu izin penelitian berdasarkan rekomendasi penelitian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan rekomendasi penelitian;

Walikota Cilegon, memberikan rekomendasi kepada :

N a m a : AMELIA RIZKY OCTARINA

Alamat Peneliti : Jl. Lada Blok A-2 No 17 BBS II RT 012 / 010  
Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon

Judul Penelitian : Manajemen Pemberdayaan Keluarga Rentan Oleh Dinas Sosial Kota Cilegon.

Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui managemen dan pemberdayaan di lakukan oleh Dinas Sosial Kota Cilegon kepada Keluarga Rentan Di Kota Cilegon.

Lokasi Penelitian : DINAS SOSIAL DAN BPS KOTA CILEGON.

Bidang Penelitian : Administrasi Negara

Status Peneliti : Mahasiswa

Penanggung jawab Penelitian : Rachmawati, S.Sos.M.Si.

Anggota Peneliti : -

Lembaga : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jangka Waktu Penelitian : 13 Februari 2015 s.d 13 Mei 2015



SEBELUM MELAKUKAN PENELITIAN, AGAR MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

- a. Melaporkan kedatangannya, kepada Camat, Lurah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah setempat dengan menunjukkan Surat Rekomendasi Penelitian ini;
- b. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian / Survey/ PKL yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan penelitian dimaksud;
- c. Harus mentaati ketentuan perundang – undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat;
- d. Wajib mengajukan perpanjangan Penelitian /Survey/ PKL apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir tetapi pelaksanaan penelitian belum selesai;
- e. Bertanggung jawab sepenuhnya apabila ternyata terdapat hal – hal yang dapat merugikan konsumen dan masyarakat pada umumnya;
- f. Wajib melaporkan secara tertulis kepada Badan Kesbanglinmas Kota Cilegon, dalam waktu paling Lama 1 minggu setelah selesai kegiatan Penelitian.
- g. Kepada Semua Instansi / Lembaga yang terkait dimohon bantuan seperlunya.

Cilegon, 13 FEBRUARI 2015  
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS  
KOTA CILEGON



S U P A R M A N, S H

Pembina Tk. I

NIP. 19620107 198703 1 008

## KETERANGAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Ida Kristianti, M.Si

Pekerjaan/Jabatan : Kasubag Program dan Evaluasi Dinsos  
Kota Cilegon

Menyatakan benar telah dilakukan proses wawancara dan observasi penelitian untuk keperluan penyusunan SKRIPSI yang telah dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : Amelia Rizky Octarina

NIM : 6661112424

Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Saya menyatakan tidak keberatan apabila hasil wawancara dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan dan keabsahan peneliti. Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.



## KETERANGAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suherman, SE

Pekerjaan/Jabatan : Kabid. Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial  
Dinsos Kota Cilegon

Menyatakan benar telah dilakukan proses wawancara dan observasi penelitian untuk keperluan penyusunan SKRIPSI yang telah dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : Amelia Rizky Octarina

NIM : 6661112424

Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Saya menyatakan tidak keberatan apabila hasil wawancara dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan dan keabsahan peneliti. Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Informan Penelitian



## KETERANGAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Yuadhita Brotornji, MMS

Pekerjaan/Jabatan : Kasir Pemberdayaan dan Lembaga Sosial  
Dinsos Kota Cilegon

Menyatakan benar telah dilakukan proses wawancara dan observasi penelitian untuk keperluan penyusunan SKRIPSI yang telah dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : Amelia Rizky Octarina

NIM : 6661112424

Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Saya menyatakan tidak keberatan apabila hasil wawancara dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan dan keabsahan peneliti. Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.



## KETERANGAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hikmawati, S.Si

Pekerjaan/Jabatan : Staff Pelaksana Dinsos Kota Cilegon

Menyatakan benar telah dilakukan proses wawancara dan observasi penelitian untuk keperluan penyusunan SKRIPSI yang telah dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : Amelia Rizky Octarina

NIM : 6661112424

Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Saya menyatakan tidak keberatan apabila hasil wawancara dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan dan keabsahan peneliti. Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.



## KETERANGAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUDIRMIAN, SE

Pekerjaan/Jabatan : TKSF. CITANGKIL

Menyatakan benar telah dilakukan proses wawancara dan observasi penelitian untuk keperluan penyusunan SKRIPSI yang telah dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : Amelia Rizky Octarina

NIM : 6661112424

Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Saya menyatakan tidak keberatan apabila hasil wawancara dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan dan keabsahan peneliti. Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.



## KETERANGAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andis Sabariyah

Pekerjaan/Jabatan : KETUA KUBE BUEKA

Menyatakan benar telah dilakukan proses wawancara dan observasi penelitian untuk keperluan penyusunan SKRIPSI yang telah dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : Amelia Rizky Octarina

NIM : 6661112424

Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Saya menyatakan tidak keberatan apabila hasil wawancara dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan dan keabsahan peneliti. Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

**Informan Penelitian**



Andis Sabariyah

## KETERANGAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erwin Yulianti

Pekerjaan/Jabatan : Ketua KUBE LAJE

Menyatakan benar telah dilakukan proses wawancara dan observasi penelitian untuk keperluan penyusunan SKRIPSI yang telah dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : Amelia Rizky Octarina

NIM : 6661112424

Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Saya menyatakan tidak keberatan apabila hasil wawancara dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan dan keabsahan peneliti. Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

**Informan Penelitian**



---



## KETERANGAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nening

Pekerjaan/Jabatan : Ex. Ketua KUBE Kelompok Kelapa

Menyatakan benar telah dilakukan proses wawancara dan observasi penelitian untuk keperluan penyusunan SKRIPSI yang telah dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : Amelia Rizky Octarina

NIM : 6661112424

Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Saya menyatakan tidak keberatan apabila hasil wawancara dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan dan keabsahan peneliti. Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

**Informan Penelitian**



---

## MEMBER CHECK

Nama : Hj. Ida Kristianti, M.Si

Pekerjaan/Jabatan : Kasubag Program dan Evaluasi Dinas Sosial Kota Cilegon

Kode Informan : I<sub>1</sub>

Catatan wawancara sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan atau tujuan Dinas Sosial Kota Cilegon dalam program pemberdayaan keluarga rentan?

Jawaban : Visi Dinsos terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat. Jadi, diharapkan dengan adanya program pemberdayaan mereka (keluarga rentan) memiliki keahlian untuk bisa menjadi sejahtera, membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik lagi.

2. Bagaimana pengorganisasian Dinas Sosial Kota Cilegon dalam program pemberdayaan keluarga rentan?

Jawaban : Masalah pengorganisasian sesuai dengan Bidangnya masing-masing. Dalam menangani program pemberdayaan sosial KUBE yaitu di Bidang Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial.

3. Bagaimana penyusunan pegawai Dinas Sosial Kota Cilegon dalam program pemberdayaan keluarga rentan?

Jawaban : Khusus program pemberdayaan sosial KUBE dipegang oleh Kabid Peremberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial dan Kasi Pemberdayaan Sosial dan Lembaga Sosial yang dibantu oleh staff dan TKSK.

4. Bagaimana pembinaan kerja yang dilakukan Dinas Sosial Kota Cilegon dalam program pemberdayaan keluarga rentan?

Jawaban : Pembinaan Kerja rutin dilakukan baik untuk pegawai maupun untuk anggota KUBE itu sendiri. Minimal dilakukan satu tahun sekali.

5. Bagaimana pengkoordinasian yang dilakukan Dinas Sosial Kota Cilegon dalam program pemberdayaan keluarga rentan?

Jawaban : Biasanya yang mejadi masalah dalam pengkoordinasian adalah ego masing-masing anggota KUBE yang sulit disatukan.

6. Bagaimana bentuk pelaporan pertanggungjawaban dalam program pemberdayaan keluarga rentan?

Jawaban : Bentuk pelaporan dari KUBE hanya laporan keuangan sederhana saja dan dilaporkan setiap tiga bulan sekali.

7. Bagaimana dengan Anggaran untuk program pemberdayaan keluarga rentan di Kota Cilegon?

Jawaban : Untuk masalah program bantuan ke KUBE tidak berbentuk uang melainkan barang yang dibutuhkan sesuai dengan bidang usaha.

Cilegon, 24 April 2015



(Hj. Ida Kristianti, M.Si)

## MEMBER CHECK

Nama : SUHERMAN, SE

Pekerjaan/Jabatan : Kabid Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial Dinas Sosial Kota Cilegon

Kode Informan : I<sub>2</sub>

Catatan wawancara sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan atau tujuan Dinas Sosial Kota Cilegon dalam program pemberdayaan keluarga rentan.

Jawaban : Program pemberdayaan ini kan diharapkan agar mereka (keluarga rentan) hidupnya menjadi sejahtera lepas dari kemiskinan.

2. Apa kendala yang dihadapi dalam proses pencapaian tujuan?

Jawaban : Hambatannya dari personal mereka sendiri.

3. Apakah tujuan program pemberdayaan ini sudah bisa mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Cilegon?

Jawaban : Pembinaan dari kita masih belum bisa mengurangi kemiskinan di Cilegon ini, menuntaskan kemiskinan ga hanya sebatas diberi pembinaan keahlian aja tapi mentalnya juga harus dibina. Kalau hanya pembinaan keahlian biasanya, udah..yaa..sebatas belajar..udah dari situ yaudah ilang aja.

4. Bagaimana pengorganisasian Dinas Sosial Kota Cilegon dalam program pemberdayaan keluarga rentan?

Jawaban : Untuk pembagian kerja sudah ditetapkan dari SK Kementrian, tapi yang benar-benar formal sih ga ada yah... Saya disini sebagai Kabid spesialis yang menangani masalah keluarga rentan karena untuk diberdayakan di

KUBE, di bawah saya ada Kasi Pemberdayaan Tenaga dan Nilai-Nilai Sosial, Bapak Hasimudian sama Kasi Pemberdayaan Lembaga Sosial, Ibu Dita. Terus juga kita di bantu sama 2 staff pelaksana, tapi khusus nanganin pemberdayaan keluarga rentan di KUBE yang nanganin saya sama Ibu Dita dibantu dengan staff

5. Bagaimana penyusunan pegawai Dinas Sosial Kota Cilegon dalam program pemberdayaan keluarga rentan?

Jawaban : Di Dinsos Sendiri sebenarnya kekurangan personil yah.. untuk Keseluruhan yang PNS ada 31 orang, tapi yang khusus untuk nanganin keluarga rentan hanya 2 orang dibantu staff 2 orang, bisa dibayangkan kan dengan jumlah keluarga rentan yang banyak ada 1079 kepala keluarga kita cuma segini orang.

6. Hambatan apa yang dihadapi dalam proses *staffing*?

Jawaban : Background saya memang dari ekonomi bukan dari latar belakang sosial, tapi saya tidak begitu mengalami hambatan yang berarti. Keluarga rentan ini kan permasalahan yang besar dari sisi ekonomi jadi menurut saya background saya masih bisa masuk dalam program ini. Background itu tidak menjamin bahwa seseorang mampu melaksanakan pekerjaannya atau tidak.

7. Bagaimana pembinaan kerja yang dilakukan Dinas Sosial Kota Cilegon dalam program pemberdayaan keluarga rentan?

Jawaban : Kalau untuk pegawai rutin dilakukan satu tahun sekali di BBP3KS di Bandung selama dua minggu. Untuk KUBE sendiri minimal satu tahun sekali dibina dan di evaluasi kembali.

**MEMBER CHECK**

8. Bagaimana pengkoordinasian yang dilakukan Dinas Sosial Kota Cilegon dalam program pemberdayaan keluarga rentan?

Jawaban : Program pemberdayaan ini melibatkan Kelurahan, RT, RW dan di lapangan di bantu dengan masing-masing TKSK per Kecamatan.

9. Bagaimana bentuk pelaporan pertanggungjawaban dalam program pemberdayaan keluarga rentan?

Jawaban : Kalau Dinsos namanya Laporan Kinerja Pertanggungjawaban untuk Walikota satu tahun sekali. Kalau untuk KUBEnya cuma laporan keuangan biasa pelaporannya setiap tiga bulan sekali.

10. Bagaimana dengan Anggaran untuk program pemberdayaan keluarga rentan di Kota Cilegon?

Jawaban : bantuannya bukan bentuk uang tunai tapi barang apa yang dibutuhin sesuai dengan usaha mereka.

Cilegon, 23 April 2015



Nama : Dra. Yuadhita Brotorini, MM

Pekerjaan/Jabatan : Kasi Pemberdayaan Lembaga Sosial Dinas Sosial Kota Cilegon

Kode Informan : I<sub>3</sub>

Catatan wawancara sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan Dinas Sosial Kota Cilegon dalam program pemberdayaan keluarga rentan?

Jawaban : Tujuan program ini sesuai dengan visi Dinas Sosial, yaitu memberdayakan masyarakat menjadi sejahtera. Jadi diharapkan dengan adanya pemberdayaan mereka bisa menambah keterampilan dan berkembang menjadi lebih baik.

2. Bagaimana pengorganisasian Dinas Sosial Kota Cilegon dalam program pemberdayaan keluarga rentan?

Jawaban : Kalau untuk struktur formal tidak ada. Bidang yang khusus menangani keluarga rentan dan diberdayakan dalam KUBE, yaitu di Bidang Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial, yaitu Bapak Kabid (Bapak Suherman) dan Saya (Ibu Dita), saya juga dibantu oleh dua staff pelaksana, yaitu mba Hikmat dan Mas Adam. Kemudian di lapangan dibantu oleh TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan) masing-masing satu TKSK di satu Kecamatan.

3. Bagaimana penyusunan pegawai Dinas Sosial Kota Cilegon dalam program pemberdayaan keluarga rentan?

Jawaban : Kami kekurangan personil untuk menangani keluarga rentan, jadi tugas Saya dengan Pak Kabid yang dibantu juga

sama staff pelaksana, Mba Hikmat sama Mas Adam. Untuk benar-benar ngejalanin program ini seharusnya ditambah personil agar tujuan program ini bisa tercapai secara maksimal.

4. Bagaimana pembinaan kerja yang dilakukan Dinas Sosial Kota Cilegon dalam program pemberdayaan keluarga rentan?

Jawaban : untuk pembinaan kerja pegawai dilakukan rutin satu tahun sekali di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Kesejahteraan Sosial Bandung selama dua minggu. Sedangkan, untuk pembinaan anggota KUBE minimal satu tahun sekali juga dilakukan di Aula Dinsos Cilegon. Bentuk pembinaan bisa berupa pelatihan manajemen, pelatihan tata boga, dan sebagainya.

5. Bagaimana pengkoordinasian yang dilakukan Dinas Sosial Kota Cilegon dalam program pemberdayaan keluarga rentan?

Jawaban : Pengkoordinasian di lapangan dibantu dengan TKSK. Untuk kendala hanya lebih kepada menyatukan kemauan masing-masing atau kepentingan pribadi anggota karena tidak mudah untuk menyatukan beberapa kepentingan menjadi satu kepentingan bersama.

6. Bagaimana bentuk pelaporan pertanggungjawaban dalam program pemberdayaan keluarga rentan?

Jawaban : Pelaporan dimulai dari bagian Kasubag Program Evaluasi Kemudian ke Kepala Dinas dan dipertanggungjawabkan ke Walikota, bentuknya Laporan Kinerja Pertanggungjawaban. Sedangkan, bentuk pelaporan dari KUBE hanya laporan keuangan sederhana saja dan dilaporkan setiap tiga bulan sekali. Kendalanya mereka tidak menguasai teknologi



Sedangkan, bentuk pelaporan dari KUBE hanya laporan keuangan sederhana saja dan dilaporkan setiap tiga bulan sekali. Kendalanya mereka tidak menguasai teknologi sehingga laporan yang dibuat secara manual tulis tangan tidak diketik menggunakan komputer.

7. Bagaimana dengan Anggaran untuk program pemberdayaan keluarga rentan di Kota Cilegon?

Jawaban : Dinas Sosial memberikan bantuan ini tidak berbentuk uang melainkan barang apa yang dibutuhkan sesuai dengan bidang usaha masing-masing KUBE. Rata-rata apabila berbentuk uang bantuan tersebut sekitar kurang lebih Rp 7.000.000. Untuk mendapatkan Bantuan KUBE harus membuat proposal permohonan bantuan terlebih dahulu setahun sebelumnya. Sedangkan untuk program ini selalu dilakukannya pengawasan dari Audit setiap tahun.



(Dra. Yoadhita Brotorini, MM)

## MEMBER CHECK

Nama : Hikmawati, S.Si

Pekerjaan/Jabatan : Staff Pelaksana Dinas Sosial Kota Cilegon

Kode Informan : I<sub>4</sub>

Catatan wawancara sebagai berikut:

1. Apa deskripsi tugas pekerjaan sebagai staff pelaksana?

Jawaban : tugas pekerjaan saya adalah yang membantu Kabid Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial dan Kasi Pemberdayaan dan Lembaga Sosial dalam pelaksanaan program pemberdayaan sosial khususnya KUBE. Tugas saya lebih ke administrasi, seperti pencatatan, pendataan, dan sebagainya yang membantu Kasi, Ibu Yuadhita.

2. Apa hambatan yang dihadapi anda sebagai staff pelaksana dalam pelaksana program pemberdayaan sosial?

Jawaban : Kendalanya sih karena saya bukan dari sosial yah tapi dari sains, jadi untuk masalah ini kan menghadapi orang jadi awalnya masalah dari komunikasi antar saya dengan mereka aja (keluarga rentan) karena saya awalnya agak kaku kalo komunikasi dengan oranglain. Tapi lama kelamaan saya jadi biasa dan ini kan udah jadi kewajiban saya bekerja disini jadi kalo sekarang mah udah ga begitu mengalami kendalanya lagi udah biasa.

3. Apakah ada pembinaan kerja untuk pegawai?

Jawaban : Ya, setiap satu tahun sekali rutin pembinaan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Kesejahteraan Sosial Bandung selama dua minggu.

4. Apakah pembinaan tersebut sudah dirasakan optimal?

Jawaban : Saya kan basicnya bukan dari sosial yah.. jadi kayanya kurang optimal aja kalau dilakukan cuma satu tahun sekali. Seharusnya minimal satu tahun ada tiga kali pembinaan kerja lah. Jadi kan kita bisa benar-benar optimal dan jadi lebih baik lagi ngelayanin masyarakatnya.

5. Bagaimana koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program pemberdayaan sosial keluarga rentan?

Jawaban : Untuk koordinasi dilapangan melibatkan TKSK, Kelurahan sama RT dan RW.

6. Kendala apa yang dihadapi dalam proses pengkoordinasian?

Jawaban : masalahnya paling ngehadapin ibu-ibu yah, kadang agak susah komunikasi sama mereka maunya kemauannya dipenuhi semua.



Legon, 25 April 2015

(Hikmahwati, S.Si)

## MEMBER CHECK

Nama : Sudirman, SE  
Pekerjaan/Jabatan : Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Citangkil  
Kode Informan : I<sub>5</sub>  
Catatan wawancara sebagai berikut:

1. Apa tugas dari Tenaga Kerja Sosial Kecamatan? Apakah TKSK adalah Pegawai Negeri Sipil?

Jawaban : Salah satu tugas TKSK ialah membantu Dinas Sosial di lapangan dalam menjalankan program pemberdayaan sosial, salah satunya KUBE. Salah satunya memonitoring kegiatan KUBE atau melakukan pengawasan kegiatan di lapangan minimal satu sampai dua kali dalam sebulan.

2. Sejak kapan menjadi Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK)?

Jawaban : Menjadi TKSK Kecamatan Citangkil dari tahun 2009.

3. Apa yang menjadi hambatan atau kendala sebagai TKSK?

Jawaban : Kendalanya hanya seperti menghadapi anggota KUBE yang kurang motivasi, sehingga mereka hanya mau bergerak apabila hanya mendapat motivasi saja. Kemudian harus benar-benar memilih lokasi sehingga program bantuan ini tepat sasaran. Dan juga menghadapi KUBE yang kurang bertanggungjawab, biasanya setelah mendapat program bantuan mereka tidak berkembang hanya bersemangat saat diberi bantuan saja.

Cilegon, 18 Desember 2015

  
(Sudirman, SE)

## MEMBER CHECK

Nama : Andis Sabariah

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Kelompok Usaha Bersama Bina Usaha Keluarga  
(KUBE BUEKA)

Kode Informan : I<sub>6.1</sub>

Catatan wawancara sebagai berikut:

1. Kapan KUBE BUEKA didirikan? Berapa jumlah anggotanya?

Jawaban : BUEKA sudah berdiri dari Mei 2014 namun baru mendapat bantuan dari Dinsos Cilegon dan terdaftar di Dinsos pada Desember 2014. Beranggotakan tujuh orang namun yang terdaftar di Dinas Sosial hanya lima orang karena anggota harus ada Rumah Tangga Sasaran (RTS) minimal dua orang.

2. Bagaimana pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Cilegon dalam program pemberdayaan keluarga rentan?

Jawaban : Pemberdayaan yang dilakukan berupa pembinaan, yaitu:

- a. Pembinaan Tata Boga selama empat hari pada tanggal 8-9 Juni 2014 dan 14-15 Juni 2015. Seharusnya pembinaan ini dilakukan selama tujuh hari namun hanya dilakukan selama empat hari karena terbentur awal Bulan Ramadhan.
- b. Pembinaan Manajemen yaitu kegiatannya membuat pencatatan dan pembuatan laporan.

Semua pembinaan itu dilakukan di Aula Dinas Sosial Kota Cilegon.

3. Bagaimana pengkoordinasian program pemberdayaan sosial ini?

Jawaban : Melibatkan KUBE, RT, RW, FCU (Family Care Unit) di Kelurahan dan Dinas Sosial Kota Cilegon

4. Bagaimana bentuk pelaporan pertanggungjawaban yang di serahkan ke Dinas Sosial Kota Cilegon dari bantuan yang didapat?

Jawaban : Bentuk pelaporan hanya sekedar fotokopi laporan pembukuan sederhana saja dan dilaporkan setiap tiga bulan sekali ke Dinas Sosial Kota Cilegon ke Ibu Dita.

5. Apakah ada kendala dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban?

Jawaban : Iya ada. Kita semua kurang memahami teknologi jadi hanya sebatas tulis tangan saja, apabila memahami teknologi pasti akan lebih memudahkan Kita dalam pembuatan laporan ini.

6. Berapa jumlah yang di dapat dari program pemberdayaan ini?

Jawaban : Untuk masalah program bantuan ke KUBE tidak berbentuk uang melainkan barang yang dibutuhkan sesuai dengan bidang usaha. Apabila diuangkan kurang lebih totalnya sekitar Rp 7.000.000. bidang usaha kita pembuatan kripik telur dan sudah mulai berkembang ke warung sembako jadi bantuan yang di dapat seperti panci, kompor, minyak goreng dan bahan-bahan sembako.

7. Apakah ada pengawasan dari Dinas Sosial Kota Cilegon atau TKSK ?

Jawaban : Tidak ada yang mengawasi dari pihak Dinsos Cilegon ataupun dari TKSK.

8. Bagaimana sistem pembagian keuntungannya?

Jawaban : Omset yang didapat dari penjualan kripik dan warung sembako dalam sebulan kurang lebih Rp 7.000.000. Masing-masing mendapat Rp 700.000 dari tujuh orang, dimasukan ke uang kas Rp 500.000 dan sisanya 1.600.000 dijadikan modal kembali.

9. Kendala apa saja yang dihadapi dalam program bantuan ini?

Jawaban :

- a. Program bantuan turunnya tidak langsung ke KUBE, melainkan melalui kelurahan kemudian ke RT. Namun pada saat di RT, informasinya tidak sampai ke KUBE jadi harus lebih aktif bertanya dan langsung bertanya ke Kelurahan.
- b. Tidak didukung oleh lingkungan. Ketua RT memandang sebelah mata karena dianggap KUBE tidak akan bisa bertahan lama.
- c. Saat pemasaran hanya sebatas di warung-warung kecil saja dan mie ayam sekitar tempat produksi. Sehingga proses berkembangnya lama.
- d. Anggota KUBE semuanya adalah Ibu Rumah Tangga dan memiliki anak dan suami. Sehingga apabila ada program pembinaan menjadi tidak fokus dan tidak optimal.

10. Apakah program bantuan ini memenuhi kebutuhan kehidupan anda?

Jawaban : Kalau untuk memenuhi belum tapi bantuan ini cukup membantu anggota untuk menambahi pendapatan sehingga tidak mengandalkan gaji pokok suami.

Cilegon, 18 Desember 2015



(Andis Sabariah)

**MEMBER CHECK**

Nama : Erwin Yulianti  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KUBE Lawang Rejeki (LAJE)  
Kode Informan : I<sub>6.2</sub>

Catatan wawancara sebagai berikut:

1. Kapan KUBE LAJE didirikan? Berapa jumlah anggotanya?

Jawaban : LAJE udah dari tahun 2009. Anggotanya ada lima orang. Empat orang yang RTS satu orang bukan, kebetulan saya yang bukan RTSnya.

2. Apakah ada pembagian tugas pekerjaan dalam kelompok?

Jawaban : Kalau dikelompok sih bareng-bareng aja. Kalo dari data di Dinsos kan sebenarnya posisi saya kan cuma anggota tapi Ibu-Ibu lain (anggota lain) malah lebih percayainnya ke saya. Saya sih ga masalah yang lain juga ga masalah yang penting tujuan kita kan sama, buat maju bareng-bareng.

3. Pembinaan apa yang sudah di dapat dari Dinas Sosial Kota Cilegon?

Jawaban : Tahun 2014 kemaren dua kali dapat pembinaannya. Tata Boga sama pembinaan cara membuat laporan keuangan, Manajemen yah namanya? Dua-duanya dilakukan di Gedung Aula Dinsos sendiri.

4. Apa kendala yang dihadapi dalam pembinaan kerja?

Jawaban : Kendalanya paling kalo lagi ada pembinaan ga konsen masih tetep mikirin anak di rumah, maklum lah mba semuanya disini kan ibu rumah tangga jadi mau dimanapun tetep aja pikirannya di rumah.

5. Bagaimana proses pengkoordinasian dalam program pemberdayaan?

Jawaban : Dari Kelurahan terus ke RW RT ada orang TKSK juga. paling masalahnya tuh mba nyatuin kepentingan pribadi jadi satu kepentingan bersama kepentingan kelompok. Namanya juga Ibu-Ibu yah, banyak maunya.



Jawaban : Laporan biasa aja sih, laporan keuangan sederhana, kaya modal, pendapatan, pengeluaran gitu. Setiap tiga bulan sekali harus diserahkan ke Dinsos, biasanya saya serahin ke Ibu Dita langsung.

7. Apakah ada kendala dalam pembuatan laporan?

Jawaban : Ibu-Ibu mah pada gabisa megang laptop mba, pada gaptek apalagi kalo disuruh buat laporan di laptop atau komputer. Jadi laporannya tulis tangan aja yang penting kan isi dari laporan itu sendiri.

8. Bagaimana bentuk bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Cilegon?

Jawaban : Kita sih pengennya bantuannya uang langsung tapi bantuannya berbentuk barang. Kita kan bidangnya dikeripik bawang sama warung sembako, jadi awal bantuannya dikasih kompor, panci, tabung gas, minyak goreng, semacam itu deh sama bahan-bahan sembako untuk warungnya. Kalo dijumlahin sekitar Rp 7.000.000, karena emang dibatasin sama Dinsosnya jumlahnya segitu.

9. Apakah ada hambatan dalam proses penerimaan bantuan?

Jawaban : Menurut sya sih itu lama banget yah, untuk cair aja makan waktu satu tahun, padahal kayanya untuk Dinas mah jumlah Rp 7.000.000 ga gede-gede banget. Keburu kebutuhan kita beda lagi. Tapi ya bersyukur aja namanya juga udah dibantu.

Cilegon, 17 Desember 2015



(Erwin Yulianti)

## MEMBER CHECK

Nama : Neneng  
Pekerjaan/Jabatan : Ex. Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kelompok Kelapa  
Kode Informan : I<sub>6.3</sub>  
Catatan wawancara sebagai berikut:

1. Kapan KUBE didirikan? Berapa jumlah anggotanya?  
Jawaban : Kelompok Kelapa berdirinya tahun 2010 berjualan nasi uduk. Anggotanya ada 5 orang.
2. Apakah ada pembagian tugas pekerjaan dalam kelompok?  
Jawaban : Ga ada sih. Dulu kalau kerja bareng-bareng aja ga ada yang sendiri-sendiri. Itu kan buat Dinas Sosial aja buat pendataan siapa Ketua siapa Sekertaris, bendahara tp kalo kenyataannya bareng-bareng aja.
3. Pembinaan apa yang sudah di dapat dari Dinas Sosial Kota Cilegon?  
Jawaban :Dulu pernah pembinaan tata boga sama pembuatan pembukuan.
4. Apa kendala yang dihadapi dalam pembinaan kerja?  
Jawaban : Kalau disuruh ikut pelatihan-pelatihan pada males, Mba. Alasannya bilangny percuma ikutan pelatihan karena ga ada uangnya, bener-bener susah banget diajakin majunya. Jadi waktu itu, saya doang yang semangat. Namanya ilmu kan mahal jadi sayang banget kalau ga dimanfaatin.
5. Mengapa KUBE Kelompok Kelapa tidak berjalan sampai sekarang?  
Jawaban : Dari 2010-2013 berjalan lancar. Tahun 2014 udah mulai masing-masing bilangny males karena dapetnya sedikit jadi pada ga semangat. Satu hari omsetnya rata-rata Rp 150.000 terus harus dipotong buat muterin modal sama kas. Satu orang tiap hari megang Rp 10.000. Mereka bilangny ga semangat capek-capek jualan dapetnya Cuma segitu. Terus yang makin parahny pas

6. Apakah ada sanksi dari Dinas Sosial Kota Cilegon?

Jawaban : Dari Dinas sih ga ada sanksi apa-apa. Lagian bantuannya kan bukan bentuk uang tapi barang-barang jadi ga diminta lagi sama Dinas.

Cilegon, 1 Februari 2016



(Neneng)

## DOKUMENTASI FOTO



Wawancara dengan Kasubag Program dan Evaluasi  
Dinsos Kota Cilegon, Ibu Hj. Ida Kriatianti, M.Si



Wawancara dengan Kabid Pemberdayaan Tenaga dan  
Lembaga Sosial Dinsos Kota Cilegon, Bapak Suherman, SE



Wawancara dengan Kasi Pemberdayaan dan Lembaga Sosial  
Dinsos Kota Cilegon, Ibu Dra. Yuadhita Brotorini, MM

## DOKUMENTASI FOTO



Wawancara dengan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Citangkil, Bapak Sudirman, SE



Foto Bersama Kelompok Usaha Bersama Bina Usaha Keluarga (KUBE BUEKA)



Wawancara dengan Ketua Kelompok Usaha Bersama Bina Usaha Keluarga (KUBE BUEKA), Mbak Andis Sabariah

## DOKUMENTASI FOTO



Warung Sembako KUBE BUEKA



Hasil Produksi Keripik Bawang KUBE BUEKA



Kegiatan Proses Produksi Keripik Bawang KUBE BUEKA

## DOKUMENTASI FOTO



Wawancara dengan Ketua Kelompok Usaha Bersama Lawang Rejeki, Ibu Erwin Yulianti



Sate Bandeng Hasil Produksi KUBE LAJE



Foto Bersama Ibu Neneng, Ex. Ketua KUBE Kelompok Kelapa



## **AMELIA RIZKY OCTARINA**

081293391600 | aameliarizky@gmail.com | 10<sup>th</sup> October 1991

Address : Jl. Lada Blok A2 No. 17 BBS 2 Cilegon

Nationality : Indonesian

Marital Status : Married

### **WORK EXPERIENCE**

---

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 2009-2011             | <b>Flight Attendant</b><br>PT. LION AIR  |
| Januari-Februari 2013 | On the Job Training as Staff Administration<br><b>Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Cilegon</b> |

### **EDUCATION**

---

|           |   |
|-----------|---|
| 2011-2016 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa<br>Major : Public Administration |
| 2006-2009 | SMA Negeri 1 Cilegon  |
| 2003-2006 | SMP Negeri 2 Cilegon  |
| 1997-2006 | SD Negeri Kedaleman 1 Cilegon                                       |

### **COURSE AND TRAINING**

---

|                    |   |
|--------------------|---|
| Sept-November 2009 | Aviation Training Centre Bandung              |
| 2007-2008          | Intermediate Level in LIA                     |
| 2005-2006          | First Step to Communicating in English in LIA |